



BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA SURABAYA



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN ANGGARAN 2023

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya Tahun Anggaran 2023 disusun sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja yang telah disepakati bersama dalam bentuk Perjanjian Kinerja yang memuat Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja dan disertai dengan target kinerja.

Perjanjian Kinerja tahun anggaran 2023 Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya mengacu pada sasaran Visi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia 2020-2024 yakni “Terwujudnya Masyarakat Surabaya yang Terlindungi dan Terselamatkan dari Kejahatan Narkoba”. Untuk mencapai sasaran tersebut telah ditetapkan Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani oleh Kepala BNN Kota Surabaya dan Kepala BNN Provinsi Jawa Timur.

Realisasi Nilai Kinerja BNN Kota Surabaya tahun 2023 adalah 87,96 indeks dari target 87 indeks atau dengan capaian 101,103%, sebagaimana tertuang dalam aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) DJA dashboard BNN Kota Surabaya Tahun Anggaran 2023. Sedangkan realisasi Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kota Surabaya adalah 98,69 indeks dari target 92 indeks atau dengan capaian 107,27% sebagaimana tertuang dalam aplikasi SPANINT MONEV PA KEMENKEU dashboard BNN Kota Surabaya Tahun Anggaran 2023.

Realisasi anggaran BNN Kota Surabaya TA. 2023 sebesar Rp. 2.122.950.445,- atau sebesar 99,70% dari DIPA / anggaran sebesar Rp 2.129.350.000,- dan sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp. 6.399.555,- atau sebesar 0,30%. DIPA / anggaran BNN Kota Surabaya tersebut untuk mendukung tercapainya target Kinerja yang terdiri dari 10 sasaran kegiatan dengan 11 Indikator Kinerja dan terbagi menjadi 2 (dua) program yakni :

1. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba terdapat 8 (delapan) sasaran kegiatan dengan 9 (Sembilan) indikator kinerja.
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya terdapat 2 (dua) sasaran kegiatan dengan 2 (dua) indikator kinerja.

Diharapkan pada tahun berikutnya, seluruh kegiatan dan target kinerja BNN Kota Surabaya dapat lebih mencapai sasaran kegiatan dan indikator kinerja serta mencapai out come yang maksimal dan sesuai dengan harapan masyarakat Surabaya dan sekitarnya serta bermanfaat langsung kepada masyarakat.

KATA PENGANTAR

Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan usaha maksimal yang telah dilakukan Pejabat / Staf Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya dan kerjasama yang baik, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya tahun 2023 dapat disusun dan terselesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan pertanggungjawaban Pejabat dan pegawai Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya dalam mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2023.

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya 2023 disampaikan sasaran kegiatan dan indikator kinerja yang telah ditargetkan dalam Penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Selain itu juga disampaikan capaian indikator serta disampaikan faktor pendukung dan faktor penghambat serta tindak lanjut dalam mencapai target kinerja Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya.

Kami menyadari bahwa diperlukan komitmen, kerja keras, dan kerjasama segenap jajaran di lingkungan Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya dan dukungan dari pihak terkait dalam rangka mencapai target sasaran kegiatan dan indikator kinerja guna mewujudkan visi dan misi Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya.

Kami berharap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat bermanfaat sebagai media evaluasi dan mewakili atas penilaian pelaksanaan kinerja BNN Kota Surabaya tahun 2023. Atas peran serta dan kerja keras seluruh pejabat dan staf Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya selama tahun 2023 yang telah mendukung terlaksananya tugas dan fungsi yang diemban diucapkan banyak terima kasih.

Kami menyadari dalam penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2023 Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya masih belum sempurna, oleh karenanya kami sangat berharap saran dan kritik yang membangun dari semua pihak baik dari internal BNN Kota Surabaya, lembaga terkait maupun masyarakat umum.

Surabaya, 10 Januari 2024
Plt. Kepala Badan Narkotika Nasional
Kota Surabaya



Noer Wisnanto, S.I.K

DAFTAR ISI

1.	Ringkasan Eksekutif	I
2.	Kata Pengantar	ii
3.	Daftar Isi	iii
4.	BAB I, PENDAHULUAN	
	A. Gambaran Umum	1
	B. Dasar Hukum	4
	C. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan	4
	D. Struktur Organisasi	5
	E. Sistematika Penyajian	6
5.	BAB II, PERENCANAAN dan PERJANJIAN KINERJA	
	A. Rencana Program Kerja	7
	B. Rencana Kinerja Tahunan.....	15
	C. Perjanjian Kinerja	17
6.	BAB III, AKUNTABILITAS KINERJA	
	A. Analisis Capaian Sasaran	19
	1) Sasaran Kegiatan Meningkatnya Daya Tangkal Anak dan Remaja Terhadap Pengaruh Buruk Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika	20
	2) Sasaran Kegiatan Meningkatnya Daya Tangkal Keluarga Terhadap Pengaruh Buruk Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika	22
	3) Sasaran Kegiatan Meningkatnya Kesadaran dan Kepedulian Masyarakat dalam Penanganan P4GN	24
	4) Sasaran Kegiatan Meningkatnya Upaya Pemulihan Penyalh guna dan/atau Pecandu Narkotika	28
	5) Sasaran Meningkatnya Kapasitas Tenaga Rehabilitasi	29
	6) Sasaran Aksesibilitas dan Kemampuan Fasiitas Layanan Rehabilitasi Narkotika..	31
	7) Sasaran Kegiatan Meningkatnya Kualitas Layanan Rehabilitasi Narkotika di Klinik Rehabilitasi	35
	8) Sasaran Kegiatan Meningkatnya Pengungkapan Tindak Pidana Narkotika dan Lahan Tanaman Ganja dan Tanaan Terlarang Lainnya	36
	9) Sasaran Meningkatnya Proses Manajemen Kinerja Secara Efektif dan Efesien ...	39
	10)Sasaran Kegiatan Meningkatnya Tata Kelolah Administrasi Keuangan yang sesuai Prosedur	41
	B. Akuntabilitas Keuangan	42
7.	BAB IV, PENUTUP	
	A. Kesimpulan	45
	B. Saran	45
8.	LAMPIRAN – LAMPIRAN	47

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Gambaran kondisi umum, potensi, dan permasalahan pembangunan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalhgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dipaparkan berdasarkan dari hasil pencapaian program periode sebelumnya, kondisi lingkungan strategis, dan perkembangan baru lainnya. Potensi dan permasalahan pembangunan P4GN menjadi input dalam menentukan arah kebijakan dan strategi BNN Kota Surabaya pada periode 2020-2024. Pada perkembangannya, kejahatan narkoba yang bermutasi dengan kejahatan lainnya menyebabkan kerugian sosial ekonomi secara material diperkirakan mencapai sebesar 84,6 Triliun rupiah per tahunnya.

Kinerja pencegahan dan pemberantasan terhadap kejahatan dan pelanggaran hukum baik berupa kejahatan penyalahgunaan maupun kejahatan peredaran gelap Narkoba, sebagaimana menjadi mandat konstitusional keberadaan Badan Narkotika Nasional (BNN), merupakan perwujudan kehadiran negara dalam memberikan perlindungan terhadap warga negaranya untuk tidak menjadi korban dan pelaku kejahatan Narkoba. Dalam kaitan tersebut, kinerja BNN akan selalu dihubungkan dengan angka prevalensi penyalahgunaan Narkoba yang menunjukkan atau menggambarkan situasi penyalahgunaan Narkoba yang sedang terjadi saat ini.

Secara obyektif, Indonesia melalui berbagai institusi dengan BNN sebagai *Leading Sector* masih harus bekerja keras untuk benar-benar keluar dari kondisi darurat tersebut. Penanganan tersebut harus benar-benar tepat agar konfigurasi penyalahgunaan narkoba kalangan coba pakai tidak terus membesar pada satu sisi dan pada sisi yang lain juga tidak berkembang menjadi pecandu. Dalam hal ini, penyalah guna narkoba coba pakai harus secara tepat mendapat penanganan agar menekan perkembangannya.

BNN Kota Surabaya melakukan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dengan berbagai kegiatan melalui Fungsi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Fungsi Rehabilitasi dan Fungsi Pemberantasan. Melalui fungsi tersebut BNN bersinergi dengan seluruh elemen / komponen masyarakat untuk melakukan perlawanan terhadap kejahatan Narkoba.

Fungsi Pencegahan dan pemberdayaan Masyarakat (P2M) melakukan kegiatan Desiminasi Informasi P4G, Advokasi, dan Pemberdayaan Peran serta masyarakat. Fungsi


Rehabilitasi melakukan kegiatan pelaksanaan rehabilitasi penyalahgunaan Narkoba. Sedangkan Fungsi Pemberantasan melakukan Pelaksanaan Penyidikan dan penyelidikan jaringan peredaran gelap narkotika serta pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika.

Sementara itu untuk meningkatkan perhatian seluruh penyelenggara negara terhadap ancaman bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional di Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tahun 2019-2024. Melalui Inpres ini menjadi dasar hukum bagi seluruh penyelenggara negara untuk menyusun Rencana Aksi P4GN di lingkungan instansi masing-masing. Untuk hal tersebut, BNN telah memfasilitasi penyusunan Rencana Aksi baik untuk Instansi Pemerintah Pusat maupun untuk Pemerintah Daerah. Filosofi penetapan Inpres tersebut adalah perlunya kebersamaan seluruh komponen masyarakat bangsa dan negara melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba agar permasalahan tersebut dapat segera dituntaskan.

Dalam Inpres tersebut, BNN ditugaskan untuk menjadi penjurong mengkoordinir laporan realisasi Rencana Aksi dari seluruh Kementerian/ Lembaga baik di Pusat maupun di daerah untuk dilaporkan secara berkala ke Presiden. Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya adalah Lembaga Pemerintah vertikal yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur dan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam Wilayah Kota Surabaya. BNN Kota Surabaya berlokasi di Jalan Ngagel Madya V Nomor 22 Kelurahan Barata Jaya Kecamatan Gubeng Kota Surabaya.

Kinerja suatu organisasi pastinya didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang seharusnya sesuai dengan kebutuhan. Sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang sangat penting yang merupakan kunci sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai visi dan misi BNN Kota Surabaya. Adapun secara keseluruhan komposisi SDM pada BNN Kota Surabaya dan jajaran pada T.A. 2023 adalah sebagai berikut :

SDM BNN KOTA SURABAYA



STATUS SDM	KOMPOSISI		KURANG	PROSENTASE KOMPOSISI SDM
	DSP	RIIL		
PNS ORGANIK	78	12	41	
PNS DPK				
POLRI		8		
TNI				
JUMLAH PEGAWAI SESUAI DSP				
PPNPN		17		
JUMLAH		37		

Bila dilihat pada data tersebut, bahwa SDM yang tersedia pada tahun anggaran 2023 masih jauh dari DSP yang seharusnya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, satker melakukan efisiensi atas penggunaan SDM dalam pencapaian kinerja dengan cara memberdayakan pegawai lintas fungsi bila ada kegiatan yang memang diperlukan SDM yang lebih banyak.

Selain Sumber Daya Manusia, untuk menjalankan fungsi organisasi dibutuhkan juga Sumber Daya Anggaran. Berikut adalah komposisi anggaran BNN Kota Surabaya Tahun Anggaran 2023 :

Seksi	Kegiatan/Output	Pagu
Umum		Rp 1.325.657.000
3236.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	Rp 3.000.000
3236.EBA.994	Layanan Perkantoran	Rp 83.764.000
3237.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	Rp 20.400.000
3238.EBD.952	Layanan Perencanaan	Rp 2.540.000
3238.EBD.953	Layanan Pemantauan Dan Evaluasi	Rp 5.540.000
3239.EBA.956	Layanan BMN	Rp 900.000
3239.EBA.962	Layanan Umum	Rp 51.771.000
3239.EBA.994	Layanan Perkantoran	Rp 1.103.843.000
3239.EBB.951	Layanan Sarana Internal	Rp 35.099.000
3239.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	Rp 3.000.000
3979.EBA.958	Humas & Protokol	Rp 15.800.000
P2M		Rp 391.695.000
3247.QDE.002	Pendampingan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba	Rp 40.000.000
3247.UBB.001	Advokasi Program Ketahanan Keluarga Berbasis Sumber Daya Desa	Rp 60.000.000
3257.QDB.001	Advokasi Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba	Rp 211.695.000
5936.QDC.001	Informasi & Edukasi P4gn (Remaja Teman Sebaya Yg Terbentuk)	Rp 80.000.000

REHABILITASI		Rp	287.548.000
3256.BAA	Pelayanan Publik Kepada Masyarakat	Rp	23.693.000
3259.ADG	Penguatan LRIP	Rp	10.265.000
3260.BAA	Pelayanan Publik Kepada Masyarakat	Rp	191.995.000
3260.BDB	Fasilitasi & Pembinaan Lembaga	Rp	10.030.000
3260.QDB	Fasilitasi & Pembinaan Lembaga	Rp	51.565.000
PEMBERANTASAN		Rp	124.450.000
3258.BAA	Layanan Asesmen Terpadu	Rp	79.450.000
5354.BCA.002	Penyidikan Narkotika	Rp	45.000.000
Total		Rp	2.129.350.000

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214 Tahun 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;
4. Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Keputusan Kepala BNN Nomor KEP/388/XII/2015/BNN Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan BNN, BNNP, dan BNNK/Kota.

C. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan

1. Kedudukan

Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya adalah Lembaga Pemerintah vertikal yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur dan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam Wilayah Kota Surabaya.

2. Tugas

Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Kota Surabaya. Tugas Badan Narkotika Nasional Kota sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala

Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 pasal 2, yaitu BNN Kota/Kabupaten mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang BNN dalam wilayah Kota/Kabupaten.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas dimaksud Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya menyelenggarakan fungsi:

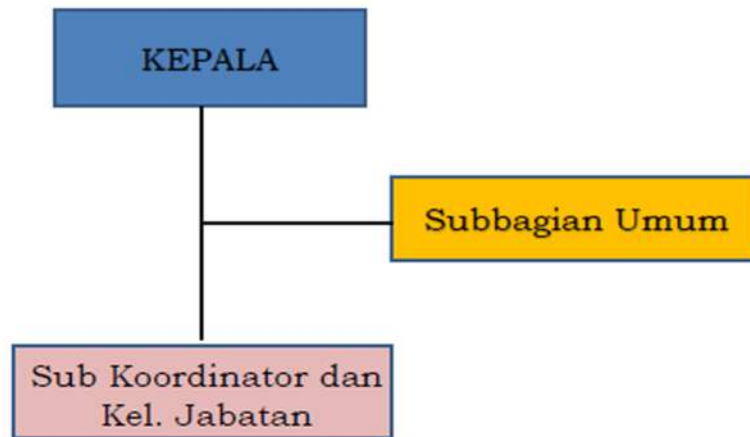
- a. Melaksanakan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan bidang P4GN di wilayah Kota Surabaya;
- b. Melaksanakan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, dan pemberantasan peredaran gelap narkotika di wilayah Kota Surabaya;
- c. Melaksanakan layanan hukum dan kerjasama dalam wilayah Kota Surabaya;
- d. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Kota Surabaya;
- e. Pelayanan administrasi dan Pelaksanaan evaluasi serta pelaporan BNN Kota Surabaya.

4. Kewenangan

Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020, Kepala BNNK mempunyai tugas memimpin BNNK dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Kota, dan mewakili Kepala BNN dalam melaksanakan hubungan kerja sama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Kota.

D. Struktur Organisasi

Berdasarkan Surat Menteri Pan&RB Nomor B/879/M.KT.01/2020 tanggal 16 Juli 2020 perihal Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan BNN yang kemudian disahkannya Peraturan Badan Narkotika Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota, sehingga struktur organisasi BNN Kota Surabaya menjadi :



Sumber : Data Sub Bagian Umum BNNK Surabaya

E. Sistematika

Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I

- A. Gambaran Umum
- B. Dasar Hukum
- C. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan
- D. Struktur Organisasi
- E. Sistematika

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja.

- A. Rencana Strategis/ Rencana Program Kerja
- B. Rencana Kinerja Tahunan
- C. Perjanjian Kinerja

Bab III Akuntabilitas Kinerja.

- A. Analisis Capaian Sasaran
- B. Akuntabilitas Keuangan

Bab IV Penutup.

- A. Kesimpulan
- B. Saran

Lampiran - Lampiran.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Renproja BNN Kota Surabaya

Rencana Strategis (Renstra) BNN Tahun 2020–2024 ditetapkan melalui Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020–2024. Renstra BNN 2020–2024 dirancang dengan merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024 dan menjadi pedoman bagi penyusunan program kerja tahunan lembaga, yaitu Rencana Kerja (Renja) BNN dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BNN. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap kementerian/lembaga perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Penyusunan Renstra dilaksanakan melalui pendekatan proses teknokratik, politik, partisipatif, top down, dan bottom up, dengan pendekatan substansial yang holistik, integratif, tematik, dan spasial (HITS). Dokumen Renstra menjadi dasar bagi gerak strategis dan operasional BNN sebagai LPNK dalam menangani isu nasional dan sekaligus mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan nasional dalam penanganan dan penanggulangan permasalahan narkoba.

Dalam penyusunan visi dan misi Tahun 2020-2024, BNN berpedoman atau mengacu pada visi dan misi presiden terpilih periode 2020-2024, yaitu ***“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong royong”***.

Kepala BNN telah menetapkan visi BNN, yaitu :

“Mewujudkan masyarakat yang terlindungi dan terselamatkan dari kejahatan narkoba dalam rangka menuju Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”

Dalam rangka pencapaian visi, BNN juga memperbaharui misinya agar mencerminkan kegiatan inti dan mandatnya dengan lebih baik. Misi BNN yaitu :

- 1. Memberantas Peredaran Gelap dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba secara Profesional;**
- 2. Meningkatkan Kemampuan Lembaga Rehabilitasi dan Pemberdayaan Ketahanan Masyarakat terhadap Kejahatan Narkoba;**
- 3. Mengembangkan dan Memperkuat Kapasitas Kelembagaan.**

Visi dan misi BNN tersebut dijabarkan ke dalam tujuan yang ingin dicapai pada tahun 2024, yaitu :

1. Melindungi dan menyelamatkan masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran narkoba, dengan tolok ukur dan target capaian Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika sebesar 1,69; serta
2. Mewujudkan transformasi layanan publik yang berkualitas, dengan tolok ukur dan target capaian Indeks Pelayanan Publik berkategori "Sangat Baik"

Untuk mendukung pencapaian tujuan yang terukur dan dapat dicapai, BNN menetapkan sasaran strategis yang merupakan kondisi riil yang diinginkan/dicapai pada akhir periode perencanaan, yaitu :

1. Meningkatnya penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, dengan indikator Indeks P4GN; dan
2. Terwujudnya manajemen organisasi yang profesional produktif, dan proporsional serta berkinerja tinggi, dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi.



Sumber: RENSTRA BNN, 2020

RENPROJA
Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya
Tahun 2020-2024

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Angka Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap Penyalahgunaan Narkoba	-	51	51,5	52	52,5
		Meningkatnya penyebaran informasi P4GN	Persentase masyarakat yang terpapar informasi P4GN	-	-	-	-	-
2	Penyelenggaraan Advokasi	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Angka Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba	-	78,67	79	79,1	79,2
		Meningkatnya kebijakan institusi/lembaga yang responsive dalam penanganan permasalahan narkoba	Jumlah institusi / lembaga yang responsive terhadap kebijakan pembangunan berwawasan anti Narkoba	-	-	-	-	-
3	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Angka Indeks Kemandirian Partisipasi	-	3,42	3,44	3,46	3,48

		Terselenggaranya penguatan kapasitas pada institusi dan lingkungan masyarakat dalam upaya penanganan narkoba	Jumlah instansi / lingkungan yang turut berpartisipasi dalam progam pemberdayaan Anti narkoba	-	-	-	-	-
4	Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi (Ket : Target nilai keterpulihan ditetapkan per kawasan rawan)	-	-	1	1	1
5	Pascarehabilitasi penyalahguna dan/atau Pecandi Narkoba	Terselenggaranya pelayanan pasca rehabilitasi narkoba yang terintegrasi dan berkesinambungan	Jumlah penyalahguna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba yang menjalani layanan pascarehabilitasi	-	-	-	-	-
6	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Terselenggaranya pelayanan rehabilitasi narkoba pada fasilitas rehabilitasi instansi pemerintah yang memadai	jumlah fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah yang operasional	1 Fasilitas	-	-	-	-
7	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	-	5 Lembaga	5 Lembaga	5 Lembaga	5 Lembaga
			Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM	-	1 kelurahan	1 kelurahan	2 kelurahan	2 kelurahan
		Terselenggaranya pelayanan rehabilitasi narkoba pada fasilitas rehabilitasi komponen masyarakat yang memadai	jumlah fasilitas rehabilitasi milik komponen masyarakat yang operasional	4 Fasilitas	-	-	-	-

8	Pelaksanaan Rehabilitasi Penyalah Guna dan/atau Pecandu Narkoba	Meningkatnya mutu layanan rehabilitasi narkoba pada lembaga rehabilitasi BNN	Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNNK	3,2	3,2	3,4	3,4	3,6
9	Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	2 Berkas Perkara	1 Perkara	2 Perkara	4 Perkara	4 Perkara
10	Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Meningkatnya Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti Narkotika						
11	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNNK	85	90	90	91	91
12	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai IKPA BNNK	-	94	94	95	95

****) Indikator Kinerja yang dimandatkan pada beberapa BNN Kabupaten/Kota***

**Matrik Rencana Kebutuhan Pendanaan
Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya
Tahun 2020-2024**

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	PENDANAAN (DALAM JUTA RUPIAH)				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Angka Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap Penyalahgunaan Narkoba	-	130,83	200	220	240
		Meningkatnya penyebaran informasi P4GN	Persentase masyarakat yang terpapar informasi P4GN	185	-	-	-	-
2	Penyelenggaraan Advokasi	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Angka Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba	-	65	72	80	90
		Meningkatnya kebijakan institusi/lembaga yang responsive dalam penanganan permasalahan narkotika	Jumlah institusi / lembaga yang responsive terhadap kebijakan pembangunan berwawasan anti Narkoba	47,93	-	-	-	-
3	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Angka Indeks Kemandirian Partisipasi	-	160,59	215	235	260

		Terselenggaranya penguatan kapasitas pada institusi dan lingkungan masyarakat dalam upaya penanganan narkoba	Jumlah instansi / lingkungan yang turut berpartisipasi dalam progam pemberdayaan Anti narkoba	193,93	-	-	-	-
4	Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi (Ket : Target nilai keterpulihan ditetapkan per kawasan rawan)	-	-	110	120	130
5	Pascarehabilitasi penyalahguna dan/atau Pecandi Narkoba	Terselenggaranya pelayanan pasca rehabilitasi narkoba yang terintegrasi dan berkesinambungan	Jumlah penyalahguna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba yang menjalani layanan pascarehabilitasi	51,375	-	-	-	-
6	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Terselenggaranya pelayanan rehabilitasi narkoba pada fasilitas rehabilitasi instansi pemerintah yang memadai	jumlah fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah yang operasional	116,160	-	-	-	-
7	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	-	76,374	85	85	100
			Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM	-	29,75	50	55	60
		Terselenggaranya pelayanan rehabilitasi narkoba pada fasilitas rehabilitasi komponen masyarakat yang memadai	jumlah fasilitas rehabilitasi milik komponen masyarakat yang operasional	32,350	-	-	-	-

8	Pelaksanaan Rehabilitasi Penyalah Guna dan/atau Pecandu Narkoba	Meningkatnya mutu layanan rehabilitasi narkoba pada lembaga rehabilitasi BNN	Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNNK	0	0	0	0	0
9	Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	150	100	200	300	300
10	Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Meningkatnya Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti Narkotika						
11	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNNK	3,030	7,130	10	20	30
12	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai IKPA BNNK	100,916	90,320	95,440	100,400	105

****) Indikator Kinerja yang dimandatkan pada beberapa BNN Kabupaten/Kota***

B. Rencana Kinerja Tahunan

RENCANA KINERJA TAHUN BNN KOTA SURABAYA T.A. 2023

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN PENDANAAN
1.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	53.00 Indeks	Rp 80.000.000
2.	Penyelenggaraan Advokasi	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	78.69 Indeks	Rp 100.000.000
3.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3.25 Indeks	Rp 211.695.000
4.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan di wilayah Kota yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	-	-
5.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	5 Orang	Rp 10.265.000
			Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	-	-
6.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	5 Lembaga	Rp 10.030.000
			Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM)	2 Lembaga	Rp 51.565.000
		Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di Klinik Rehabilitasi	Indeks kepuasan layanan pada Fasilitas Rehabilitasi BNNK	3.20 Indeks	Rp 45.835.000

7.	Pascarehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba	Meningkatnya Upaya Pemulihan Penyalah guna dan/atau Pecadu Narkotika	Presentase Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	62 %	Rp 23.693.000
8.	Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	1 Perkara	Rp 45.000.000
			Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya yang dimusnahkan*)	-	-
9.	Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	-	Rp 79.450.000
			Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	-	-
10.	Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika	Meningkatnya pengungkapan kasus pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21*)	-	-
11.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran	87 Indeks	Rp 8.080.000
12.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	95 Indeks	Rp 86.754.000
				3260.BAA.004	Rp 148.160.000
				3237.EBC	Rp 20.400.000
				3239.EBA	Rp 1.156.514.000
				3239.EBB	Rp 35.099.000
				3239.EBD	Rp 3.000.000
				3979.EBA	Rp 15.800.000
				Total Anggran	Rp 2.129.350.000

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) merupakan mata rantai kegiatan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Perjanjian kinerja merupakan wujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian Kinerja menjadi dasar bagi penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran setiap unit organisasi dan dasar penetapan bagi sasaran kinerja pegawai. Oleh karenanya, PK dapat menjadi instrumen dalam penentuan pemberian penghargaan ataupun sanksi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian kinerja adalah lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, diharapkan dapat terwujudnya komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati antara Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur dengan Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya, maka Perjanjian Kinerja Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya dapat disampaikan sebagai berikut :

Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Unit Organisasi Eselon III : BNN Kota Surabaya

Tahun Anggaran : 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	53 Indeks
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	78.69 Indeks
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3.25 Indeks
4	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika	Persentase penyalah guna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	62 %
5	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 Orang
6	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	5 Lembaga
		Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yang operasional	2 Unit
7	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika	Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi Pada Fasilitas Rehabilitasi BNN	3.20 Indeks
8	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	1 Berkas Perkara
9	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran	87 Indeks
10	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	92 Indeks

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. ANALISIS CAPAIAN SASARAN

Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya dalam melaksanakan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dan kegiatan untuk mencapai kinerja, melakukan berbagai upaya yaitu melalui perbaikan sistem manajemen organisasi dan manajemen perencanaan.

Pada tahun 2023 Kepala BNN Provinsi Jawa Timur dan Kepala BNN Kota Surabaya telah sepakat bersama bahwa Perjanjian Kinerja / Penetapan Kinerja BNN Kota Surabaya adalah sebanyak 10 (sepuluh) sasaran kegiatan, dengan indikator kinerja sebanyak 11 (sebelas) indikator kinerja. Tabel berikut menjelaskan target dan realiasi sasaran kinerja tahun 2023 BNN Kota Surabaya, sebagai berikut :

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	53 Indeks	53,88 Indeks
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	78.69 Indeks	82,411 Indeks
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3.25 Indeks	3.275 Indeks
4	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika	Persentase penyalah guna dan/ atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	62 %	90,35 %
5	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 Orang	10 Orang
6	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	5 Lembaga	6 Lembaga
		Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yang operasional	2 Unit	2 Unit

7	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkoba	Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi Pada Fasilitas Rehabilitasi BNN	3.20 Indeks	3,43 Indeks
8	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21	1 Berkas Perkara	6 Berkas Perkara
9	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran	87 Indeks	87,96 Indeks
10	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	92 Indeks	98,69 Indeks

Rincian perjanjian kinerja yang terdiri dari 10 (sepuluh) sasaran kegiatan dan 11 (sebelas) indikator kinerja kegiatan (IKK) dapat dijelaskan sebagai berikut :

1.	Sasaran Kegiatan : Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba
----	--

2023

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	Capaian (%)
1	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di Kota Surabaya dengan nilai indeks minimal 53.00	53.00 Indeks (10 Remaja)	53.88 Indeks (10 Remaja)	101,66%

2022

NO	INDIKATOR KERJA	TARGET	REALISASI	Capaian (%)
1	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di Kota Surabaya dengan nilai indeks minimal 52.00	52.00 Indeks (10 Remaja)	52.40 Indeks (10 Remaja)	100,77%

DEFINISI OPERASIONAL

Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap penyalahgunaan Narkoba adalah nilai tingkat kemampuan kalangan remaja dalam mengendalikan diri, menghindarkan diri dari, dan menolak segala bentuk dorongan, keinginan, atau pengaruh buruk penyalahgunaan Narkoba.

METODE PENGUKURAN

Pengukurannya menggunakan cara survei ketahanan diri kepada kalangan remaja secara sampling pada peserta kegiatan Sosialisasi dengan instrumen ukur ketahanan diri (Anti Drug Scale) yakni mobile Dektari Aja yang mencakup 3 dimensi, yaitu Self Regulation yang didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengontrol impuls, emosi, dan pengaruh lingkungan terhadap diri. Dimensi Assertiveness yang didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengutarakan secara langsung apa yang diinginkan atau tidak diinginkan kepada orang lain secara tegas. Dimensi Reaching Out yang didefinisikan sebagai kemampuan untuk meningkatkan aspek positif kehidupan dengan cara menerima tantangan atau menggunakan kesempatan serta meningkatkan keterhubungan dengan orang lain. Instrumen ukur mobile Dekatri Aja dapat diunduh pada link : <https://dektari.bnn.go.id/>

Penghitungan Dektari secara nasional dengan menggunakan mobile Dektari Aja terhadap 66.951 remaja usia 12-21 tahun (pelajar atau mahasiswa) yang telah menerima Sosialisasi dengan capaian indeks 52,70 dari target 53,00. Sedangkan BNN Kota Surabaya telah melakukan penghitungan dengan menggunakan aplikasi mobile Dektari Aja terhadap 792 remaja usia 12-21 tahun dari pelajar dan Mahasiswa di Surabaya yang telah menerima Sosialisasi dengan capaian **indeks 53,88 (tinggi) dari target 53,00 (tinggi)** sesuai surat Kepala BNN RI nomor B/4732/XII/DE/PC.00/2023/BNN tanggal 27 Desember 2023 tentang Hasil Penghitungan Indeks Ketahanan Remaja terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Dektari) tahun 2023.

Faktor Pendukung Capain Kinerja

Dari capaian pengukuran Dektari pada tahun 2022 dan tahun 2023 terlihat bahwa Capaian BNN Kota Surabaya mengalami peningkatan, pada tahun **2022 mencapai indeks 52.40** dari target indeks 52,00 atau dengan capaian **100,77%**, sedangkan pada tahun 2023 mencapai **indeks 53,88 (tinggi) dari target 53,00 (tinggi)** atau dengan capaian **101,66%**. Adapun faktor pendukung dalam mencapai kinerja Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap Penyalahgunaan Narkoba antara lain adalah sebagai berikut :

1. Tingkat kepedulian masyarakat yang tinggi terhadap program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
2. Pelaksanaan Kegiatan Informasi dan Edukasi P4GN oleh BNN Kota Surabaya dengan masif antara lain : melalui Talk Show atau tatap muka, media cetak, perubahan pesan P4GN di Billboard BNN Kota Surabaya, medi elektronik dan pemasangan brading sarana publik “War On Drugs” di taman Komjen M. Duriat Surabaya.
3. Dukungan Pemerintah Kota Surabaya dan lembaga terkait serta masyarakat terhadap pelaksanaan P4GN antara lain : penyediaan sarana prasarana, pemasangan spanduk P4GN, dan pelaksanaan sosialisasi di OPD, sekolah, kampus atau lembaga masing-masing serta di lingkungan masyarakat dengan menghadirkan Narasumber BNN Kota Surabaya.

2	<p>Sasaran Kegiatan :</p> <p>Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika</p>
----------	--

T.A. 2023

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di Kota Surabaya dengan minimal indeks 78.69	78.69 Indeks (5 Kelg)	82.411 Indeks (5 Kelg)	104,728%

T.A. 2022

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di Kota Surabaya minimal indeks 78.68	78.68 Indeks (5 Kelg.)	87.143 Indeks (5 Kelg.)	110,756%

DEFINISI OPERASIONAL

Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba adalah nilai tingkat kemampuan keluarga dalam menangkal dan melindungi diri dan anggota keluarga dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang berasal dari internal maupun eksternal.

METODE PENGUKURAN

Pengukurannya menggunakan cara survei ketahanan keluarga secara sampling kepada 5 (lima) dari 10 (sepuluh) keluarga yang telah menerima / mengikuti kegiatan intervensi Ketahanan Keluarga Anti Narkoba dengan menggunakan isian instrumen SDQ (Strengths and Difficulties Questionnaires), PAFAS (Parent And Family Adjustment Scales), dan CYRM (Child and Youth Resiliences Measure) dengan mengisi isian Dektara BNN pada link <https://www.thetastatistik.com/kuesioner-indeks-ketahanan-keluarga-2022/>.

Penghitungan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Dektara) secara nasional dengan menggunakan isian instrumen tersebut terhadap keluarga yang telah menerima intervensi Ketahanan Keluarga Anti Narkoba dengan capaian indeks 85,39 (tinggi) dari target 78,69. Sedangkan BNN Kota Surabaya telah melaksanakan penghitungan dengan menggunakan instrumen yang sama terhadap 5 (lima) dari 10 (sepuluh) keluarga yang telah menerima / mengikuti kegiatan intervensi dengan capaian **indeks 82,411 (tinggi) dari target 78,69 (tinggi)** sesuai surat Kepala BNN RI nomor B/4729/XII/DE/PC.01/2023/BNN tanggal 27 Desember 2023 tentang Hasil Penghitungan Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Dektara) tahun 2023.

Faktor Pendukung Capaian Kinerja

Capaian kinerja Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba BNN Kota Surabaya tahun 2023 dapat tercapai dengan capaian 104,728%. Namun bila dibandingkan dengan capaian tahun 2022 mengalami penurunan yakni pada tahun 2022 capaian kinerja mencapai mencapai **indeks 87,143** dari target indeks 78,68 atau dengan capaian **110,756%**, sedangkan pada tahun 2023 mencapai **indeks 82,411 (tinggi) dari target 78,69** (tinggi) atau dengan capaian 104,728%.

Adapun faktor pendukung dalam mencapai kinerja Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba antara lain adalah sebagai berikut :

1. Tingkat kepedulian masyarakat yang tinggi terhadap program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
2. Pelaksanaan Kegiatan P4GN yang terkait langsung Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba oleh BNN Kota Surabaya dengan masif antara lain : Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba, Fasilitasi Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba sebanyak 4 kali kegiatan, Informasi dan Edukasi melalui Talk Show atau tatap muka, dan pemasangan branding sarana publik “War On Drugs” di Taman Komjen M. Duriat Surabaya.

3. Dukungan Pemerintah Kota Surabaya dan lembaga terkait serta masyarakat terhadap pelaksanaan P4GN antara lain : penyediaan sarana prasarana, pemasangan spanduk P4GN, dan pelaksanaan sosialisasi P4GN di lingkungan masyarakat dengan menghadirkan Narasumber BNN Kota Surabaya.

3.

Sasaran Kegiatan :

Meningkatnya Kesadaran dan Kepedulian Masyarakat dalam Upaya Penanganan P4GN

T.A. 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di Kota Surabaya	3,25 Indeks (2 lembaga)	3,275 Indeks (2 lembaga)	100,769%

T.A. 2022

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di Kota Surabaya	3,20 Indeks (2 lembaga)	3,34 Indeks (2 lembaga)	104,375%

DEFINISI OPERASIONAL

Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) adalah angka capaian peran serta dan kemandirian masyarakat (para Penggiat P4GN) di lingkungan masing-masing dalam upaya P4GN yang terdiri dari Lingkungan Kerja Pemerintah, Lingkungan Kerja Swasta, Lingkungan Pendidikan dan Lingkungan masyarakat (lingkungan Desa, kelurahan, komunitas, orsosmas, LSM, paguyuban, dan lain-lain serta lingkungan masyarakat rawan dan rentan narkoba).

METODE PENGUKURAN

Adapun untuk mengukur Indeks Kemandirian Partisipasi tersebut adalah dengan pengisian instrumen oleh Penggiat P4GN terdiri dari 6 (enam) variabel sebagai berikut :

- a. SDM; adanya pelaku / pelaksana (tokoh dan penggiat P4GN) sebagai figur yang bisa menyuarakan, mengajak, dan berbuat P4GN di dalam dan di luar lingkungannya.
- b. Metode; adanya metode dalam pelaksanaan P4GN (Pelatihan, Konseling, dan Pelaksanaan

- Tes Urine) atau kegiatan lain yang membawa pesan P4GN.
- c. Anggaran; adanya dukungan anggaran P4GN untuk melaksanakan kegiatan P4GN di dalam dan di luar lingkungan masing – masing.
 - d. Material; adanya sarana dan prasarana yang diadakan melalui kreativitas dan inovasi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan P4GN di dalam dan di luar lingkungannya.
 - e. Sistem (Kebijakan); adanya sistem, regulasi, peraturan mengikat yang digunakan untuk mendukung atau memperkuat pelaksanaan kegiatan P4GN di lingkungannya.
 - f. Aktivitas; adanya pelaksanaan kegiatan P4GN yang dilaksanakan baik sebelum dan sesudah pembentukan Penggiat P4GN.

Capaian Indeks Kemandirian Partisipasi BNN Kota Surabaya tahun 2023 sesuai dengan hasil penghitungan rumus Nasional dengan capaian indeks **3,275 (Mandiri)** dari target **3,25 (Mandiri)**. Adapun rumus penghitungan Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) adalah sebagai berikut :

$$\text{Rumus Penghitungan IKP} = \frac{(\text{Hasil Penilaian Kuisisioner})}{25} = \text{IKP}$$

Hasil Penilaian Kuesioner diperoleh dari penghitungan pengisian kuesioner oleh Penggiat P4GN sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang dari perwakilan Instansi Pemerintah dan Lingkungan Pendidikan yang telah mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis P4GN tahun 2023, sedangkan angka pembagi (25) adalah angka rumus pembagian.

Capaian kinerja Indeks Kemandirian Partisipasi BNN Kota Surabaya tahun 2023 dapat tercapai dengan capaian 100,769% (melebihi dari target yang ada). Namun bila dibandingkan dengan capaian tahun 2022 mengalami penurunan yakni pada tahun 2022 capaian kinerja mencapai **indeks 3,34** dari target indeks 3,20 atau dengan capaian **104,37%**, sedangkan pada tahun 2023 mencapai **indeks 3,275 (Mandiri)** dari target **3,25 (Mandiri)** atau dengan capaian 100,769%.

Program pemberdayaan Peran Serta Masyarakat Anti Narkoba di BNN Kota Surabaya dilaksanakan dengan sasaran Instansi Pemerintah dan Lingkungan Pendidikan. Program Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat diarahkan untuk mencapai Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba (KoTAN). Dampak yang diharapkan dari pelaksanaan program kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah peran serta dan kemandirian seluruh komponen masyarakat dan instansi pemerintah dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat besar dalam upaya menciptakan lingkungan yang bersih dari penyalahgunaan

dan peredaran gelap Narkoba, khususnya Kota Surabaya karena berkaitan langsung dengan penyelenggaraan kehidupan masyarakat sehari-hari. Melalui kebijakan KoTAN ini, peran serta Pemerintah Kota Surabaya diharapkan dapat dimaksimalkan untuk mendukung upaya penanganan masalah narkoba di Kota Surabaya.

Adapun tahapan kegiatan untuk mendukung kinerja ini adalah sebagai berikut :

1. Rapat Kerja Teknis BNNP dan BNNK dalam upaya sinkronisasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat.
2. Pemetaan Kelompok Sasaran, terdiri dari Rapat Koordinasi pemetaan program pemberdayaan masyarakat dan Rapat Koordinasi Pengembangan dan Pembinaan Kota Tanggap Ancaman Narkoba.
3. Pengembangan Kapasitas dan Pembinaan Masyarakat melalui Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba terdiri dari kegiatan sebagai berikut :
 - a. Bimbingan Teknis Penggiat P4GN
 - b. Workshop Penggiat P4GN,
 - c. Pemberdayaan Masyarakat melalui tes urine Narkoba
 - d. Asistensi Kota Tanggap Ancaman Narkoba
 - e. Workshop Tematik P4GN
 - f. Konsolidasi Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba
4. Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Kota Tanggap Ancaman, yang terdiri dari :
 - a. Monitoring Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat
 - b. Evaluasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat
 - c. Pengumpulan Data Indeks Kota Tanggap Ancaman Narkoba

Dalam pelaksanaan Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat Anti Narkoba, BNN Kota Surabaya selain mengukur Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) juga melaksanakan pengukuran Indeks Kota Tanggap Ancaman Narkoba (**IKoTAN**). Untuk mengukur Indeks Kota Tanggap Ancaman Narkoba tersebut dengan melakukan isian-isian yang dikelompokkan menjadi 4 (empat) variabel kuesioner penting sebagai alat ukur yang tepat dalam program P4GN secara intensif yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah, Pekerja Lingkungan Swasta, Lingkungan Pendidikan dan Lingkungan Masyarakat / Keluarga . Adapun variabel tersebut adalah sebagai berikut :

1. Ketahanan Keluarga.

Keluarga merupakan lapis pertama yang merasakan akibat penyalahgunaan narkoba. Ketika ada seorang anggota keluarga yang terkena narkoba, seluruh anggota keluarga

akan merasakan akibatnya. Keluarga menjadi institusi penting sebagai tempat awal untuk mensosialisasikan bahaya narkoba kepada seluruh anggota keluarga. Keluarga yang tangguh tidak hanya membantu secara internal, tetapi juga meluas ke lingkungan sekitar, bahkan sampai tingkat negara. Sebaliknya, keluarga yang rapuh atau rentan tidak akan mampu membina anggotanya untuk tidak bersentuhan dengan narkoba.

2. Ketahanan Masyarakat.

Elemen-elemen dalam masyarakat, lembaga pendidikan, jurnalisme, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga pemerintah saling menopang untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang ideal. Idealisasi tersebut bersumber juga dari masyarakat yang berwujud norma adat, agama, dan aturan negara.

3. Kewilayahan.

Wilayah Kabupaten/Kota di Indonesia tidak hanya memiliki perbedaan secara geografis, tetapi juga perbedaan sosial, ekonomi, politik, dan pertahanan keamanan yang menciptakan kriteria perkotaan. Kabupaten/Kota yang memiliki pusat hiburan dengan jumlah anggota polisi yang tidak sebanding dengan luas wilayah dan absennya LSM yang bergerak di bidang narkoba harus lebih waspada terhadap ancaman narkoba dibandingkan dengan Kabupaten/Kota yang sedikit memiliki pusat hiburan, luas wilayah dan personel kepolisian sudah proporsional, dan ada LSM yang bergerak di bidang narkoba.

4. Lembaga dan Hukum.

Kabupaten/Kota yang tidak memiliki regulasi, anggaran, dan fasilitas rehabilitasi diprediksi akan kesulitan untuk melaksanakan program-program P4GN karena penyalahgunaan narkoba juga tidak hanya dilakukan oleh masyarakat umum, tetapi bisa juga aparat hukum.

Adapun capaian Indeks Kota Tanggap Ancaman Narkoba (**IKoTAN**) BNN Kota Surabaya tahun 2023 yakni pada indeks 2,98 (Tanggap). Capaian ini lebih tinggi dibandingkan dengan capaian rata-rata Nasional yakni indeks 2,85 (Tanggap) sesuai dengan Surat Kepala BNN RI nomor B/4717/XII/DE/PM/2023/BNN tanggal 22 Desember 2023 tentang Hasil Pengukuran Indeks KoTAN tahun 2023. Namun capaian tersebut bila dibandingkan dengan capaian tahun 2022 mengalami penurunan yakni mencapai **indeks 3,37** (Tanggap).

Faktor-Faktor Keberhasilan

1. Tingkat kepedulian Instansi Pemerintah dan lingkungan Pendidikan yang tinggi terhadap pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba atau program P4GN.
2. Ketersediaan tempat pelaksanaan kegiatan yang menarik dan ketersediaan anggaran untuk menunjang pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan.

3. Pelaksanaan kegiatan yang menunjang dapat berjalan sesuai dengan petunjuk dan penyampaian materi oleh narasumber yang sesuai dengan petunjuk pelaksanaan.
4. Terlaksananya Rencana Aksi jangka pendek yang disusun oleh Penggiat Anti Narkoba di Instansi Pemerintah dan Lingkungan Pendidikan.
5. Adanya monitoring dan asistensi yang diberikan oleh panitia untuk menindaklanjuti pelaksanaan rencana aksi P4GN di lingkungan Penggiat P4GN.

- 4. Sasaran Kegiatan :**
Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkoba

T.A. 2023

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
4	Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup	62	90,35	145,7 %

T.A. 2022

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
4	-			

DEFINISI OPERASIONAL

Penyalah guna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup adalah klien yang mengalami peningkatan kualitas hidup yang diukur dari mulai mengikuti rehabilitasi dan selesai rehabilitasi.

METODE PENGUKURAN

Pengukurannya dilakukan dengan cara menghitung peningkatan kualitas hidup klien rehabilitasi rawat jalan dari awal mengikuti rehabilitasi dan selesai rehabilitasi menggunakan formulir WHO-QoL, dan dapat dilihat pada link https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eEAlbtxEZquCPYwV8uo_lunMA6OmsORb9p1xE26MUAc/edit#gid=2026186719.

FAKTOR KEBERHASILAN

1. Adanya komitmen klien untuk menjalani rehabilitasi rawat jalan sampai selesai.
2. Adanya faktor-faktor perubahan klien baik secara fisik, psikologis, sosial dan lingkungan.
3. Dukungan keluarga dan orang yang dekat dengan klien.
4. Anggaran yang tersedia pada anggaran BNN Kota Surabaya untuk menunjang capaian kinerja.

5.

Sasaran Kegiatan :

Meningkatnya kapasitas tenaga rehabilitasi

T.A. 2023

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
5.	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 Orang	10 Orang	100 %

T.A. 2022

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
5	-			

DEFINISI OPERASIONAL

Petugas penyelenggara layanan IBM (Intervensi Berbasis Masyarakat) yang terlatih adalah anggota masyarakat yang mendapatkan pembekalan dan pelatihan teknis tata laksana layanan IBM serta mampu melakukan layanan IBM.

METODE PENGUKURAN

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara melaksanakan pelatihan bagi anggota masyarakat yang terdata menjadi Agen Pemulihan (AP) sesuai Keputusan Lurah Tegalsari dan Lurah Kedungdoro Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya.

Kondisi umum kejahatan narkoba dalam hal *demand side* salah satunya adalah rehabilitasi. Dalam hal ini BNN mendapatkan mandat dari undang-undang untuk melaksanakan penguatan lembaga rehabilitasi dan melakukan rehabilitasi itu sendiri. Penguatan lembaga rehabilitasi meliputi penguatan fasilitas rehabilitasi, tenaga rehabilitasi dan akhirnya melakukan standarisasi terhadap lembaga rehabilitasi yang ada. BNN telah melakukan rehabilitasi secara komprehensif dan berkelanjutan mulai dari rehabilitasi medis dan/atau sosial hingga layanan pascarehabilitasi.

Program rehabilitasi terus dilakukan sebagai upaya agar para pencandu dan korban penyalahgunaan dapat pulih dan mempertahankan pemulihannya serta meningkatkan fungsi sosialnya di masyarakat. Terbatasnya jumlah lembaga rehabilitasi yang ada mengakibatkan aksesibilitas layanan rehabilitasi yang masih minim. Oleh karenanya diperlukan penambahan aksesibilitas fasilitas rehabilitasi untuk menjangkau kebutuhan layanan rehabilitasi di

masyarakat melalui peningkatan layanan rehabilitasi berbasis masyarakat yang nantinya dikembangkan sendiri oleh masyarakat dan untuk masyarakat guna meningkatkan aksesibilitas dan jangkauan rehabilitasi di masyarakat.

IBM merupakan bentuk kepedulian pemerintah dalam penanganan penyalahgunaan narkoba di masyarakat, dengan cara menghadirkan layanan rehabilitasi di masyarakat, mengingat ketersediaan dan aksesibilitas layanan yang masih terbatas jumlahnya.

Program ini dilakukan dengan pendekatan dalam bentuk sederhana, yang berarti layanan tersebut mudah diakses dan tidak membutuhkan persyaratan yang sulit untuk terlibat di dalamnya. Program IBM dilakukan dengan memberdayakan Agen Pemulihan yang merupakan kader IBM di desa/kelurahan. BNN Kota Surabaya telah memberikan pelatihan bagi masyarakat yang menjadi petugas Agen Pemulihan.

BNN Kota Surabaya dapat mencapai target indikator kinerja. Capaian indikator kinerja ini dapat ditunjukkan dengan adanya 10 (sepuluh) petugas penyelenggara layanan IBM yang selanjutnya disebut Agen Pemulihan yang terlatih. 10 (sepuluh) Agen Pemulihan atau penyelenggara layanan IBM yang terlatih tersebut terbagi dalam 2 unit IBM, masing-masing unit IBM memiliki 5 (lima) Agen Pemulihan yang terlatih, yakni :

NO	NAMA PESERTA	ASAL INSTANSI
1	Abraham Ronaldo, ST	RPKN* Kelurahan Kedungdoro Surabaya
2	Fatchur Rochim	RPKN* Kelurahan Kedungdoro Surabaya
3	Sri Hartatik	RPKN* Kelurahan Kedungdoro Surabaya
4	Ani Intelsari	RPKN* Kelurahan Kedungdoro Surabaya
5	Endang Sri Wahjuni	RPKN* Kelurahan Kedungdoro Surabaya
6	Murtiningsih	Kelurahan Tegalsari Bersinar
7	Nur Niayati	Kelurahan Tegalsari Bersinar
8	Roestinah	Kelurahan Tegalsari Bersinar
9	Astutik	Kelurahan Tegalsari Bersinar
10	Aristiyanti	Kelurahan Tegalsari Bersinar

**Relawan Peduli Korban Narkoba*

FAKTOR KEBERHASILAN

Untuk mendukung indikator kinerja Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih, BNN Kota Surabaya telah melaksanakan berbagai upaya kegiatan antara lain :

1. Pembentukan Unit IBM di 2 Kelurahan. Kegiatan ini bertujuan untuk membentuk unit IBM di kelurahan yang SK tim Agen Pemulihan (AP) dikeluarkan oleh Lurah setempat.
2. Bimbingan teknis petugas IBM. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan materi dan kompetensi kepada Agen Pemulihan yang akan bertugas sebagai tim di unit IBM.
3. Penunjukan unit IBM disesuaikan dengan program Kelurahan Bersinar (Bersih Narkoba) yakni di Kelurahan Kedungdoro dan Tegalsari Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya.

6 Sasaran Kegiatan :
Meningkatnya Aksesibilitas dan Kemampuan Fasilitas Layanan Rehabilitasi Narkotika

T.A. 2023

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
6	Jumlah Lembaga Rehabilitasi yang Operasional	5	6	120

T.A. 2022

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
6	Jumlah Lembaga Rehabilitasi yang Operasional	4	6	150

DEFINISI OPERASIONAL

Lembaga rehabilitasi yang operasional adalah lembaga rehabilitasi baik instansi pemerintah maupun komponen masyarakat yang telah bekerja sama dengan BNN Kota Surabaya dan melaksanakan layanan rehabilitasi kepada klien baik layanan rehabilitasi rawat jalan maupun rawat inap, baik secara medis maupun sosial.

METODE PENGUKURAN

Pengukurannya dilakukan dengan cara mendata jumlah lembaga rehabilitasi narkotika yang bekerja sama dengan BNN Kota Surabaya dan mampu mempertahankan serta memenuhi standar layanan lembaga rehabilitasi sesuai dengan SNI 8807:2022 dalam satu tahun anggaran.

Peningkatan aksesibilitas fasilitas rehabilitasi dalam menjangkau kebutuhan layanan rehabilitasi di masyarakat selain dari peningkatan layanan rehabilitasi berbasis masyarakat juga dari penyelenggara layanan rehabilitasi di Klinik BNN Kota Surabaya dan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan fasilitas layanan, BNN Kota Surabaya melakukan peningkatan kinerja lembaga melalui pelaksanaan standardisasi lembaga rehabilitasi sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) 8807:2022.

SNI adalah Standar Nasional Indonesia yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan layanan rehabilitasi bagi pecandu narkoba, penyalahguna narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba, agar layanan rehabilitasi yang diselenggarakan berkualitas. Tujuan SNI adalah untuk melakukan standarisasi layanan rehabilitasi sesuai dengan pedoman yang sudah disusun oleh tim komite yang terdiri dari BNN, Kementerian Sosial, dan Kementerian Kesehatan.

Target kinerja jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional tahun anggaran 2023 dapat tercapai sebanyak 6 (enam) Lembaga dari target 5 (lima) Lembaga. Capaian ini ditandai dengan 6 (enam) lembaga tersebut telah melaksanakan layanan rehabilitasi Narkoba baik rawat jalan maupun rawat inap. Berikut Lembaga rehabilitasi yang beroperasi dan memenuhi SNI serta yang berproses menuju SNI di tahun anggaran 2023 :

NO	LEMBAGA REHABILITASI	KETERANGAN
1	Klinik Pratama BNN Kota Surabaya	Operasional / Proses SNI
2	RSJ. Menur Surabaya	Operasional / Proses SNI
3	Yayasan Bambu Nusantara (Rumah Kita Surabaya)	Operasional / Proses SNI
4	Yayasan LRPPN-BI Surabaya	Operasional / Proses SNI
5	Yayasan Orbit Surabaya	Operasional / SNI Tipe 3
6	Plato Foundation	Operasional / SNI Tipe 3

Secara keseluruhan terdapat Lembaga yang operasional sebanyak 6 lembaga. Yang dimaksud dengan jumlah fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah yang operasional adalah lembaga instansi pemerintah yang bekerjasama dengan BNNP/BNNK untuk menjalankan layanan rehabilitasi baik rawat jalan maupun rawat inap dan telah memberikan pelayanan rehabilitasi pada klien. Sedangkan yang dimaksud dengan jumlah fasilitas rehabilitasi komponen masyarakat yang operasional adalah lembaga rehabilitasi komponen masyarakat yang bekerjasama dengan BNNP/BNNK untuk menjalankan layanan rehabilitasi baik secara medis maupun sosial baik rawat jalan/rawat inap.

Berikut Data Jumlah Layanan Rehabilitasi Narkoba yang Dilakukan oleh Lembaga Rehabilitasi Narkoba tahun 2023 :

NO	LEMBAGA REHABILITASI	JUMLAH LAYANAN REHABILITASI NARKOBA (Orang)		
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Klinik Pratama BNN Kota Surabaya	148	237	142
2	RSJ. Menur Surabaya	Belum SK BNN	223	598
3	Yayasan Bambu Nusantara (Rumah Kita Surabaya)	108	238	90
4	Yayasan LRPPN-BI Surabaya	Belum PKS	Belum PKS	13
5	Yayasan Orbit Surabaya	156	611	472
6	Plato Foundation	100	142	152

FAKTOR KEBERHASILAN

- Banyak lembaga baik LRIP maupun LRKM yang antusias ingin bekerjasama dengan BNN.
- Tenaga layanan rehabilitasi sudah terlatih.
- Adanya kemauan dan kemampuan dari SDM lembaga rehabilitasi untuk melengkapi persyaratan yang kurang dalam bimtek pertama dan kedua sehingga adanya peningkatan pemenuhan SNI 8807:2022 masing-masing lembaga rehabilitasi.
- Adanya kerjasama antar tim yang solid.
- Adanya sarana prasarana yang mendukung.

T.A. 2023

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
7	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang operasional	2	2	100 %

T.A. 2022

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
7	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang operasional	1	1	100 %

DEFINISI OPERASIONAL

Unit penyelenggara layanan Intervensi Berbasis Masyarakat yang operasional adalah unit atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan pendampingan dan pemberian dukungan pemulihan hingga bimbingan lanjut bagi penyalah guna, korban penyalahgunaan dan/atau pecandu narkoba di lingkungannya.

METODE PENGUKURAN

Pengukurannya dilakukan dengan cara mendata jumlah unit penyelenggara layanan intervensi berbasis masyarakat yang telah terbentuk dan mampu menyelenggarakan layanan pendampingan dan pemberian dukungan pemulihan hingga bimbingan lanjut bagi penyalah guna, korban penyalahgunaan dan/atau pecandu narkoba di lingkungannya dalam satu tahun anggaran.

Salah satu respon BNN dalam menanggulangi masalah penyalahgunaan Narkoba adalah dengan membentuk program Desa Bersinar, yaitu desa yang diupayakan memiliki kemampuan untuk mengatasi peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba di wilayahnya secara mandiri.

Program IBM merupakan salah satu bentuk respon masyarakat terhadap layanan rehabilitasi minimal dalam kaitan dengan program P4GN terkait Desa Bersinar. Partisipasi masyarakat dibutuhkan dalam mengentaskan masalah penyalahgunaan narkoba, karena masalahnya ada di masyarakat dan potensi sumber untuk menanganinya pun ada di masyarakat.

Target kinerja Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang operasional tahun anggaran 2023 dapat tercapai sebanyak 2 (dua) unit dari target 2 (dua) unit. Capaian ini ditandai dengan adanya 2 (dua) unit IBM yang telah beroperasi yakni melakukan layanan rehabilitasi rawat jalan kepada orang yang rentan atau rawan penyalahgunaan Narkoba dan sudah melakukan layanan rehabilitasi terhadap penyalah guna Narkoba dengan skoring DAST-10 pada skor 0 - 1. Dua unit IBM tersebut telah dilakukan penilaian oleh Deputi Rehabilitasi BNN dengan hasil fase PRIMA sesuai surat Direktur Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat nomor B/1//DR/RH.02.03/2024/BNN tanggal 2 Januari 2024 tentang Pemberitahuan Hasil Evaluasi Operasionalisasi Unit IBM TA. 2023. Berikut unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat :

NO	NAMA IBM	KELURAHAN	KETERANGAN
1	Tegalsari	Kel. Tegalsari Kec. Tegalsari Kota Surabaya	Operasional
2	RPKN Kedungdoro	Kel. Kedungdoro Kec. Tegalsari Kota Surabaya	Operasional

FAKTOR KEBERHASILAN

Untuk mendukung indikator kinerja Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) upaya antara lain :

1. Pembentukan Unit IBM di 2 (dua) Kelurahan. Kegiatan ini bertujuan untuk membentuk unit IBM di kelurahan.
2. Bimbingan teknis petugas IBM. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan materi dan kompetensi kepada Agen Pemulihan yang akan bertugas sebagai tim di unit IBM.
3. Penunjukan unit IBM disesuaikan dengan program Kelurahan Bersinar (Bersih Narkoba) yakni di Kelurahan Kedungdoro dan Tegalsari Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya.
4. Adanya komitmen perangkat desa dan Agen Pemulihan (AP) untuk menyelenggarakan layanan IBM dengan keterlibatan instansi terkait dan masyarakat setempat.

7 Sasaran Kegiatan :
Meningkatnya Kualitas Layanan Rehabilitasi Narkotika

T.A. 2023

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
8	Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi pada Fasilitas Rehabilitasi BNN	3.20	3.43	107,187 %

T.A. 2022

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
8	Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi pada Fasilitas Rehabilitasi BNN	3.20	3.322	103,81 %

DEFINISI OPERASIONAL

Indeks kepuasan layanan rehabilitasi adalah ukuran tingkat kepuasan masyarakat penerima layanan (klien) terhadap layanan fasilitas rehabilitasi di BNN Kota Surabaya.

METODE PENGUKURAN

Pengukuran Indeks kepuasan layanan rehabilitasi dilakukan melalui survei kepada klien dengan instrumen kuesioner kepuasan layanan yang mengacu pada KepMenPAN nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sebagaimana pada link Indeks Kepuasan Masyarakat : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uI7vPKjNDQOWCq9_CZO-cF3NmWv9HufuQUSLgECEX9s/edit#gid=1388763486.

Beberapa poin yang ditanyakan dalam kuesioner Indeks Kepuasan Masyarakat, antara lain :

1. Persyaratan layanan
2. Sistem, mekanisme dan prosedur layanan
3. Waktu pelayanan
4. Biaya/tarif
5. Produk dan spesifikasi jenis layanan
6. Kompetensi pelaksana
7. Perilaku pelaksana
8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan
9. Sarana dan prasarana

FAKTOR KEBERHASILAN

1. Adanya komitmen klien untuk menjalani rehabilitasi rawat jalan sampai selesai.
2. Adanya faktor-faktor perubahan klien baik secara fisik, psikologis, sosial dan lingkungan.
3. Dukungan keluarga dan orang yang dekat dengan klien.
4. Anggaran yang tersedia pada anggaran BNN Kota Surabaya untuk menunjang capaian kinerja.
5. Memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur dan berpedoman pada kepuasan klien.

Sasaran Kegiatan :

8. Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya

T.A. 2023

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
9.	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21	1	6	600 %

T.A. 2022

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
9.	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21	1	7	700 %

Berikut tabel data kasus tindak pidana narkoba BNN Kota Surabaya tahun 2023 :

NO	BULAN	2023									KET
		JML KASUS	BERKAS	P-21	JML TSK		BARANG BUKTI NARKOTIKA				
					L	P	SABU (gr)	EKSTASI (btr)	GANJA (gr)	NARKO LAIN	
1	JANUARI										
2	FEBRUARI										
3	MARET	2	2		2		10,58				BNNK SBY
4	APRIL			2							
5	MEI										
6	JUNI										
7	JULI	1	3		3				7,39		BNNK SBY
8	AGUSTUS	1	1		1			2			BNNK SBY
9	SEPTEMBER			3							
10	OKTOBER			1							
11	NOVEMBER										
12	DESEMBER										
	JUMLAH	4	6	6	6		10,58	2	7,39		

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa BNN Kota Surabaya selama tahun 2023 telah menangani sebanyak 6 (enam) laporan kasus narkoba. Penanganan enam kasus tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 4 (empat) laporan kasus narkoba dengan sebanyak 6 (enam) berkas perkara dan 6 (enam) tersangka telah terselesaikan (P-21) ditangani oleh BNN Kota Surabaya.

DEFINISI OPERASIONAL

Berkas perkara tindak pidana narkoba yang P-21 adalah berkas perkara penyidikan tersangka tindak pidana narkoba yang terjadi pada selain wilayah interdiksi yang dinyatakan lengkap oleh Jaksa Peneliti (P-21) untuk dilakukan penuntutan.

METODE PENGUKURAN

Pengukurannya menggunakan cara mengakumulasi jumlah capaian penyelesaian berkas perkara tersangka kasus tindak pidana narkoba yang terjadi pada selain wilayah interdiksi yang dinyatakan lengkap oleh Jaksa Peneliti (P-21) untuk dilakukan penuntutan dari unit Pusat dan Vertikal.

Berikut grafik perbandingan penyelesaian perkara tindak pidana berdasarkan jumlah tersangka :



Faktor Keberhasilan :

1. Manajemen alokasi anggaran yang terbatas disesuaikan dengan kemampuan anggota dalam mengungkap dan menyelesaikan kasus tindak pidana narkoba.
2. Komitmen dan kemauan dari anggota seksi pemberantasan untuk meningkatkan dan mengembangkan kapasitas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta menerapkan ilmu yang dimiliki sesuai dengan kondisi di lapangan.
3. Integritas yang dimiliki anggota yang sangat penting dalam pelaksanaan program P4GN khususnya di bidang pemberantasan.
4. Koordinasi yang baik antar instansi dalam penanganan perkara tindak pidana narkoba

Permasalahan :

1. Kota Surabaya merupakan ibu kota Provinsi Jawa Timur, yang berdampak jumlah peredaran gelap narkoba tinggi, namun dukungan anggaran, sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kondisi lapangan.
2. Pola peredaran jaringan yang senantiasa berubah dengan tidak mengenal perubahan waktu serta wilayah menyebabkan sulitnya menemukan dan memantau pola jaringan yang ada (adanya pola pemutusan jaringan).
3. Pengembangan sumber daya manusia di seksi pemberantasan belum maksimal sehingga diperlukan adanya Bimtek, pendidikan dan pelatihan dari pembina fungsi.
4. Upaya untuk melakukan penyelidikan dengan berbasis teknologi yang pada hakekatnya dapat mempermudah petugas dalam menemukan dan menganalisa jaringan belum dapat dilakukan karena kendala teknis dan prosedural serta minimnya pengetahuan petugas dalam pengaplikasian ilmu sebagaimana yang dimaksud.

Rekomendasi / Tindak Lanjut :

Tindak lanjut yang dilaksanakan agar capaian indikator Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan Prekursor narkoba yang (P-21) tercapai secara maksimal antara lain sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan penggunaan anggaran yang ada, sarana dan prasarana semaksimal mungkin dengan menerapkan prinsip transparan, akuntabel, efektif dan efisien.
2. Mengikutsertakan anggota seksi pemberantasan dalam pendidikan dan pelatihan yang dapat mendukung pelaksanaan tugas dan jabatannya.
3. Melaksanakan koordinasi secara berkala dengan pembina fungsi dalam hal ini Bidang Pemberantasan BNNP Jawa Timur dan Deputi Pemberantasan BNN RI dalam hal kegiatan berbasis informasi dan teknologi.
4. Memperluas jaringan informasi berbagai sumber guna mempelajari pola peredaran jaringan yang selalu berubah sehingga mempermudah penentuan dan kebijakan.
5. Melaksanakan upaya preventif penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba berupa pengawasan di ruang hiburan umum dan tempat rawan.
6. Melaksanakan kegiatan layanan asesmen terpadu sebagai bentuk pelaksanaan *Restorative justice*.

9. Sasaran Kegiatan :

Meningkatnya Proses Manajemen Kinerja yang Efektif dan Efisien

T.A. 2023

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
10	Nilai Kinerja Anggaran BNN Kota Surabaya	87	87,96	101,103 %

T.A. 2022

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
10	Nilai Kinerja Anggaran BNN Kota Surabaya	87	86.87	99.85 %

DEFINISI OPERASIONAL

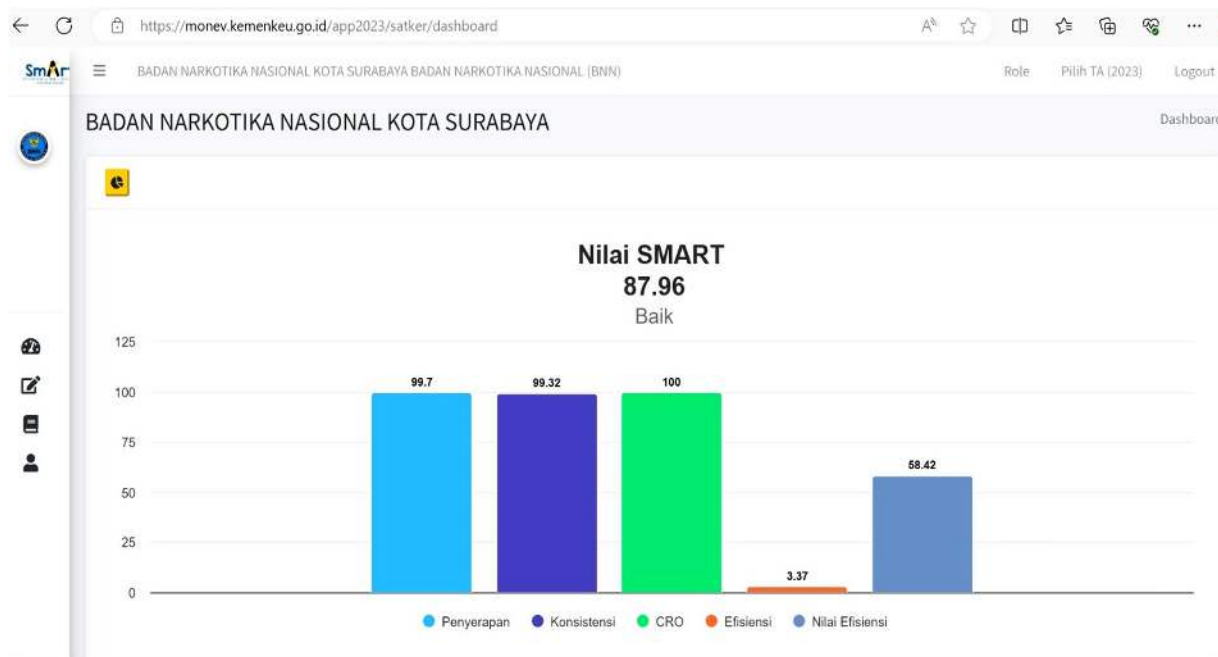
Nilai Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas evaluasi penggunaan anggaran Negara (APBN) sebagaimana tertuang dalam dokumen anggaran pada keseluruhan unit kerja di lingkungan BNN yang terdiri atas aspek implementasi, aspek manfaat dan aspek konteks.

METODE PENGUKURAN

Pengukuran Nilai Kinerja Anggaran (NKA) BNN diperoleh berdasarkan hasil evaluasi pada aspek implementasi, manfaat dan konteks terkait pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran BNN oleh Kementerian Keuangan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan 214 Tahun 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi yang dapat tersajikan dalam bentuk aplikasi SMART. Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAKL dan terinformasikan melalui sistem informasi kinerja anggaran yang dikelola Kementerian Keuangan.

Manajemen kinerja efektif dan efisien merupakan upaya untuk mendukung Good Governance, manajemen kinerja yang baik merupakan instrument untuk mendapatkan hasil-hasil yang lebih baik dari organisasi dengan didukung pengelolaan kinerja sesuai tujuan, sasaran dan standar yang ditetapkan mulai dari proses perencanaan hingga monitoring dan evaluasi. Sasaran kinerja terselenggaranya proses manajemen kinerja yang efektif dan efisien ini dituangkan dalam Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) antara lain sebagai berikut : Penyerapan anggaran, konsistensi antara perencanaan dengan implementasi, capaian keluaran dan efisiensi serta capaian manfaat.

Pada T.A. 2022, target indeks NKA BNN Kota Surabaya ditetapkan 87 Indeks, namun target tersebut tidak tercapai, hanya tercapai 86.87 Indeks. Hal tersebut menjadi dasar saat bargaining penetapan target T.A. 2023 dan ditetapkan pada **87,00 Indeks**. Capaian NKA BNN Kota Surabaya tahun 2023 adalah **87.96 Indeks** atau dengan capaian 101,10%. Capaian kinerja Nilai Kinerja Anggaran tahun 2023 tersebut dapat dilihat pada aplikasi SMART sebagaimana tabel berikut :



Adapun rincian perhitungan sebagai berikut :

Indikator	Bobot	Capaian Indikator	Capaian Tertimbang
Capaian Rincian Output	43.50%	100%	43.50%
Nilai Efisiensi	28.60%	58.42%	16.71%
Konsistensi Penyerapan Anggaran	18.20%	99.32%	18.08%
Penyerapan Anggaran	9.70%	99.7%	9.67%
CAPAIAN SMART DJA			87.96 %

Faktor Keberhasilan :

1. Anggaran yang tersedia dari APBN sangat dioptimalkan penganggarannya sehingga anggaran yang tidak terserap sangat sedikit
2. Dalam pelaksanaan kegiatan DIPA telah direncanakan sebaik mungkin dan dalam pelaksanaannya juga diupayakan dapat tepat waktu.
3. Kerjasama dan koordinasi yang baik dan masif antara pelaksana kegiatan dan pengelola keuangan sehingga berpengaruh pada ketepatan penyerapan anggaran.

10 Sasaran Kegiatan :

Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Keuangan yang Sesuai Prosedur

T.A. 2023

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
11	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kota Surabaya	92	98.69	107.27 %

T.A. 2022

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
11	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kota Surabaya	95	98,56	103,74 %

Capain Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kota Surabaya dapat ditunjukkan di aplikasi SPANINT MONEV PA KEMENKEU dimana realisasi IKPA BNN Kota Surabaya tahun 2023 adalah **98,69 Indeks** dari target **92 Indeks** atau dengan capaian adalah 107,27%. Capaian kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran tahun 2023 tersebut dapat dilihat pada aplikasi sebagaimana tabel berikut :



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM				
1	031	066	689601	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA SURABAYA	Nilai	100.00	91.92	98.83	0.00	0.00	99.95	100.00	100.00	78.95	80%	98.69
					Bobot	10	10	20	0	0	10	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	9.19	19.77	0.00	0.00	10.00	5.00	25.00			
					Nilai Aspek	95.96		99.59			100.00					

Faktor Keberhasilan :

Adapun faktor tercapainya kinerja Nilai indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kota Surabaya antara lain sebagai berikut :

1. Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan berupa layanan manajemen keuangan dan layanan perkantoran yang baik
2. Penyusunan dan pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN berupa layanan perencanaan dan layanan pemantauan dan evaluasi berjalan dengan baik
3. Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah tangga dan Pengelolaan sarana dan prasarana berupa layanan umum dan layanan perkantoran yang berkualitas
4. Kualitas pelaksanaan anggaran (Penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP dan TUP, dispensasi SPM) dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran (capaian output)

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pada awal tahun 2023 BNN Kota Surabaya memiliki anggaran / DIPA sebesar Rp. 1.959.255.000,-. Dalam perkembangannya mengalami penambahan anggaran yakni : tanggal 12 April 2023 mengalami penambahan target PNBPN berupa SKHPN (Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika) dari 20 orang atau Rp. 4.640.000,- bertambah 580 orang atau Rp. 134.560.000 sehingga anggaran BNN Kota Surabaya menjadi Rp. 2.093.815.000,- dengan DS:0860-2446-1813-5686, tanggal 14 September 2023 dapat tambahan anggaran dari BNN RI untuk dukungan kearsipan sebesar Rp. 20.000.000 dan dukungan kegiatan Asesmen Terpadu sebesar Rp. 8.575.000,- dengan DS:3534-3355-9408-1656, tanggal 01 Desember 2023 mengalami penambahan target PNBPN dari 600 orang atau Rp. 139.200.000,- bertambah 30 orang atau Rp. 6.960.000 dengan DS:0973-1600-0963-6332 sehingga anggaran BNN Kota Surabaya secara total menjadi Rp. 2.129.350.000,-

sebagaimana tertuang dalam Surat Pengesahan DIPA Petikan TA. 2023 nomor : SP DIPA-006.01.2.689601/2023 tanggal 30 November 2022 tentang DIPA TA. 2023 BNN Kota Surabaya yang telah disahkan revisinya pada tanggal 01 Desember dengan DS : DS:0973-1600-0963-6332. DIPA / Anggaran BNN Kota Surabaya tersebut terbagi dalam 2 (dua) program sebagaimana program BNN RI yakni :

1. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya

Adapun rincian anggaran BNN Kota Surabaya selama TA 2023 dapat dijelaskan sebagaimana tabel berikut :

(Dalam Ribuan)

No	Uraian	Anggaran Semula		Revisi Menjadi	
		Rp. Murni	PNBP	Rp. Murni	PNBP
	Anggaran Program P4GN	648.958	4.640	657.533	146.160
1	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi	80.000		80.000	
2	Kegiatan Penyelenggaraan Advokasi	100.000		100.000	
3	Kegiatan Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	211.695		211.695	
4	Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	10.265		10.265	
5	Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komp Masyarakat	107.430	4.640	107.430	146.160
6	Kegiatan Pascarehabilitasi Penyalah guna Narkoba	23.693		23.693	
7	Kegiatan Penyidikan jaringan kegiatan Peredaran gelap narkotika	45.000		45.000	
8	Kegiatan Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	70.875		79.450	
	Anggaran Dukmen dan Tugas Lainnya	1.305.657		1.325.657	
9	Kegiatan Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan	92.500		86.764	
10	Kegiatan Pengembangan Organisasi, Tata Laksana, dan Sumber Daya Manusia	20.400		20.400	
11	Kegiatan Penyusunan dan pengembangan Renprog dan Angg BNN Kota Surabaya	8.080		8.080	
12	Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, RT, Pengelolaan Sarpras	1.164.677		1.194.613	
13	Kegiatan Penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan	20.000		15.800	
	Anggaran BNN Kota Surabaya	1.959.255		2.129.350	

Realisasi anggaran BNN Kota Surabaya TA. 2023 sebesar Rp. 2.122.950.445,- atau sebesar 99,70% dari DIPA / anggaran sebesar Rp 2.129.350.000,- dan sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp. 6.399.555,- atau sebesar 0,30%. Sisa anggaran tersebut disebabkan antara lain : adanya efisiensi anggaran Swakelola, sisa anggaran biaya operasional perkantoran seperti telepon, langganan air maupun langganan listrik.

Berikut perbandingan DIPA / Anggaran dan Realisasi adalah sebagai berikut :

No	Tahun Anggaran	Pagu / Anggaran	Realisasi		Tidak Terserap	
			Jumlah (Rp)	%	Jumlah (Rp)	%
1	2021	Rp. 1.761.920.000,-	1.749.965.816	99,32	11.954.184	0,68
2	2022	Rp 2.007.535.000,-	1.999.066.529	99,58	8.468.471	0,42
3	2023	Rp 2.129.350.000,-	2.122.950.445	99,70	6.399.555	0,30

DIPA / anggaran BNN Kota Surabaya tersebut untuk mendukung tercapainya target Kinerja yang terdiri dari 10 Sasaran kegiatan dengan 11 Indikator Kinerja dan terbagi menjadi 2 (dua) program yakni :

1. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba terdapat 8 (delapan) sasaran kegiatan dengan 9 (Sembilan) indikator kinerja.
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya terdapat 2 (dua) sasaran kegiatan dengan 2 (dua) indikator kinerja.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya tahun 2023 merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, program, dan kegiatan BNN Kota Surabaya sebagai pelayanan publik. Secara umum dapat disimpulkan bahwa BNN Kota Surabaya telah dapat merealisasikan berbagai kegiatan dan kinerja melalui Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Pada T.A. 2023.

Target kinerja sebanyak 11 (sebelas) indikator kinerja sebagaimana yang telah disepakati pada Penetapan Kinerja yang terbagi dalam 2 (dua) program yakni program P4GN sebanyak 9 (sembilan) indikator dan program Dukungan Manajemen dan Tugas Lainnya sebanyak 2 (dua) indikator dapat terealisasi dengan baik dan tanpa hambatan yang berarti.

BNN Kota Surabaya akan meningkatkan koordinasi dan kerjasama yang baik kepada pejabat atasan, instansi terkait dan lembaga lainnya yang dapat mendukung peningkatan kualitas kinerja BNN Kota Surabaya. Diharapkan pada tahun berikutnya BNN Kota Surabaya mendapatkan dukungan anggaran yang cukup dan memadai serta adanya peningkatan Sumber Daya Manusia yang lebih handal dan profesional sehingga seluruh pelaksanaan dan target sasaran kegiatan di BNN Kota Surabaya dapat lebih baik dan maksimal dan lebih bermanfaat dibandingkan tahun sebelumnya.

Anggaran yang diterima oleh BNN Kota Surabaya sebesar Rp. 2.129.350.000,- (dua milyar seratus duapuluh Sembilan juta tiga ratus limapuluh ribu rupiah) terealisasi sebesar Rp. 2.122.950.445 (dua milyar seratus duapuluh dua juta Sembilan ratus limapuluh ribu empat ratus empat puluh lima rupiah) atau sebesar **99.70 %**. Yang tidak terserap sebesar Rp. 6.399.555 (enam juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus limapuluh lima rupiah) atau sebesar 0,30%.

B. SARAN

Guna meningkatkan kinerja BNN Kota Surabaya, dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja serta pencapaian sasaran kegiatan, saran-saran yang dapat disampaikan sebagai masukan antara lain sebagai berikut :

1. Perlu adanya penambahan personil yang permanen untuk mendukung operasional kegiatan dalam rangka pelaksanaan kegiatan P4GN.
2. Meningkatkan bentuk-bentuk pengawasan/monitoring yang efektif terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan, baik internal maupun dengan melibatkan pihak-pihak terkait, dengan muatan pembinaan, dan bukan evaluasi saja.
3. Lebih memaksimalkan peran media cetak, media online/media sosial dan media luar ruang sebagai sarana penyebaran informasi P4GN.
4. Dalam meningkatkan peranserta masyarakat perlu diadakan upaya seperti pemberian apresiasi dan pembinaan yang berkelanjutan kepada penggiat anti Narkoba
5. Dengan pelaksanaan program rehabilitasi yang berjangka dan berkelanjutan, sebaiknya lebih dipersiapkan bahan seperti regulasi, perjanjian kerjasama, petunjuk teknis, pengadaan barang / jasa sehingga pelaksanaan program rehabilitasi dapat dilaksanakan sejak awal tahun.
6. Optimalisasi IT dan mengupgrade peralatan intelijen sesuai dengan perkembangan teknologi dan semakin menjalin kerjasama dengan para penegak hukum termasuk sharing informasi.
7. Perlu disampaikan bahwa pada tahun anggaran 2024 BNN Kota Surabaya sangat membutuhkan tambahan anggaran khususnya dalam hal perawatan gedung kantor BNN Kota Surabaya dan operasional lainnya.

Lampiran - Lampiran



**PERJANJIAN KINERJA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA SURABAYA
TAHUN 2023**

Dalam rangka manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RONI BAHTIAR ARIEF
Jabatan : KEPALA BNN KOTA SURABAYA

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. MOHAMAD ARIS PURNOMO
Jabatan : KEPALA BNN PROVINSI JAWA TIMUR

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Magelang, 06 Februari 2023

Pihak Kedua,
**KEPALA BNN PROVINSI
JAWA TIMUR**

Pihak Pertama,
KEPALA BNN KOTA SURABAYA


Drs. MOHAMAD ARIS PURNOMO


RONI BAHTIAR ARIEF

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA SURABAYA**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkotika	53 Indeks
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkotika	78.69 Indeks
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3.25 Indeks
4	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika	Persentase penyalah guna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	62 %
5	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 Orang
6	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	5 Lembaga
7	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yang operasional	2 Unit
8	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika	Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi Pada Fasilitas Rehabilitasi BNN	3.20 Indeks
9	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	1 Berkas Perkara
10	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran	87 Indeks
11	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	92 Indeks

1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Rp.80.000.000
2. Kegiatan Penyelenggaraan Advokasi	Rp.100.000.000
3. Kegiatan Pemberdayaan Peran serta Masyarakat	Rp.211.695.000
4. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Rp.10.265.000
5. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Rp.112.070.000
6. Kegiatan Pascarehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba	Rp.23.693.000
7. Kegiatan Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika	Rp.45.000.000
8. Kegiatan Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Rp.70.875.000
9. Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Rp.92.500.000
10. Kegiatan Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	Rp.20.400.000
11. Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Rp.8.080.000
12. Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	Rp.1.164.677.000
13. Kegiatan Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	Rp.20.000.000

Magelang, 06 Februari 2023

Pihak Kedua,
**KEPALA BNN PROVINSI
 JAWA TIMUR**

Drs. MOHAMAD ARIS PURNOMO

Pihak Pertama,
KEPALA BNN KOTA SURABAYA

RONI BAHTIAR ARIEF



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur
Telepon : (62-21) 80871566, 80871567
Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593
e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/4732/XII/DE/PC.00/2023/BNN
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Hasil Penghitungan Indeks
Ketahanan Diri Remaja Terhadap
Penyalahgunaan Narkoba (Dektari)
Tahun 2023

Jakarta, 27 Desember 2023

Kepada

Yth. **1. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi**

2. Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota

di
Tempat

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- e. Surat Kepala BNN Nomor : B/3931/X/DE/PC.00/2023/BNN tanggal 25 Oktober 2023 perihal Target Capaian Indeks Ketahanan Diri Remaja;
- f. Surat Kepala BNN Nomor : B/4252/XI/DE/PC.00.00/2023/BNN tanggal 15 November 2023 perihal Pengisian Evaluasi Kegiatan di Aplikasi Dektari.
- g. Program kerja Deputi Bidang Pencegahan T.A. 2023.

/2. Sehubungan...

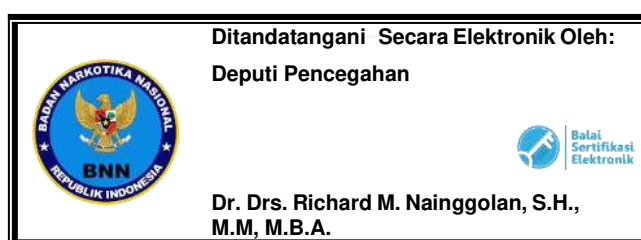
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, diinformasikan kepada Kepala BNN PROVINSI dan BNNK hasil penghitungan Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Dektari) yang merupakan pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Informasi dan Edukasi Tahun 2023 sesuai Peraturan Kepala BNN Nomor 6 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020-2024, dengan hasil sebagai berikut :
- Penghitungan Dektari menggunakan aplikasi mobile Dektari Aja terhadap 66.951 remaja usia 12 – 21 tahun (pelajar atau mahasiswa) yang telah menerima penyuluhan/sosialisasi oleh BNN PROVINSI dan BNNK;
 - Hasil angka penghitungan Dektari Tahun 2023 adalah **52,70 (Tinggi)** dengan target **53,00 (Tinggi)**, dengan klasifikasi hasil capaian wilayah :
 - Kategori Sangat Tinggi ($\geq 53,71$) sebanyak 111 Satker
 - Kategori Tinggi (49,74 – 53,50) sebanyak 71 Satker
 - Kategori Rendah (45,98 – 49,73) sebanyak 15 Satker
 - Kategori Sangat Rendah ($\leq 45,97$) sebanyak 10 Satker
 - Hasil Penghitungan Terlampir.
3. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional



Tembusan :

1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. Inspektur Utama BNN.



**REKAPITULASI PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN DIRI REMAJA
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARI) T.A. 2023**

NAMA SAKTER	NILAI DEKTARI	KATEGORI
BNN PROVINSI ACEH	50.06	Tinggi
BNN KABUPATEN ACEH SELATAN	49.07	Rendah
BNN KABUPATEN GAYO LUES	54.00	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN PIDIE JAYA	56.12	Sangat Tinggi
BNN KOTA SABANG	52.63	Tinggi
BNN KOTA LHOKSEUMAWE	49.40	Rendah
BNN KOTA LANGSA	52.56	Tinggi
BNN KABUPATEN BIREUEN	51.26	Tinggi
BNN KABUPATEN ACEH TAMIANG	50.13	Tinggi
BNN KABUPATEN PIDIE	55.87	Sangat Tinggi
BNN KOTA BANDA ACEH	55.45	Sangat Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI PROVINSI ACEH	52.41	Tinggi
BNN PROVINSI SUMATERA UTARA	55.56	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN KARO	54.18	Sangat Tinggi
BNN KOTA BINJAI	53.93	Sangat Tinggi
BNN KOTA TANJUNG BALAI	54.47	Sangat Tinggi
BNN KOTA GUNUNGSITOLI	51.57	Tinggi
BNN KABUPATEN DELI SERDANG	53.99	Sangat Tinggi
BNN KOTA PEMATANG SIANTAR	53.78	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN LANGKAT	52.62	Tinggi
BNN KABUPATEN ASAHAN	54.66	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN MANDAILING NATAL	53.78	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN TAPANULI SELATAN	54.49	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI	55.01	Sangat Tinggi
BNN KOTA TEBING TINGGI	54.46	Sangat Tinggi

LAMPIRAN
SURAT KEPALA BNN
NOMOR : B/4732/XII/DE/PC.00/2023/BNN
TANGGAL : 27 Desember 2023

NAMA SAKTER	NILAI DEKTARI	KATEGORI
BNN KABUPATEN SIMALUNGUN	55.74	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA	54.42	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN BATU BARA	52.41	Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI PROVINSI SUMATERA UTARA	54.07	Sangat Tinggi
BNN PROVINSI SUMATERA BARAT	48.41	Rendah
BNN KOTA SAWAHLUNTO	55.36	Sangat Tinggi
BNN KOTA PAYAKUMBUH	55.36	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN SOLOK	54.13	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN PASAMAN BARAT	49.36	Rendah
INDEKS KETAHANAN DIRI PROVINSI SUMATERA BARAT	52.52	Tinggi
BNN PROVINSI RIAU	54.17	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI	55.36	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN PELALAWAN	53.93	Sangat Tinggi
BNN KOTA PEKANBARU	53.53	Sangat Tinggi
BNN KOTA DUMAI	52.37	Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI PROVINSI RIAU	53.87	Sangat Tinggi
BNN PROVINSI JAMBI	41.57	Sangat Rendah
BNN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	50.77	Tinggi
BNN KOTA JAMBI	53.96	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN BATANGHARI	52.94	Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI PROVINSI JAMBI	49.81	Tinggi
BNN PROVINSI SUMATERA SELATAN	50.75	Tinggi
BNN KABUPATEN OGAN ILIR	50.07	Tinggi
BNN KOTA PAGARALAM	55.24	Sangat Tinggi
BNN KOTA LUBUKLINGGAU	52.11	Tinggi
BNN KABUPATEN EMPAT LAWANG	53.75	Sangat Tinggi
BNN KOTA PRABUMULIH	53.96	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN MUARA ENIM	55.38	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN MUSI RAWAS	54.24	Sangat Tinggi

LAMPIRAN
SURAT KEPALA BNN
NOMOR : B/4732/XII/DE/PC.00/2023/BNN
TANGGAL : 27 Desember 2023

NAMA SAKTER	NILAI DEKTARI	KATEGORI
BNN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR	53.19	Tinggi
BNN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR	52.65	Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI SUMATERA SELATAN	53.13	Tinggi
BNN PROVINSI LAMPUNG	55.49	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN TANGGAMUS	55.45	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	55.51	Sangat Tinggi
BNN KOTA METRO	47.68	Rendah
BNN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR	45.02	Sangat Rendah
BNN KABUPATEN WAY KANAN	48.53	Rendah
INDEKS KETAHANAN DIRI LAMPUNG	51.28	Tinggi
BNN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	50.53	Tinggi
BNN KABUPATEN BANGKA	52.18	Tinggi
BNN KOTA PANGKAL PINANG	54.60	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN BELITUNG	55.19	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN BANGKA SELATAN	54.79	Sangat Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI BANGKA BELITUNG	53.46	Tinggi
BNN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	53.23	Tinggi
BNN KABUPATEN KARIMUN	55.88	Sangat Tinggi
BNN KOTA BATAM	52.99	Tinggi
BNN KOTA TANJUNG PINANG	49.77	Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI KEPULAUAN RIAU	52.97	Tinggi
BNN PROVINSI BENGKULU	54.05	Sangat Tinggi
BNN KOTA BENGKULU	53.46	Tinggi
BNN KABUPATEN BENGKULU SELATAN	53.80	Sangat Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI BENGKULU	53.77	Sangat Tinggi
BNN PROVINSI DKI JAKARTA	52.68	Tinggi
BNN KOTA JAKARTA SELATAN	44.28	Sangat Rendah
BNN KOTA JAKARTA TIMUR	52.22	Tinggi
BNN KOTA JAKARTA UTARA	49.01	Rendah
INDEKS KETAHANAN DIRI DKI	49.55	Rendah

LAMPIRAN
SURAT KEPALA BNN
NOMOR : B/4732/XII/DE/PC.00/2023/BNN
TANGGAL : 27 Desember 2023

NAMA SAKTER	NILAI DEKTARI	KATEGORI
JAKARTA		
BNN PROVINSI BANTEN	40.71	Sangat Rendah
BNN KOTA TANGERANG SELATAN	50.85	Tinggi
BNN KOTA CILEGON	54.92	Sangat Tinggi
BNN KOTA TANGERANG	55.37	Sangat Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI BANTEN	50.46	Tinggi
BNN PROVINSI JAWA BARAT	41.19	Sangat Rendah
BNN KABUPATEN BOGOR	55.67	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN CIANJUR	55.31	Sangat Tinggi
BNN KOTA BANDUNG	52.72	Tinggi
BNN KOTA CIREBON	54.10	Sangat Tinggi
BNN KOTA CIMAHI	56.25	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN SUKABUMI	44.65	Sangat Rendah
BNN KABUPATEN GARUT	55.34	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN KUNINGAN	54.37	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN CIAMIS	52.53	Tinggi
BNN KOTA DEPOK	52.18	Tinggi
BNN KABUPATEN KARAWANG	52.99	Tinggi
BNN KABUPATEN BANDUNG BARAT	54.63	Sangat Tinggi
BNN KOTA TASIKMALAYA	52.16	Tinggi
BNN KABUPATEN SUMEDANG	54.42	Sangat Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI JAWA BARAT	52.57	Tinggi
BNN PROVINSI JAWA TENGAH	51.75	Tinggi
BNN KABUPATEN TEMANGGUNG	52.67	Tinggi
BNN KOTA TEGAL	56.58	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN BANYUMAS	55.75	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN CILACAP	54.98	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN KENDAL	55.78	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN BATANG	48.43	Rendah
BNN KABUPATEN PURBALINGGA	55.67	Sangat Tinggi

LAMPIRAN
SURAT KEPALA BNN
NOMOR : B/4732/XII/DE/PC.00/2023/BNN
TANGGAL : 27 Desember 2023

NAMA SAKTER	NILAI DEKTARI	KATEGORI
BNN KABUPATEN MAGELANG	52.69	Tinggi
BNN KOTA SURAKARTA	50.13	Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI JAWA TENGAH	53.44	Tinggi
BNN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	55.41	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN SLEMAN	57.61	Sangat Tinggi
BNN KOTA YOGYAKARTA	54.63	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN BANTUL	54.37	Sangat Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI DIY	55.51	Sangat Tinggi
BNN PROVINSI JAWA TIMUR	52.97	Tinggi
BNN KABUPATEN SUMENEP	55.32	Sangat Tinggi
BNN KOTA MOJOKERTO	53.95	Sangat Tinggi
BNN KOTA MALANG	55.77	Sangat Tinggi
BNN KOTA BATU	55.55	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN TULUNGAGUNG	55.59	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN NGANJUK	52.39	Tinggi
BNN KABUPATEN SIDOARJO	54.54	Sangat Tinggi
BNN KOTA SURABAYA	53.88	Sangat Tinggi
BNN KOTA KEDIRI	55.67	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN MALANG	55.86	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN GRESIK	53.62	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN TRENGGALEK	51.55	Tinggi
BNN KABUPATEN LUMAJANG	54.20	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN BLITAR	46.78	Rendah
BNN KABUPATEN KEDIRI	53.38	Tinggi
BNN KABUPATEN PASURUAN	55.10	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN TUBAN	52.79	Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI JAWA TIMUR	53.83	Sangat Tinggi
BNN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	55.62	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN BENGKAYANG	53.57	Sangat Tinggi

LAMPIRAN
SURAT KEPALA BNN
NOMOR : B/4732/XII/DE/PC.00/2023/BNN
TANGGAL : 27 Desember 2023

NAMA SAKTER	NILAI DEKTARI	KATEGORI
BNN KABUPATEN SINTANG	53.86	Sangat Tinggi
BNN KOTA PONTIANAK	52.83	Tinggi
BNN KOTA SINGKAWANG	55.25	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN SANGGAU	52.72	Tinggi
BNN KABUPATEN MEMPAWAH	53.00	Tinggi
BNN KABUPATEN KUBU RAYA	52.08	Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI KALIMANTAN BARAT	53.61	Sangat Tinggi
BNN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	51.31	Tinggi
BNN KOTA PALANGKARAYA	55.75	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN KOTA WARINGIN BARAT	54.13	Sangat Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI KALIMANTAN TENGAH	53.73	Sangat Tinggi
BNN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	54.50	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN BARITO KUALA	55.52	Sangat Tinggi
BNN KOTA BANJARMASIN	52.29	Tinggi
BNN KOTA BANJAR BARU	55.31	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN BALANGAN	57.21	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	54.08	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN TANAH LAUT	57.43	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN TABALONG	52.92	Tinggi
BNN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA	54.84	Sangat Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI KALIMANTAN SELATAN	54.90	Sangat Tinggi
BNN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	53.24	Tinggi
BNN KOTA BALIKPAPAN	52.75	Tinggi
BNN KOTA SAMARINDA	56.56	Sangat Tinggi
BNN KOTA BONTANG	53.75	Sangat Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI KALIMANTAN TIMUR	54.08	Sangat Tinggi
BNN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	51.55	Tinggi
BNN KOTA TARAKAN	48.12	Rendah
BNN KOTA NUNUKAN	55.45	Sangat Tinggi

LAMPIRAN
 SURAT KEPALA BNN
 NOMOR : B/4732/XII/DE/PC.00/2023/BNN
 TANGGAL : 27 Desember 2023

NAMA SAKTER	NILAI DEKTARI	KATEGORI
INDEKS KETAHANAN DIRI KALIMANTAN UTARA	51.71	Tinggi
BNN PROVINSI SULAWESI UTARA	53.49	Tinggi
BNN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	47.07	Rendah
BNN KOTA BITUNG	48.72	Rendah
BNN KOTA MANADO	53.67	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE	54.59	Sangat Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI SULAWESI UTARA	51.51	Tinggi
BNN PROVINSI SULAWESI TENGAH	44.04	Sangat Rendah
BNN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN	53.63	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN MOROWALI	52.34	Tinggi
BNN KOTA PALU	47.49	Rendah
BNN KABUPATEN DONGGALA	53.19	Tinggi
BNN KABUPATEN POSO	52.59	Tinggi
BNN KABUPATEN TOJO UNA UNA	52.68	Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI SULAWESI TENGAH	50.85	Tinggi
BNN PROVINSI SULAWESI SELATAN	55.44	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN TANA TORAJA	52.66	Tinggi
BNN KABUPATEN BONE	54.05	Sangat Tinggi
BNN KOTA PALOPO	56.79	Sangat Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI SULAWESI SELATAN	56.79	Sangat Tinggi
BNN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	56.65	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN MUNA	53.68	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN KOLAKA	53.66	Sangat Tinggi
BNN KOTA KENDARI	50.76	Tinggi
BNN KOTA BAU-BAU	53.23	Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI SULAWESI TENGGARA	53.60	Sangat Tinggi
BNN PROVINSI SULAWESI BARAT	54.78	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN POLEWALI MANDAR	55.44	Sangat Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI SULAWESI BARAT	55.11	Sangat Tinggi

LAMPIRAN
 SURAT KEPALA BNN
 NOMOR : B/4732/XII/DE/PC.00/2023/BNN
 TANGGAL : 27 Desember 2023



NAMA SAKTER	NILAI DEKTARI	KATEGORI
BNN PROVINSI MALUKU	52.19	Tinggi
BNN KABUPATEN BURU SELATAN	46.93	Rendah
BNN KOTA TUAL	54.89	Sangat Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI MALUKU	51.34	Tinggi
BNN PROVINSI MALUKU UTARA	45.68	Sangat Rendah
BNN KABUPATEN PULAU MOROTAI	52.76	Tinggi
BNN KOTA TIDORE KEPULAUAN	56.40	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN HALMAHERA UTARA	53.42	Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI MALUKU UTARA	52.06	Tinggi
BNN PROVINSI BALI	55.71	Sangat Tinggi
BNN KOTA DENPASAR	56.04	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN BADUNG	56.57	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN GIANYAR	52.54	Tinggi
BNN KABUPATEN BULELENG	55.58	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN KLUNGKUNG	57.67	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN KARANGASEM	57.00	Sangat Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI BALI	55.87	Sangat Tinggi
BNN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	54.36	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN BIMA	50.28	Tinggi
BNN KOTA MATARAM	58.17	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN SUMBAWA BARAT	53.50	Tinggi
BNN KABUPATEN SUMBAWA	51.88	Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI NUSA TENGGARA BARAT	53.64	Sangat Tinggi
BNN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	51.54	Tinggi
BNN KABUPATEN BELU	56.20	Sangat Tinggi
BNN KOTA KUPANG	53.65	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN ROTE NDAO	51.24	Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI NUSA TENGGARA TIMUR	53.16	Tinggi
BNN PROVINSI GORONTALO	52.89	Tinggi

LAMPIRAN
SURAT KEPALA BNN
NOMOR : B/4732/XII/DE/PC.00/2023/BNN
TANGGAL : 27 Desember 2023

NAMA SAKTER	NILAI DEKTARI	KATEGORI
BNN KABUPATEN BOALEMO	49.34	Rendah
BNN KOTA GORONTALO	53.93	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN BONE BOLANGO	52.84	Tinggi
BNN KABUPATEN GORONTALO	53.64	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN GORONTALO UTARA	52.76	Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI GORONTALO	52.57	Tinggi
BNN PROVINSI PAPUA	52.63	Tinggi
BNN KABUPATEN MIMIKA	52.88	Tinggi
BNN KABUPATEN JAYAPURA	43.47	Sangat Rendah
INDEKS KETAHANAN DIRI PAPUA	49.66	Rendah
BNN PROVINSI PAPUA BARAT	45.00	Sangat Rendah
INDEKS KETAHANAN DIRI PAPUA BARAT	45.00	Sangat Rendah
NILAI RATA-RATA INDEKS KETAHANAN DIRI NASIONAL	52.70	Tinggi

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional



	Ditandatangani Secara Elektronik Oleh: Deputi Pencegahan	
	Dr. Drs. Richard M. Nainggolan, S.H., M.M, M.B.A.	



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/4729/XII/DE/PC.01/2023/BNN
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Hasil Penghitungan Indeks Ketahanan
Keluarga terhadap Penyalahgunaan
Narkoba (Dektara) Tahun 2023

Jakarta, 27 Desember 2023

Kepada

Yth. **1. Para Kepala BNN Provinsi**
2. Para Kepala BNN Kabupaten/Kota

di

Tempat

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- d. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional 2020-2024;
- e. Program Kerja Deputi Bidang Pencegahan BNN Tahun Anggaran 2023.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Kepala BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota hasil penghitungan Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Dektara) yang merupakan pencapaian Indikator Kinerja Direktorat Advokasi Tahun 2023 sesuai Peraturan Kepala BNN RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional 2020-2024, dengan hasil sebagai berikut :

- a. Penghitungan Indeks Ketahanan Keluarga Anti Narkoba menggunakan aplikasi Dektara yaitu setiap BNNP dan BNNKab/Kota memilih Desa/Kelurahan yang akan menjadi tempat pelaksanaan kegiatan Intervensi Ketahanan Keluarga Anti Narkoba, kemudian mengambil sampel dari keluarga yang telah di intervensi (keluarga yang terdiri dari anak dan orangtua). Pengukuran ini dilakukan secara nasional di 34 Provinsi dan data yang dikumpulkan di setiap Provinsi berasal dari Kabupaten/Kota yang sudah ada BNN Kabupaten/Kota yaitu 173 Kabupaten/Kota.

/b. Hasil...

b. Hasil angka penghitungan Dektara Tahun 2023 adalah 85,389 (Kategori tinggi) dengan target angka 78,69 (Kategori Tinggi), Adapun klasifikasi capaian wilayah sebagai berikut :

- 1) Kategori sangat tinggi (88,31 – 100,00) sebanyak 61 Satuan Kerja
- 2) Kategori tinggi (76,61 – 88,30) sebanyak 130 Satuan Kerja
- 3) Kategori rendah (65,00 – 76,60) sebanyak 15 Satuan Kerja
- 4) Kategori sangat rendah (25,00 – 64,99) sebanyak 0 Satuan Kerja
- 5) Terdapat 1 Satuan Kerja yang tidak selesai mengerjakan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba

Daftar hasil penghitungan terlampir.

3. Berdasarkan dengan butir satu dan dua di atas, diucapkan terima kasih atas partisipasi jajaran Pencegahan dalam Proses Penghitungan Dektara Tahun 2023 dan semoga dapat terus meningkatkan hasil capaian kinerja wilayah pada tahun berikutnya.

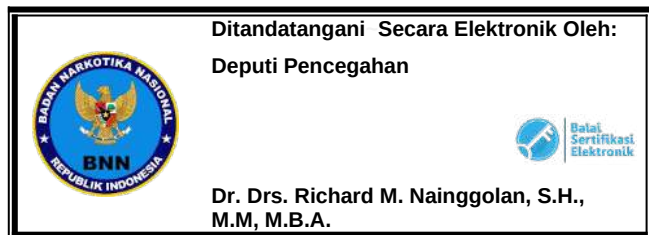
4. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. ~~Inspektur Utama BNN.~~

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional



**HASIL PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN KELUARGA
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARA) TAHUN 2023**

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
1	BNNP NANGGROE ACEH DARUSSALAM	73,482	RENDAH
2	BNN KABUPATEN ACEH SELATAN	90,893	SANGAT TINGGI
3	BNN KABUPATEN GAYO LUES	76,429	RENDAH
4	BNN KABUPATEN PIDIE JAYA	82,946	TINGGI
5	BNN KOTA SABANG	92,857	SANGAT TINGGI
6	BNN KOTA LHOKSEUMAWE	74,911	RENDAH
7	BNN KOTA LANGSA	72,500	RENDAH
8	BNN KABUPATEN BIREUEN	95,000	SANGAT TINGGI
9	BNN KABUPATEN ACEH TAMIANG	86,607	TINGGI
10	BNN KABUPATEN PIDIE	74,107	RENDAH
11	BNN KOTA BANDA ACEH	87,232	TINGGI
12	BNNP SUMATERA UTARA	81,875	TINGGI
13	BNN KABUPATEN KARO	86,339	TINGGI
14	BNN KOTA BINJAI	87,500	TINGGI
15	BNN KOTA TANJUNG BALAI	79,911	TINGGI
16	BNN KOTA GUNUNGSITOLI	81,339	TINGGI
17	BNN KABUPATEN DELI SERDANG	95,089	SANGAT TINGGI
18	BNN KOTA PEMATANG SIANTAR	83,661	TINGGI
19	BNN KABUPATEN LANGKAT	77,143	TINGGI
20	BNN KABUPATEN ASAHAN	84,554	TINGGI
21	BNN KABUPATEN MANDAILING NATAL	87,589	TINGGI
22	BNN KABUPATEN TAPANULI SELATAN	93,750	SANGAT TINGGI
23	BNN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI	89,732	SANGAT TINGGI

LAMPIRAN I
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4729/XII/DE/PC.01/2023/BNN
TANGGAL : 27 Desember 2023

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
24	BNN KOTA TEBING TINGGI	73,482	RENDAH
25	BNN KABUPATEN SIMALUNGUN	86,071	TINGGI
26	BNN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA	76,875	TINGGI
27	BNN KABUPATEN BATU BARA	85,000	TINGGI
28	BNNP SUMATERA BARAT	90,089	SANGAT TINGGI
29	BNN KOTA SAWAHLUNTO	86,696	TINGGI
30	BNN KOTA PAYAKUMBUH	94,911	SANGAT TINGGI
31	BNN KABUPATEN SOLOK	88,036	TINGGI
32	BNN KABUPATEN PASAMAN BARAT	80,089	TINGGI
33	BNNP RIAU	91,429	SANGAT TINGGI
34	BNN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI	93,304	SANGAT TINGGI
35	BNN KABUPATEN PELALAWAN	70,804	RENDAH
36	BNN KOTA PEKANBARU	85,625	TINGGI
37	BNN KOTA DUMAI	76,696	TINGGI
38	BNNP JAMBI	87,232	TINGGI
39	BNN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	81,161	TINGGI
40	BNN KOTA JAMBI	92,232	SANGAT TINGGI
41	BNN KABUPATEN BATANGHARI	83,125	TINGGI
42	BNNP LAMPUNG	84,375	TINGGI
43	BNN KABUPATEN TANGGAMUS	86,875	TINGGI
44	BNN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	79,464	TINGGI
45	BNN KOTA METRO	83,036	TINGGI
46	BNN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR	86,250	TINGGI
47	BNN KABUPATEN WAY KANAN	0	0
48	BNNP KEPULAUAN RIAU	82,589	TINGGI

LAMPIRAN I
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4729/XII/DE/PC.01/2023/BNN
TANGGAL : 27 Desember 2023

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
49	BNN KABUPATEN KARIMUN	91,518	SANGAT TINGGI
50	BNN KOTA BATAM	86,696	TINGGI
51	BNN KOTA TANJUNG PINANG	89,196	SANGAT TINGGI
52	BNNP SUMATERA SELATAN	87,232	TINGGI
53	BNN KABUPATEN OGAN ILIR	82,946	TINGGI
54	BNN KOTA PAGARALAM	81,339	TINGGI
55	BNN KOTA LUBUKLINGGAU	71,875	RENDAH
56	BNN KABUPATEN EMPAT LAWANG	79,286	TINGGI
57	BNN KOTA PRABUMULIH	86,786	TINGGI
58	BNN KABUPATEN MUARA ENIM	84,643	TINGGI
59	BNN KABUPATEN MUSI RAWAS	83,125	TINGGI
60	BNN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR	89,018	SANGAT TINGGI
61	BNN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR	90,982	SANGAT TINGGI
62	BNNP KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	75,268	RENDAH
63	BNN KABUPATEN BANGKA	89,375	SANGAT TINGGI
64	BNN KOTA PANGKAL PINANG	85,357	TINGGI
65	BNN KABUPATEN BELITUNG	82,857	TINGGI
66	BNN KABUPATEN BANGKA SELATAN	75,982	RENDAH
67	BNNP BENGKULU	91,786	SANGAT TINGGI
68	BNN KOTA BENGKULU	84,554	TINGGI
69	BNN KABUPATEN BENGKULU SELATAN	85,357	TINGGI
70	BNNP DKI JAKARTA	87,500	TINGGI
71	BNN KOTA JAKARTA SELATAN	83,482	TINGGI
72	BNN KOTA JAKARTA TIMUR	87,500	TINGGI
73	BNN KOTA JAKARTA UTARA	78,036	TINGGI

LAMPIRAN I
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4729/XII/DE/PC.01/2023/BNN
TANGGAL : 27 Desember 2023

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
74	BNNP BANTEN	85,089	TINGGI
75	BNN KOTA TANGERANG SELATAN	86,339	TINGGI
76	BNN KOTA CILEGON	79,554	TINGGI
77	BNN KOTA TANGERANG	87,232	TINGGI
78	BNNP JAWA BARAT	77,054	TINGGI
79	BNN KABUPATEN BOGOR	88,304	TINGGI
80	BNN KABUPATEN CIANJUR	85,625	TINGGI
81	BNN KOTA BANDUNG	87,321	TINGGI
82	BNN KOTA CIREBON	95,714	SANGAT TINGGI
83	BNN KOTA CIMAHI	91,250	SANGAT TINGGI
84	BNN KABUPATEN SUKABUMI	84,643	TINGGI
85	BNN KABUPATEN GARUT	88,393	SANGAT TINGGI
86	BNN KABUPATEN KUNINGAN	86,339	TINGGI
87	BNN KABUPATEN CIAMIS	78,125	TINGGI
88	BNN KOTA DEPOK	85,804	TINGGI
89	BNN KABUPATEN KARAWANG	82,321	TINGGI
90	BNN KABUPATEN BANDUNG BARAT	88,571	SANGAT TINGGI
91	BNN KOTA TASIKMALAYA	81,875	TINGGI
92	BNN KABUPATEN SUMEDANG	82,054	TINGGI
93	BNNP JAWA TENGAH	86,071	TINGGI
94	BNN KABUPATEN TEMANGGUNG	87,232	TINGGI
95	BNN KOTA TEGAL	84,643	TINGGI
96	BNN KABUPATEN BANYUMAS	86,786	TINGGI
97	BNN KABUPATEN CILACAP	85,446	TINGGI
98	BNN KABUPATEN KENDAL	90,000	SANGAT TINGGI

LAMPIRAN I
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4729/XII/DE/PC.01/2023/BNN
TANGGAL : 27 Desember 2023

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
99	BNN KABUPATEN BATANG	94,464	SANGAT TINGGI
100	BNN KABUPATEN PURBALINGGA	86,161	TINGGI
101	BNN KABUPATEN MAGELANG	85,446	TINGGI
102	BNN KOTA SURAKARTA	91,696	SANGAT TINGGI
103	BNNP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	90,893	SANGAT TINGGI
104	BNN KABUPATEN SLEMAN	87,946	TINGGI
105	BNN KOTA YOGYAKARTA	89,464	SANGAT TINGGI
106	BNN KABUPATEN BANTUL	80,268	TINGGI
107	BNNP JAWA TIMUR	79,107	TINGGI
108	BNN KABUPATEN SUMENEP	84,732	TINGGI
109	BNN KOTA MOJOKERTO	81,161	TINGGI
110	BNN KOTA MALANG	86,429	TINGGI
111	BNN KOTA BATU	94,018	SANGAT TINGGI
112	BNN KABUPATEN TULUNGAGUNG	85,625	TINGGI
113	BNN KABUPATEN NGANJUK	87,143	TINGGI
114	BNN KABUPATEN SIDOARJO	81,071	TINGGI
115	BNN KOTA SURABAYA	82,411	TINGGI
116	BNN KOTA KEDIRI	89,911	SANGAT TINGGI
117	BNN KABUPATEN MALANG	93,125	SANGAT TINGGI
118	BNN KABUPATEN GRESIK	93,750	SANGAT TINGGI
119	BNN KABUPATEN TRENGGALEK	94,107	SANGAT TINGGI
120	BNN KABUPATEN LUMAJANG	93,839	SANGAT TINGGI
121	BNN KABUPATEN BLITAR	85,893	TINGGI
122	BNN KABUPATEN KEDIRI	84,018	TINGGI
123	BNN KABUPATEN PASURUAN	90,268	SANGAT TINGGI

LAMPIRAN I
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4729/XII/DE/PC.01/2023/BNN
TANGGAL : 27 Desember 2023

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
124	BNN KABUPATEN TUBAN	87,768	TINGGI
125	BNNP KALIMANTAN BARAT	88,393	SANGAT TINGGI
126	BNN KABUPATEN BENGKAYANG	77,679	TINGGI
127	BNN KABUPATEN SINTANG	84,375	TINGGI
128	BNN KOTA PONTIANAK	78,482	TINGGI
129	BNN KOTA SINGKAWANG	86,161	TINGGI
130	BNN KABUPATEN SANGGAU	86,607	TINGGI
131	BNN KABUPATEN MEMPAWAH	83,125	TINGGI
132	BNN KABUPATEN KUBU RAYA	85,625	TINGGI
133	BNNP KALIMANTAN TENGAH	78,571	TINGGI
134	BNN KOTA PALANGKARAYA	93,125	SANGAT TINGGI
135	BNN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	93,036	SANGAT TINGGI
136	BNNP KALIMANTAN SELATAN	85,982	TINGGI
137	BNN KABUPATEN BARITO KUALA	76,429	RENDAH
138	BNN KOTA BANJARMASIN	89,464	SANGAT TINGGI
139	BNN KOTA BANJARBARU	85,625	TINGGI
140	BNN KABUPATEN BALANGAN	89,196	SANGAT TINGGI
141	BNN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	84,821	TINGGI
142	BNN KABUPATEN TANAH LAUT	87,321	TINGGI
143	BNN KABUPATEN TABALONG	85,179	TINGGI
144	BNN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA	89,286	SANGAT TINGGI
145	BNNP KALIMANTAN TIMUR	92,143	SANGAT TINGGI
146	BNN KOTA BALIKPAPAN	92,321	SANGAT TINGGI
147	BNN KOTA SAMARINDA	85,000	TINGGI
148	BNN KOTA BONTANG	80,714	TINGGI

LAMPIRAN I
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4729/XII/DE/PC.01/2023/BNN
TANGGAL : 27 Desember 2023

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
149	BNNP NUSA TENGGARA BARAT	75,714	RENDAH
150	BNN KABUPATEN BIMA	86,607	TINGGI
151	BNN KOTA MATARAM	94,464	SANGAT TINGGI
152	BNN KABUPATEN SUMBAWA BARAT	83,571	TINGGI
153	BNN KABUPATEN SUMBAWA	83,125	TINGGI
154	BNNP KALIMANTAN UTARA	83,482	TINGGI
155	BNN KOTA TARAKAN	74,107	RENDAH
156	BNN KABUPATEN NUNUKAN	90,536	SANGAT TINGGI
157	BNNP SULAWESI UTARA	83,750	TINGGI
158	BNN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	81,696	TINGGI
159	BNN KOTA BITUNG	86,429	TINGGI
160	BNN KOTA MANADO	93,393	SANGAT TINGGI
161	BNN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE	90,893	SANGAT TINGGI
162	BNNP SULAWESI TENGAH	87,946	TINGGI
163	BNN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN	85,536	TINGGI
164	BNN KABUPATEN MOROWALI	89,732	SANGAT TINGGI
165	BNN KOTA PALU	88,750	SANGAT TINGGI
166	BNN KABUPATEN DONGGALA	88,482	SANGAT TINGGI
167	BNN KABUPATEN POSO	77,321	TINGGI
168	BNN KABUPATEN TOJO UNA-UNA	78,929	TINGGI
169	BNNP SULAWESI SELATAN	91,071	SANGAT TINGGI
170	BNN KABUPATEN TANA TORAJA	91,429	SANGAT TINGGI
171	BNN KABUPATEN BONE	84,911	TINGGI
172	BNN KOTA PALOPO	90,714	SANGAT TINGGI
173	BNNP SULAWESI TENGGARA	83,214	TINGGI

LAMPIRAN I
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4729/XII/DE/PC.01/2023/BNN
TANGGAL : 27 Desember 2023

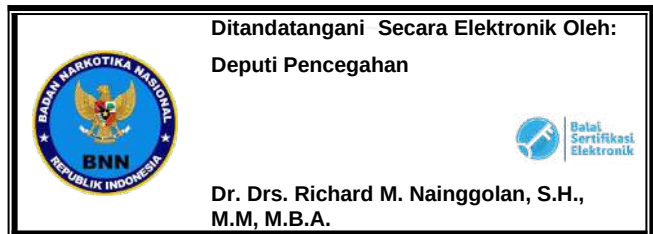
NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
174	BNN KABUPATEN MUNA	89,911	SANGAT TINGGI
175	BNN KABUPATEN KOLAKA	86,429	TINGGI
176	BNN KOTA KENDARI	86,875	TINGGI
177	BNN KOTA BAU-BAU	94,196	SANGAT TINGGI
178	BNNP SULAWESI BARAT	82,679	TINGGI
179	BNN KABUPATEN POLEWALI MANDAR	93,750	SANGAT TINGGI
180	BNNP MALUKU	85,268	TINGGI
181	BNN KABUPATEN BURU SELATAN	76,875	TINGGI
182	BNN KOTA TUAL	83,304	TINGGI
183	BNNP MALUKU UTARA	89,643	SANGAT TINGGI
184	BNN KABUPATEN PULAU MOROTAI	82,679	TINGGI
185	BNN KOTA TIDORE KEPULAUAN	91,696	SANGAT TINGGI
186	BNN KABUPATEN HALMAHERA UTARA	70,625	RENDAH
187	BNNP BALI	89,196	SANGAT TINGGI
188	BNN KOTA DENPASAR	79,821	TINGGI
189	BNN KABUPATEN BADUNG	87,857	TINGGI
190	BNN KABUPATEN GIANJAR	95,536	SANGAT TINGGI
191	BNN KABUPATEN BULELENG	91,607	SANGAT TINGGI
192	BNN KABUPATEN KLUNGKUNG	89,821	SANGAT TINGGI
193	BNN KABUPATEN KARANGASEM	84,018	TINGGI
194	BNNP NUSA TENGGARA TIMUR	87,589	TINGGI
195	BNN KABUPATEN BELU	85,625	TINGGI
196	BNN KOTA KUPANG	81,339	TINGGI
197	BNN KABUPATEN ROTE NDAO	88,125	TINGGI
198	BNNP GORONTALO	77,411	TINGGI

LAMPIRAN I
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4729/XII/DE/PC.01/2023/BNN
TANGGAL : 27 Desember 2023

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
199	BNN KABUPATEN BOALEMO	78,125	TINGGI
200	BNN KOTA GORONTALO	77,946	TINGGI
201	BNN KABUPATEN BONE BOLANGO	71,429	RENDAH
202	BNN KABUPATEN GORONTALO	79,196	TINGGI
203	BNN KABUPATEN GORONTALO UTARA	89,732	SANGAT TINGGI
204	BNNP PAPUA	81,875	TINGGI
205	BNN KABUPATEN MIMIKA	87,321	TINGGI
206	BNN KABUPATEN JAYAPURA	88,036	TINGGI
207	BNNP PAPUA BARAT	76,696	TINGGI
NILAI DEKTARA TAHUN 2023		85,389	TINGGI



a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional





KUESIONER IKP

NAMA : NO HP/WA :
PEKERJAAN : EMAIL :
ALAMAT :

I. ASPEK MANUSIA : TOKOH DAN PENGGIAT YANG MENDUKUNG P4GN

1. Apakah ada Penggiat/Satgas P4GN di lingkungan masyarakat?
 - a. Ada
 - b. Tidak ada
2. Apakah ada Tokoh masyarakat/Tokoh Agama/Tokoh Adat/Masyarakat yang mendukung kegiatan P4GN?
 - a. Ada
 - b. Tidak ada

II. ASPEK METODE (CARA MELAKUKAN KEGIATAN/PENYULUHAN/SOSIALISASI DAN PELATIHAN/TES URINE)

1. Apakah ada kerjasama pelaksanaan Program P4GN antara BNN dengan Lembaga di Daerah?
 - a. Ada
 - b. Tidak ada
2. Apakah ada deklarasi/fakta integritas tentang P4GN oleh aparat penegak hukum, ASN dan TNI/POLRI?
 - a. Ada
 - b. Tidak ada

III. ASPEK ANGGARAN : DANA SWADAYA DAN ATAU SPONSORSHIP DAN ATAU BANTUAN PEMERINTAH UNTUK KEGIATAN P4GN (PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA)

1. Apakah ada anggaran yang dialokasikan untuk mendukung giat P4GN?
 - a. Ada
 - b. Tidak ada

IV. ASPEK SISTEM : (REGULASI/ATURAN/NORMA/KEBIJAKAN)

1. Apakah ada Peraturan Daerah tentang P4GN? (Perda, Pergub, Perbup, Perwali, Surat Edaran)
 - a. Ada (Perda, Pergub, Perbup, Perwali)
 - b. Ada (Surat Edaran)
2. Apakah di lingkungan tempat tinggal saudara ada aturan, norma dan kebijakan pendukung kegiatan P4GN?
 - a. Ada
 - b. Tidak ada
3. Apakah proses peradilan kasus tindak pidana narkoba sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mulai dari proses penyidikan, penuntutan, dan proses pengadilan?
 - a. Sesuai
 - b. Tidak sesuai
4. Apakah ada kesesuaian antara ancaman hukuman dengan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum?
 - a. Ada
 - b. Tidak ada
5. Apakah ada kesesuaian antara tuntutan dengan Vonis yang dijatuhkan oleh Hakim?
 - a. Ada
 - b. Tidak ada

V. ASPEK SARANA PRASARANA, ALAT PENDUKUNG, DAN MEDIA PROMOSI UNTUK KEGIATAN P4GN (PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA)

1. Apakah adanya fasilitas pelatihan, sarana dan prasarana olahraga yang dikelola oleh Pemerintah/Lingkungan Pendidikan/Dunia Usaha/Masyarakat dalam rangka P4GN?
 - a. Ada
 - b. Tidak ada
2. Apakah ada liputan kegiatan P4GN yang dikelola oleh Pemerintah/Lingkungan Pendidikan/Dunia Usaha/Masyarakat melalui media sosial/media elektronik/media cetak?
 - a. Ada
 - b. Tidak ada
3. Apakah ada fasilitas layanan pelatihan keterampilan yang dikelola oleh Pemerintah dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat?
 - a. Ada
 - b. Tidak ada
4. Apakah ada fasilitas rehabilitasi narkoba di fasilitas kesehatan milik Pemerintah?
 - a. Ada
 - b. Tidak ada

VI. ASPEK KEGIATAN :

1. Apakah ada kebiasaan anggota keluarga yang berperilaku hidup sehat (berolahraga secara rutin, tidak merokok, tidak minum minuman keras, tidak ketempat hiburan malam/dugem)?
 - a. Ada
 - b. Tidak ada
2. Apakah anggota keluarga saudara selalu aktif berinteraksi positif (silaturahmi) di lingkungan tempat tinggal?
 - a. Ya
 - b. Tidak

3. Apakah anggota keluarga saudara selalu berpartisipasi dalam kegiatan sosial/keagamaan di lingkungan tempat tinggal?
 - a. Ya
 - b. Tidak
4. Apakah dalam keluarga saudara selalu ada kegiatan positif yang dilakukan bersama?
 - a. Ada
 - b. Tidak ada
5. Apakah anggota keluarga saudara pernah mendapatkan informasi mengenai Program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)?
 - a. Pernah
 - b. Tidak pernah
6. Apakah keluarga saudara memiliki inisiatif untuk melaporkan anggota keluarga yang terlibat penyalahgunaan narkoba kepada aparat penegak hukum?
 - a. Ya
 - b. Tidak
7. Apakah di wilayah saudara ada intervensi kegiatan Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang dilakukan oleh BNN, Penggiat P4GN dan stakeholder?
 - a. Ada
 - b. Tidak ada
8. Apakah di wilayah saudara ada sistem keamanan lingkungan yang berbasis masyarakat?
 - a. Ada
 - b. Tidak ada
9. Apakah di wilayah saudara ada kegiatan pelatihan kewirausahaan?
 - a. Ada
 - b. Tidak ada

10. Apakah di wilayah saudara selalu mendapat kan dukungan Pemerintah Daerah dalam membantu keberlanjutan program kewirausahaan?

- a. Ya
- b. Tidak

11. Apakah di wilayah saudara ada operasi bersama terkait penyakit masyarakat (operasi pekat) minimal 1 tahun sekali?

- a. Ada
- b. Tidak ada

HASIL PERHITUNGAN IKP PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT LINGKUNGAN PEMERINTAH
TAHUN 2023

NO	INSTANSI	NILAI IKP SETELAH DIKONVERSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI	KATEGORI IKP	KRITERIA
1	Dinas Sosial	3.20	2,51 - 3,25	80.00	B	Mandiri
2	DP3APPKB	3.80	3,25 - 4,00	95.00	A	Sangat Mandiri
3	DAMKAR	3.00	2,51 - 3,25	75.00	B	Mandiri
4	BPBD	3.80	3,25 - 4,00	95.00	A	Sangat Mandiri
5	DINKES	3.00	2,51 - 3,25	75.00	B	Mandiri
6	DLH	3.00	2,51 - 3,25	75.00	B	Mandiri
7	DINKOMINFO	3.00	2,51 - 3,25	75.00	B	Mandiri
8	DISBUDPORAPAR	3.80	3,25 - 4,00	95.00	A	Sangat Mandiri
9	PMPTS	3.00	2,51 - 3,25	75.00	B	Mandiri
10	SATPOLPP	3.20	2,51 - 3,25	80.00	B	Mandiri
11	PEMERINTAHAN & KESRA	3.64	3,25 - 4,00	91.00	A	Sangat Mandiri
12	DISHUB	3.20	2,51 - 3,25	80.00	B	Mandiri
13	DISNAKER	3.00	2,51 - 3,25	75.00	B	Mandiri
RATA-RATA (IKP LINGKUNGAN PEMERINTAH)		3.28	3,25 - 4,00	82.00	A	Sangat Mandiri

HASIL PERHITUNGAN IKP PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT LINGKUNGAN PENDIDIKAN
TAHUN 2023

NO	INSTANSI	NILAI IKP SETELAH DIKONVERSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI	KATEGORI IKP	KRITERIA
1	SMP Kartika IV-1	2.96	2,51 - 3,25	74.00	B	Mandiri
2	SMP Kartika IV-10	3.00	2,51 - 3,25	75.00	B	Mandiri
3	SMP Kartika IV-11	3.00	2,51 - 3,25	75.00	B	Mandiri
4	SMP Hang Tuah 1	3.80	3,25 - 4,00	95.00	A	Sangat Mandiri
5	SMPN 48 Surabaya	3.00	2,51 - 3,25	75.00	B	Mandiri
6	SMP Katarina	3.64	3,25 - 4,00	91.00	A	Sangat Mandiri
7	SMP Santa Maria	3.80	3,25 - 4,00	95.00	A	Sangat Mandiri
8	SMP Brawijaya Sakta I	3.00	2,51 - 3,25	75.00	B	Mandiri
9	SMPN 12 Surabaya	3.00	2,51 - 3,25	75.00	B	Mandiri
10	SMP Al Falah	3.00	2,51 - 3,25	75.00	B	Mandiri
11	SMP Muhamadiyah 3	2.92	2,51 - 3,25	73.00	B	Mandiri
12	SMP Mawar Sharon	3.80	3,25 - 4,00	95.00	A	Sangat Mandiri
13	SMP Khadijah	3.80	3,25 - 4,00	95.00	A	Sangat Mandiri
14	SMP Bina Taruna	3.00	2,51 - 3,25	75.00	B	Mandiri
RATA-RATA (IKP LINGKUNGAN PENDIDIKAN)		3.27	3,25 - 4,00	81.64	A	Sangat Mandiri



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/4717/XII/DE/PM/2023/BNN
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Hasil Pengukuran Indeks KOTAN
Tahun 2023

Jakarta, 22 Desember 2023

Kepada

Yth. **1. Para Kepala BNN Provinsi**
2. Para Kepala BNN Kabupaten/Kota

di
tempat

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- e. Program Kerja Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat T.A. 2023.

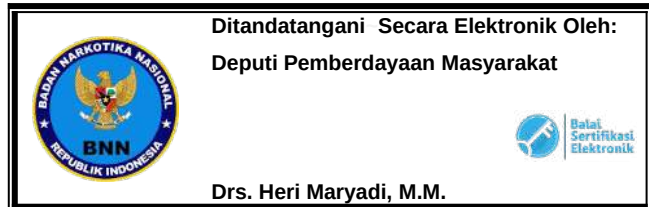
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada tersebut alamat, bahwa Badan Narkotika Nasional melalui Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat telah melakukan pengukuran Indeks Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba (KOTAN) yang dilaksanakan pada 173 Kabupaten/Kota di 34 Provinsi di Indonesia.

3. Berdasarkan dengan butir dua, berikut ini disampaikan hasil Indeks KOTAN dengan besaran masing-masing variabel sebagaimana terlampir, yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam evaluasi dan perencanaan strategi implementasi Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba tahun berikutnya.

/4. Demikian

4. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional



Tembusan :

1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. Inspektur Utama BNN.

HASIL PENGUKURAN INDEKS KABUPATEN/KOTA TANGGAP ANCAMAN NARKOBA TAHUN 2023

No	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Variabel					Indeks	Kategori	Mutu
		Ketaha n Keluarga	Ketahan an Masyarakat	Kewilayah a n	Kelembaga an	Hukum			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Aceh	1,88	3,05	2,72	2,70	2,82	2,60	Cukup Tanggap	C
2	Gayo Lues	1,81	3,53	2,99	3,54	3,70	3,07	Tanggap	B
3	Aceh Selatan	1,82	3,51	3,01	3,20	3,48	2,95	Tanggap	B
4	Pidie	1,73	2,93	2,47	2,69	2,91	2,52	Cukup Tanggap	C
5	Pidie Jaya	1,76	3,33	2,87	2,88	3,42	2,79	Tanggap	B
6	Aceh Tamiang	1,86	2,86	2,35	2,43	2,56	2,41	Cukup Tanggap	C
7	Bireuen	1,97	3,55	3,26	3,30	3,70	3,09	Tanggap	B
8	Kota Sabang	2,07	3,19	2,89	3,00	3,05	2,81	Tanggap	B
9	Kota Lhokseumawe	2,00	3,00	2,62	2,76	3,01	2,65	Tanggap	B
10	Kota Langsa	1,98	3,50	3,17	3,39	3,32	3,03	Tanggap	B
11	Banda Aceh	1,80	2,96	2,23	2,42	2,41	2,38	Cukup Tanggap	C
12	Sumatera Utara	2,23	3,42	3,02	3,33	3,30	3,04	Tanggap	B
13	Mandailing Natal	1,72	3,02	2,27	2,60	3,29	2,56	Cukup Tanggap	C
14	Deli Serdang	2,12	3,23	2,73	2,89	2,90	2,77	Tanggap	B
15	Simalungun	2,13	3,49	3,15	3,46	3,49	3,11	Tanggap	B
16	Serdang Bedagai	2,46	3,65	3,48	3,72	3,45	3,32	Sangat Tanggap	A
17	Kota Pematang Siantar	2,68	3,67	3,30	3,78	3,10	3,33	Sangat Tanggap	A
18	Kota Asahan	1,95	3,37	3,01	3,56	3,78	3,09	Tanggap	B
19	Kota Tebing Tinggi	2,43	3,31	2,76	2,83	3,10	2,88	Tanggap	B
20	Kota Tanjungbalai	2,57	3,53	3,00	3,33	3,40	3,17	Tanggap	B

No	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Variabel					Indeks	Kategori	Mutu
		Ketahanan Keluarga	Ketahanan Masyarakat	Kewilayah an	Kelembagaan	Hukum			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	Tapanuli Selatan	1,90	3,39	2,88	3,44	3,05	2,93	Tanggap	B
22	Kota Binjai	2,08	3,11	2,93	3,16	3,24	2,87	Tanggap	B
23	Langkat	2,50	3,61	3,23	3,56	3,52	3,27	Sangat Tanggap	A
24	Kota Gunung Sitoli	1,99	3,03	2,59	2,76	2,84	2,63	Cukup Tanggap	C
25	Labuhanbatu Utara	2,16	3,52	3,15	3,56	3,71	3,18	Tanggap	B
27	Karo	2,11	3,39	3,12	3,49	3,32	3,06	Tanggap	B
27	Batu Bara	2,52	3,72	3,51	3,64	3,36	3,33	Sangat Tanggap	A
28	Sumatera Barat	2,19	3,34	3,02	3,26	3,31	3,00	Tanggap	B
29	Kota Payakumbuh	2,32	3,84	3,46	3,88	3,93	3,44	Sangat Tanggap	A
30	Kota Sawahlunto	1,72	3,05	2,63	2,85	3,06	2,63	Cukup Tanggap	C
31	Pasaman Barat	2,93	3,36	3,31	3,51	3,30	3,27	Sangat Tanggap	A
32	Solok	1,85	3,13	2,60	2,78	2,95	2,64	Cukup Tanggap	C
33	Sumatera Selatan	2,00	3,15	2,71	2,88	3,01	2,73	Tanggap	B
34	Kota Pagar Alam	1,86	3,02	2,47	2,46	2,87	2,51	Cukup Tanggap	C
35	Kota Lubuklinggau	1,79	3,10	2,74	2,88	3,05	2,68	Tanggap	B
36	Prabumulih	1,80	3,09	2,46	2,59	2,66	2,52	Cukup Tanggap	C
37	Ogan Ilir	1,78	3,20	2,55	2,95	3,20	2,72	Tanggap	B
38	Ogan Komering ilir	1,91	3,33	3,01	3,34	3,29	2,94	Tanggap	B
39	Empat Lawang	2,50	3,61	3,34	3,61	3,61	3,31	Sangat Tanggap	A
40	Muara Enim	2,38	3,13	2,82	2,93	3,14	2,86	Tanggap	B
41	Musi Rawas	1,90	2,83	2,40	2,43	2,56	2,42	Cukup Tanggap	C
42	Ogan Komering Ulu Timur	2,06	3,11	2,80	2,98	3,05	2,78	Tanggap	B
43	Bengkulu	1,89	3,03	2,57	2,72	2,82	2,59	Cukup Tanggap	C
44	Bengkulu Selatan	2,03	3,24	2,88	3,06	3,01	2,82	Tanggap	B
45	Kota Bengkulu	1,78	2,84	2,32	2,42	2,64	2,39	Cukup Tanggap	C

No	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Variabel					Indeks	Kategori	Mutu
		Ketahanan Keluarga	Ketahanan Masyarakat	Kewilayah an	Kelembagaan	Hukum			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	Jambi	2,06	3,27	2,83	3,05	3,10	2,84	Tanggap	B
47	Batang Hari	2,18	3,43	3,12	3,17	3,24	2,99	Tanggap	B
48	Tanjung Jabung Timur	1,86	2,98	2,60	2,76	2,91	2,60	Cukup Tanggap	C
49	Kota Jambi	2,13	3,30	2,65	3,16	3,04	2,87	Tanggap	B
50	Riau	2,01	3,33	3,00	3,34	3,38	2,97	Tanggap	B
51	Kota Dumai	2,04	3,57	3,56	3,65	3,72	3,23	Tanggap	B
52	Kota Pekanbaru	2,12	3,21	2,59	3,48	3,24	2,95	Tanggap	B
53	Pelalawan	1,95	3,47	3,10	3,52	3,65	3,09	Tanggap	B
54	Kuantan Sengingi	1,94	3,08	2,77	2,75	2,97	2,66	Tanggap	B
55	Kepulauan Riau	2,14	3,61	3,21	3,58	3,58	3,19	Tanggap	B
56	Karimun	2,35	3,71	3,42	3,72	3,72	3,35	Sangat Tanggap	A
57	Kota Batam	2,17	3,56	3,40	3,66	3,72	3,25	Tanggap	B
58	Tanjung Pinang	1,96	3,55	2,85	3,37	3,31	3,00	Tanggap	B
59	Bangka Belitung	1,97	3,33	2,98	3,23	3,26	2,92	Tanggap	B
60	Bangka Selatan	1,78	2,99	2,60	2,73	3,01	2,59	Cukup Tanggap	C
61	Bangka	2,01	3,39	3,17	3,52	3,40	3,06	Tanggap	B
62	Kota Pangkalpinang	1,88	3,34	2,86	3,04	3,11	2,82	Tanggap	B
63	Belitung	2,18	3,51	3,08	3,39	3,35	3,08	Tanggap	B
64	Lampung	1,93	3,24	2,76	3,09	3,15	2,81	Tanggap	B
65	Tanggamus	1,89	3,26	2,78	3,05	2,89	2,76	Tanggap	B
66	Lampung selatan	2,17	3,77	3,33	3,78	3,82	3,34	Sangat Tanggap	A
67	Kota Metro	1,92	3,15	2,63	2,75	3,02	2,67	Tanggap	B
68	Way Kanan	1,82	2,89	2,37	2,90	2,87	2,57	Cukup Tanggap	C
69	Lampung Timur	1,73	2,74	2,38	2,44	3,17	2,44	Cukup Tanggap	C
70	Banten	2,18	3,39	3,08	3,41	3,39	3,06	Tanggap	B

No	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Variabel					Indeks	Kategori	Mutu
		Ketaha n Keluarga	Ketahan an Masyarakat	Kewilaya han	Kelembaga an	Hukum			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71	Kota Tangerang Selatan	2,98	3,66	3,59	3,77	3,76	3,52	Sangat Tanggap	A
72	Kota Cilegon	1,79	2,99	2,49	2,81	2,57	2,53	Cukup Tanggap	C
73	Kota Tangerang	1,99	3,57	3,20	3,71	3,74	3,20	Tanggap	B
74	DKI Jakarta	1,84	3,03	2,50	2,57	2,94	2,55	Cukup Tanggap	C
75	Kota Jakarta Timur	1,76	2,70	2,19	2,31	2,59	2,30	Cukup Tanggap	C
76	Kota Jakarta Selatan	1,90	3,03	2,55	2,55	2,89	2,56	Cukup Tanggap	C
77	Kota Jakarta Utara	1,74	3,25	2,63	2,80	3,23	2,70	Tanggap	B
78	Jawa Barat	1,97	3,34	2,80	3,14	3,23	2,88	Tanggap	B
79	Karawang	1,79	3,07	2,53	2,59	2,98	2,56	Cukup Tanggap	C
80	Sukabumi	1,82	3,30	2,84	3,05	3,08	2,79	Tanggap	B
81	Bogor	2,39	3,27	2,88	3,16	3,31	2,99	Tanggap	B
82	Sumedang	1,93	3,13	2,58	2,66	3,04	2,65	Cukup Tanggap	C
83	Tasikmalaya	2,00	3,38	2,76	3,24	3,30	2,92	Tanggap	B
84	Ciamis	1,73	3,02	2,29	2,46	2,65	2,43	Cukup Tanggap	C
85	Kuningan	1,95	3,33	2,66	3,02	2,96	2,78	Tanggap	B
86	Kota Cirebon	1,77	3,10	2,54	2,76	3,18	2,64	Cukup Tanggap	C
87	Kota Depok	1,91	3,59	3,00	3,73	3,72	3,17	Tanggap	B
88	Cianjur	1,60	3,40	2,95	3,44	3,14	2,87	Tanggap	B
89	Garut	2,32	3,52	3,15	3,82	3,63	3,27	Sangat Tanggap	A
90	Kota Bandung	2,13	3,44	2,75	3,14	3,41	2,96	Tanggap	B
91	Kota Cimahi	2,10	3,89	3,51	3,93	3,93	3,42	Sangat Tanggap	A
92	Bandung Barat	1,95	2,90	2,23	2,42	2,57	2,43	Cukup Tanggap	C
93	DI Yogyakarta	2,03	3,20	2,57	2,92	2,80	2,71	Tanggap	B
94	Kota Yogyakarta	1,94	3,26	2,45	2,88	2,89	2,70	Tanggap	B

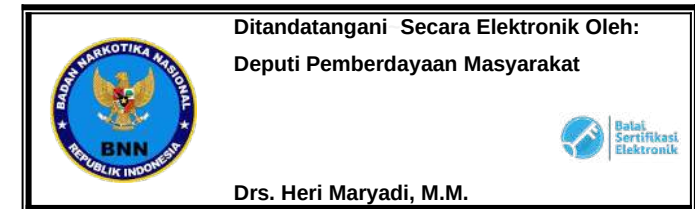
No	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Variabel					Indeks	Kategori	Mutu
		Ketaha n Keluarga	Ketahan an Masyarakat	Kewilaya h an	Kelembaga an	Hukum			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
95	Bantul	1,95	3,14	2,55	2,78	2,73	2,63	Cukup Tanggap	C
96	Sleman	2,16	3,19	2,74	3,12	2,78	2,81	Tanggap	B
97	Jawa Tengah	2,11	3,49	3,14	3,55	3,40	3,11	Tanggap	B
98	Kendal	1,76	3,11	2,58	2,75	2,86	2,59	Cukup Tanggap	C
99	Temanggung	2,24	3,63	3,28	3,81	3,38	3,25	Sangat Tanggap	A
100	Banyumas	2,20	3,53	3,33	3,72	3,61	3,23	Tanggap	B
101	Purbalingga	2,21	3,41	3,16	3,66	3,37	3,14	Tanggap	B
102	Batang	2,26	3,52	3,19	3,86	3,36	3,24	Tanggap	B
103	Cilacap	2,32	3,59	3,25	3,79	3,46	3,27	Sangat Tanggap	A
104	Magelang	2,12	3,90	3,59	3,90	3,97	3,43	Sangat Tanggap	A
105	Kota Surakarta	1,81	3,28	2,68	2,97	3,02	2,74	Tanggap	B
106	Kota Tegal	2,13	3,51	3,25	3,70	3,77	3,23	Tanggap	B
107	Jawa Timur	2,06	3,57	3,12	3,47	3,42	3,10	Tanggap	B
108	Malang	2,31	3,74	3,23	3,58	3,49	3,25	Sangat Tanggap	A
109	Tulungagung	1,97	3,53	3,07	3,47	3,50	3,07	Tanggap	B
110	Pasuruan	2,10	3,67	3,25	3,64	3,53	3,21	Tanggap	B
111	Sumenep	1,96	3,67	3,50	3,85	3,90	3,31	Sangat Tanggap	A
112	Gresik	2,03	3,51	3,10	3,40	3,41	3,06	Tanggap	B
113	Lumajang	2,15	3,40	2,93	3,11	3,38	2,96	Tanggap	B
114	Kediri	1,84	3,32	2,68	3,16	2,77	2,76	Tanggap	B
115	Tuban	2,08	3,47	3,01	3,38	3,54	3,06	Tanggap	B
116	Kota Malang	1,84	3,30	2,87	3,10	3,14	2,82	Tanggap	B
117	Kota Surabaya	2,17	3,42	2,97	3,25	3,14	2,98	Tanggap	B
118	Kota Kediri	2,14	3,79	3,38	3,72	3,73	3,31	Sangat Tanggap	A
119	Sidoarjo	2,00	3,63	3,02	3,62	3,68	3,17	Tanggap	B
120	Kota Batu	2,14	3,41	2,88	3,13	2,71	2,87	Tanggap	B

No	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Variabel					Indeks	Kategori	Mutu
		Ketaha n Keluarga	Ketahan an Masyarakat	Kewilaya han	Kelembaga an	Hukum			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
121	Trenggalek	2,14	3,71	3,17	3,67	3,67	3,25	Tanggap	B
122	Nganjuk	2,16	3,70	3,24	3,63	3,62	3,24	Tanggap	B
123	Kota Mojokerto	2,02	3,56	3,18	3,52	3,25	3,08	Tanggap	B
124	Blitar	2,05	3,77	3,49	3,72	3,62	3,28	Sangat Tanggap	A
125	Bali	1,98	3,30	2,75	3,01	3,14	2,82	Tanggap	B
126	Badung	2,04	3,36	2,82	3,17	3,11	2,89	Tanggap	B
127	Gianyar	2,00	3,35	2,73	3,09	3,48	2,91	Tanggap	B
128	Klungkung	1,72	2,72	2,20	2,44	2,61	2,33	Cukup Tanggap	C
129	Buleleng	2,20	3,55	3,02	3,13	3,23	3,01	Tanggap	B
130	Karangasem	1,95	3,13	2,43	2,82	2,90	2,65	Tanggap	B
131	Kota Denpasar	1,94	3,35	2,93	3,28	3,30	2,93	Tanggap	B
132	NTT	2,09	2,98	2,47	2,58	2,54	2,54	Cukup Tanggap	C
133	Kota Kupang	2,13	2,85	2,34	2,41	2,49	2,45	Cukup Tanggap	C
134	Belu	2,18	3,09	2,85	2,86	2,70	2,72	Tanggap	B
135	Rote Ndao	1,97	3,02	2,38	2,57	2,50	2,50	Cukup Tanggap	C
136	NTB	2,02	3,25	2,71	2,88	3,00	2,76	Tanggap	B
137	Sumbawa Barat	1,90	2,96	2,59	2,61	2,96	2,57	Cukup Tanggap	C
138	Bima	2,11	3,11	2,50	2,53	2,73	2,60	Cukup Tanggap	C
139	Mataram	2,31	3,87	3,14	3,80	3,31	3,30	Sangat Tanggap	A
140	Sumbawa	1,85	3,15	2,68	2,78	3,11	2,68	Tanggap	B
141	Kalimantan Selatan	1,98	3,40	2,99	3,25	3,28	2,95	Tanggap	B
142	Barito Kuala	1,94	3,88	3,47	3,89	3,75	3,33	Sangat Tanggap	A
143	Kota Banjarbaru	2,11	3,40	3,02	3,28	2,91	2,94	Tanggap	B
144	Balangan	1,94	3,35	2,95	3,30	3,52	2,97	Tanggap	B
145	Tanah Laut	2,13	3,37	3,08	3,30	3,47	3,03	Tanggap	B

No	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Variabel					Indeks	Kategori	Mutu
		Ketaha n Keluarga	Ketahan an Masyarakat	Kewilaya han	Kelembaga an	Hukum			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
146	Tabalong	1,75	3,29	2,86	2,95	3,35	2,79	Tanggap	B
147	Hulu Sungai Selatan	1,76	3,09	2,64	2,79	2,86	2,60	Cukup Tanggap	C
148	Hulu Sungai Utara	2,10	3,72	3,12	3,71	3,68	3,24	Tanggap	B
149	Kota Banjarmasin	2,13	3,31	2,90	3,04	3,36	2,91	Tanggap	B
150	Kalimantan Barat	2,02	3,20	2,73	2,96	3,06	2,78	Tanggap	B
151	Bengkayang	1,73	3,16	2,51	2,91	2,89	2,63	Cukup Tanggap	C
152	Kubu Raya	1,99	3,41	3,09	3,41	3,50	3,03	Tanggap	B
153	Sintang	2,25	3,43	3,03	3,18	3,39	3,03	Tanggap	B
154	Sanggau	2,10	3,08	2,51	2,52	2,95	2,62	Cukup Tanggap	C
155	Kota Singkawang	1,98	2,83	2,58	2,53	2,62	2,49	Cukup Tanggap	C
156	Kota Pontianak	2,01	3,13	2,52	2,84	2,82	2,67	Tanggap	B
157	Mempawah	2,10	3,51	3,01	3,52	3,48	3,11	Tanggap	B
158	Kalimantan Timur	2,37	3,44	2,92	3,27	3,51	3,09	Tanggap	B
159	Samarinda	1,99	3,30	2,53	3,05	3,41	2,85	Tanggap	B
160	Balikpapan	2,02	3,44	2,94	3,22	3,56	3,00	Tanggap	B
161	Bontang	2,90	3,55	3,24	3,49	3,57	3,34	Sangat Tanggap	A
162	Kalimantan Tengah	2,40	3,59	3,23	3,45	3,58	3,22	Tanggap	B
163	Kotawaringin Barat	2,51	3,91	3,82	3,98	3,98	3,58	Sangat Tanggap	A
164	Kota Palangka Raya	2,31	3,35	2,84	3,06	3,29	2,96	Tanggap	B
165	Kalimantan Utara	1,75	3,03	2,79	2,78	3,02	2,62	Cukup Tanggap	C
166	Kota Tarakan	1,73	3,07	2,81	3,00	3,10	2,70	Tanggap	B
167	Nunukan	1,78	2,99	2,76	2,52	2,95	2,54	Cukup Tanggap	C
168	Sulawesi Selatan	1,94	3,35	3,00	3,26	3,23	2,92	Tanggap	B
169	Tana Toraja	2,26	3,55	3,03	3,30	3,27	3,07	Tanggap	B

No	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Variabel					Indeks	Kategori	Mutu
		Ketahanan Keluarga	Ketahanan Masyarakat	Kewilayah an	Kelembagaan	Hukum			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
170	Bone	1,81	3,26	3,09	3,21	3,39	2,89	Tanggap	B
171	Kota Palopo	1,83	3,30	2,81	3,32	2,86	2,82	Tanggap	B
172	Sulawesi Tengah	1,89	3,04	2,64	2,68	2,86	2,59	Cukup Tanggap	C
173	Banggai Kepulauan	1,86	3,16	2,70	2,83	2,92	2,67	Tanggap	B
174	Poso	1,82	2,86	2,56	2,45	2,59	2,43	Cukup Tanggap	C
175	Tojo Una-Una	1,88	3,04	2,62	2,62	2,63	2,54	Cukup Tanggap	C
176	Kota Palu	1,81	2,87	2,50	2,62	2,94	2,52	Cukup Tanggap	C
177	Morowali	1,95	3,33	3,07	3,06	3,34	2,89	Tanggap	B
178	Donggala	2,02	3,06	2,50	2,58	2,88	2,60	Cukup Tanggap	C
179	Sulawesi Tenggara	2,04	3,10	2,61	2,82	3,02	2,70	Tanggap	B
180	Muna	1,96	2,98	2,47	2,61	2,99	2,58	Cukup Tanggap	C
181	Kolaka	2,13	3,09	2,55	2,66	2,81	2,65	Cukup Tanggap	C
182	Kota Kendari	2,03	2,89	2,36	2,43	2,84	2,50	Cukup Tanggap	C
183	Kota Bau-Bau	2,06	3,44	3,01	3,51	3,38	3,06	Tanggap	B
184	Gorontalo	2,04	3,29	2,71	3,04	3,06	2,82	Tanggap	B
185	Boalemo	2,07	3,24	2,94	2,98	3,13	2,84	Tanggap	B
186	Bone Bolango	1,78	2,95	2,39	2,58	2,92	2,50	Cukup Tanggap	C
187	Kota Gorontalo	2,06	3,10	2,56	2,75	2,81	2,66	Tanggap	B
188	Gorontalo Utara	2,24	3,72	2,93	3,72	3,46	3,23	Tanggap	B
189	Gorontalo	1,85	3,08	2,57	2,66	2,70	2,56	Cukup Tanggap	C
190	Maluku	2,12	2,95	2,59	2,87	2,82	2,67	Tanggap	B
191	Buru Selatan	2,26	3,29	2,88	3,46	3,02	3,00	Tanggap	B
192	Kota Tual	2,01	2,65	2,34	2,36	2,63	2,38	Cukup Tanggap	C
193	Maluku Utara	1,99	2,93	2,60	2,66	2,64	2,55	Cukup Tanggap	C
194	Pulau Morotai	2,00	3,00	2,58	2,62	2,65	2,56	Cukup Tanggap	C
195	Halmahera Utara	2,16	2,91	2,70	2,84	2,93	2,69	Tanggap	B

No	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Variabel					Indeks	Kategori	Mutu
		Ketahanan Keluarga	Ketahanan Masyarakat	Kewilayah an	Kelembagaan	Hukum			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
196	Kota Tidore Kepulauan	1,85	2,91	2,51	2,56	2,47	2,45	Cukup Tanggap	C
197	Papua	2,24	3,00	2,84	2,77	3,17	2,76	Tanggap	B
198	Jayapura	2,19	2,77	2,69	2,45	3,12	2,59	Cukup Tanggap	C
199	Mimika	2,27	3,22	2,98	3,06	3,21	2,92	Tanggap	B
200	Sulawesi Barat	1,87	3,23	2,88	2,86	3,09	2,74	Tanggap	B
201	Poliwali Mandar	1,87	3,23	2,88	2,86	3,09	2,74	Tanggap	B
202	Sulawesi Utara	1,93	3,16	2,68	2,84	2,82	2,67	Tanggap	B
203	Kepulauan Sangihe	1,88	3,70	3,29	3,56	2,97	3,06	Tanggap	B
204	Bolaang Mongondow	1,89	2,99	2,56	2,66	2,88	2,57	Cukup Tanggap	C
205	Kota Bitung	1,97	2,90	2,40	2,62	2,72	2,52	Cukup Tanggap	C
206	Kota Manado	1,99	3,04	2,46	2,59	2,71	2,56	Cukup Tanggap	C
207	Papua Barat	2,00	3,00	2,71	2,77	3,04	2,67	Tanggap	B
	Rata-Rata Nasional	2,03	3,27	2,85	3,07	3,12	2,85	Tanggap	B





A1:A3 | Satuan Kerja

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Satuan Kerja	Rawat Jalan		Total Rawat Jalan	Jumlah Klien yang Naik Kualitas Hidupnya Perdomain				Persentase Kenaikan Kualitas Hidup Perdomain				Persentase Kualitas Hidup
2		Selesai (Hanya Rehabilitasi)	Selesai Bina Lanjut		Fisk	Psikologi	Sosial	Lingkungan	Fisk	Psikologi	Sosial	Lingkungan	
3													
125	Jawa Timur	252	266	518	420	401	408	398	81.08	77.41	78.76	76.83	78.52
126	BNN Kabupaten Blitar	7	13	20	16	12	17	11	80.00	60.00	85.00	55.00	70.00
127	BNN Kabupaten Gresik	4	15	19	17	14	18	18	89.47	73.68	94.74	94.74	88.16
128	BNN Kabupaten Kediri		22	22	22	22	21	22	100.00	100.00	95.45	100.00	98.86
129	BNN Kabupaten Lumajang	6	5	11	9	7	11	8	81.82	63.64	100.00	72.73	79.55
130	BNN Kabupaten Malang	1	14	15	12	14	14	14	80.00	93.33	93.33	93.33	90.00
131	BNN Kabupaten Nganjuk	23	15	38	27	25	27	23	71.05	65.79	71.05	60.53	67.11
132	BNN Kabupaten Pasuruan	14	1	15	14	15	14	14	93.33	100.00	93.33	93.33	95.00
133	BNN Kabupaten Sidoarjo	20	10	30	28	28	27	29	93.33	93.33	90.00	96.67	93.33
134	BNN Kabupaten Sumenep	43	2	45	24	26	14	16	53.33	57.78	31.11	35.56	44.44
135	BNN Kabupaten Trenggalek		10	10	9	10	8	10	90.00	100.00	80.00	100.00	92.50
136	BNN Kabupaten Tuban	16	10	26	18	19	22	22	69.23	73.08	84.62	84.62	77.88
137	BNN Kabupaten Tulungagung	35	15	50	39	35	30	29	78.00	70.00	60.00	58.00	66.50
138	BNN Kota Batu	7	13	20	16	15	18	18	80.00	75.00	90.00	90.00	83.75
139	BNN Kota Kediri	17	20	37	26	32	29	28	70.27	86.49	78.38	75.68	77.70
140	BNN Kota Malang	17	14	31	22	19	22	21	70.97	61.29	70.97	67.74	67.74
141	BNN Kota Mojokerto	1	27	28	28	18	24	24	100.00	64.29	85.71	85.71	83.93
142	BNN Kota Surabaya	25	23	48	44	43	44	43	91.67	89.58	91.67	89.58	90.63
143	BNNP Jawa Timur	16	37	53	49	47	48	48	92.45	88.68	90.57	90.57	90.57
144	Bali	40	104	144	127	129	131	134	88.19	89.58	90.97	93.06	90.45
145	BNN Kabupaten Badung	3	14	17	14	16	17	15	82.35	94.12	100.00	88.24	91.18
146	BNN Kabupaten Buleleng	6	50	56	53	54	52	56	94.64	96.43	92.86	100.00	95.98



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
KELURAHAN KEDUNGORO**

**KEPUTUSAN LURAH KEDUNGORO
NOMOR : 400.7.6.4/021/436.9.27.2/2023**

**TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT IBM KELURAHAN KEDUNGORO
DAN PENETAPAN PETUGAS AGEN PEMULIHAN
DI KELURAHAN KEDUNGORO KECAMATAN TEGALSARI
KOTA SURABAYA TAHUN 2023**

LURAH KEDUNGORO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka berpartisipasi dalam mengentaskan masalah penyalahgunaan narkoba, dan potensi sumber penanganannya di masyarakat, maka perlu difasilitasi keberadaannya;
- b. bahwa untuk memfasilitasi potensi masyarakat agar berperan dalam rehabilitasi ketergantungan dan pemulihan penyalahguna narkoba, maka perlu membentuk tim Intervensi Berbasis Masyarakat Kelurahan Kedungoro;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Narkotika;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
7. Peraturan Badan Narkotika Nasional 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Peningkatan Kemampuan Lembaga Rehabilitasi Bagi Pecandu dan Penyalah Guna Narkotika sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Badan Narkotika Nasional 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Peningkatan Kemampuan Lembaga Rehabilitasi Bagi Pecandu dan Penyalah Guna Narkotika;
8. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 24 Tahun 2017 tentang Standar Layanan Rehabilitasi;
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pemekaran dan Penggabungan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya;
11. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 102 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya.
12. Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: KEP/214/II/DE/RH.03/2023/BNN tentang Penetapan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat Prioritas Nasional di Lingkungan BNN Provinsi/ Kabupaten/Kota Tahap Pertama Tahun Anggaran 2023;

13. Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya Nomor: KEP/12/II/KA/RH.01/2023/BNNK tentang Penetapan Lokasi Wilayah Intervensi Berbasis Masyarakat Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERTAMA:

Tim Intervensi Berbasis Masyarakat Kelurahan Kedungdoro Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya adalah tim dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA:

Tim Intervensi Berbasis Masyarakat Kelurahan Kedungdoro dimaksud dalam Diktum PERTAMA sebagaimana tersebut di atas mempunyai tugas:

1. Menemukanali penyalahguna narkoba/klien di wilayah Kelurahan Kedungdoro;
2. Memberikan informasi tentang bagaimana mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba;
3. Melakukan penjangkauan untuk mengidentifikasi penyalahgunaan narkoba/klien dan permasalahannya;
4. Mendampingi dan memberikan dukungan kepada penyalahguna narkoba/klien dengan tingkat risiko rendah melalui intervensi awal;
5. Melakukan rujukan ke layanan kesehatan dan sosial yang dibutuhkan penyalahguna narkoba/klien;
6. Melibatkan dan tingkat penyalahguna dan masyarakat untuk memberikan bantuan dan dukungan kepada penyalahguna narkoba di lingkungan setempat;
7. Melakukan penyebaran informasi terkait pemulihan korban penyalahgunaan narkoba;
8. Menggerakkan masyarakat agar peduli terhadap pemulihan korban penyalahgunaan narkoba;
9. Mengurangi stigma masyarakat terhadap korban penyalahgunaan narkoba;

10. Membentuk jejaring dan kerjasama dengan pihak lain dalam mendukung proses pemulihan korban penyalahgunaan narkoba; dan membantu fasilitasi korban penyalahgunaan narkoba mencapai kehidupan yang produktif dan berfungsi secara sosial.

KETIGA:

Masa tugas Tim Intervensi Berbasis Masyarakat Kelurahan Kedungdoro sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan 31 Desember 2023.

KEEMPAT:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kedungdoro
Pada tanggal 13 Maret 2023
Lurah Kedungdoro



LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH KEDUNGDORO
NOMOR: 400.7.6.4/021/436.9.27.2/2023

TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT IBM KELURAHAN KEDUNGDORO
DAN PENETAPAN PETUGAS AGEN PEMULIHAN
DI KELURAHAN KEDUNGDORO KECAMATAN TEGALSARI KOTA SURABAYA
TAHUN 2023

SUSUNAN PENGURUS TIM INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT
RPKN (RELAWAN PEDULI KORBAN NARKOBA)
KELURAHAN KEDUNGDORO KECAMATAN TEGALSARI KOTA SURABAYA
TAHUN ANGGARAN 2023

- | | | | |
|------|----------------|---|---|
| I | Pelindung | : | Kepala BNK Surabaya |
| II. | Pembina | : | Kepala Kelurahan Kedungdoro |
| III. | Ketua Tim | : | ABRAHAM RONALDO, ST |
| IV. | Anggota Tim AP | : | 1. ENDANG SRI WAHYUNI
2. FATCHUR ROCHIM
3. ANI INTELSARI
4. SRI HARTATIK |

Ditetapkan di Kedungdoro
Pada tanggal 13 Maret 2023
Lurah Kedungdoro



ACHMAD SINDA, SE.
Penata Muda Tk. I
NIP 197204302001121002



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
KECAMATAN TEGALSARI
KELURAHAN TEGALSARI**

Jl. Kampung Malang Tengah I No. 9 Surabaya 60262
Telp. (031) 5343023 Fax. (031) 5343023

PEMERINTAH KOTA SURABAYA
KELURAHAN TEGALSARI

KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN TEGALSARI
NOMOR : 400.7.21.3 / 087 / 436.9.27.4 / 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN IBM KELURAHAN TEGALSARI DAN
PENETAPAN PETUGAS AGEN PEMULIHAN DI KELURAHAN
KELURAHAN TEGALSARI KECAMATAN TEGALSARI

KEPALA KELURAHAN TEGALSARI

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka berpartisipasi dalam mengentaskan masalah penyalahgunaan narkoba, dan potensi sumber penanganannya di masyarakat, maka perlu difasilitasi keberadaannya.
 - b. Bahwa untuk memfasilitasi potensi masyarakat agar berperan dalam rehabilitasi ketergantungan dan pemulihan penyalahguna narkoba, maka perlu membentuk tim intervensi berbasis masyarakat kelurahan tegalsari.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Lurah.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
 2. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Narkotika
 3. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa.
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang

Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

8. Peraturan Badan Narkotika Nasional 17 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Peningkatan Kemampuan Lembaga Rehabilitasi bagi Pecandu dan Penyalah Guna Narkotika sebagaimana telah diubah beberapa kali, Terakhir Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Badan Narkotika Nasional 17 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Peningkatan Kemampuan Lembaga Rehabilitasi bagi Pecandu dan Penyalah Guna Narkotika.
9. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 24 tahun 2017 Tentang Standar Layanan Rehabilitasi.
10. Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : KEP/214/II/DE/RH.03/2023/BNN Tentang Penetapan Unit Intervensi berbasis Masyarakat Prioritas Nasional di Lingkungan BNN Provinsi/Kabupaten/Kota Tahap Pertama Tahun Anggaran 2023.
11. Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya Nomor : KEP/12/II/KA/Rh.01.2023/BNNK Tentang Penetapan lokasi wilayah intervensi berbasis Masyarakat Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

- : Menunjuk nama – nama sebagaimana tercantum dalam lampiran ini sebagai Tim Intervensi Berbasis Masyarakat Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya Tahun 2023

Tim Intervensi Berbasis Masyarakat Kelurahan Tegalsari dimaksud dalam Diktum PERTAMA sebagaimana mempunyai tugas :

KEDUA

- :
1. Menemukaneni penyalahguna narkoba/klien di wilayah Kelurahan Tegalsari.
2. Memberikan informasi tentang bagaimana mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba.
3. Melakukan Penjangkauan untuk mengidentifikasi penyalahgunaan narkoba/klien permasalahannya.
4. Mendampingi dan memberikan dukungan kepada penyalahguna narkoba/klien dengan tingkat resiko rendah melalui intervensi awal.
5. Melakukan rujukan ke layanan kesehatan dan sosial yang dibutuhkan penyalahguna narkoba/klien.
6. Melibatkan dan tingkat penyalahguna dan masyarakat untuk memberikan bantuan dan dukungan kepada penyalahguna narkoba di lingkungan setempat.

7. Melakukan penyebaran informasi terkait pemulihan korban penyalahgunaan narkoba.
8. Menggerakkan masyarakat agar peduli terhadap pemulihan korban penyalahgunaan narkoba.
9. Mengurangi stigma masyarakat terhadap korban penyalahgunaan narkoba.
10. Membentuk jejaring dan kerjasama dengan pihak lain dalam mendukung proses pemulihan korban penyalahgunaan narkoba dan membantu fasilitasi korban penyalahgunaan narkoba mencapai kehidupan yang produktif dan berfungsi secara sosial.

KETIGA

:

Masa tugas Tim Intervensi Berbasis Masyarakat Kelurahan Tegalsari sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terhitung mulai Tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan 31 Desember 2023.

KEEMPAT

:

Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan Kegiatan Tim Intervensi Berbasis Masyarakat Kelurahan Tegalsari dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan Tegalsari Tahun 2023 dan sumber pendapatan lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

KELIMA

:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kelurahan Tegalsari
Pada Tanggal 9 Maret 2023

Lurah Tegalsari



Sri Sukariati, SH.

Penata Tingkat I

NIP. 196503051987032016

LAMPIRAN I KEPUTUSAN LURAH TEGALSARI
NOMOR : 400.7.21.3 / 087 / 436.9.27.4 / 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN IBM KELURAHAN TEGALSARI DAN
PENETAPAN PETUGAS AGEN PEMULIHAN DI KELURAHAN
KELURAHAN TEGALSARI KECAMATAN TEGALSARI KOTA SURABAYA
TAHUN ANGGARAN 2023

SUSUNAN PENGURUS TIM INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT
KELURAHAN TEGALSARI KECAMATAN TEGALSARI KOTA SURABAYA
TAHUN ANGGARAN 2023

- | | | |
|--------------------|---|--|
| I. Pelindung | : | Kepala BNNK Kota Surabaya |
| II. Pembina | : | Lurah Tegalsari |
| III. Ketua Tim | : | Murtiningsih |
| IV. Anggota Tim AP | : | 1. Nur Niayati
2. Aristiyanti
3. Astutik
4. Roestinah |

Ditetapkan di Kelurahan Tegalsari
Pada Tanggal 9 Maret 2023



Sri Sukariati, SH.

Penata Tingkat I

NIP 196503051987032016



**KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR: KEP/ 121 /I/DE/RH.03/2023/BNN**

**TENTANG
PENETAPAN LEMBAGA REHABILITASI BAGI PECANDU DAN
KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MILIK PEMERINTAH DAN MASYARAKAT
DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN REHABILITASI BERKELANJUTAN**

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 70 huruf d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Badan Narkotika Nasional mempunyai tugas meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika milik pemerintah dan masyarakat;
 - b. bahwa Badan Narkotika Nasional berupaya untuk meningkatkan ketersediaan layanan rehabilitasi, salah satunya yaitu dengan memberdayakan dan mengoptimalkan kemampuan lembaga rehabilitasi milik pemerintah dan masyarakat dengan memberikan peningkatan kemampuan, agar dapat menyelenggarakan layanan rehabilitasi berkelanjutan yang sesuai dengan standar rehabilitasi yang ditentukan;
 - c. bahwa Badan Narkotika Nasional berupaya memberikan penguatan, dorongan, atau fasilitasi kepada lembaga rehabilitasi milik pemerintah dan masyarakat untuk mampu menyelenggarakan layanan rehabilitasi berkelanjutan sesuai standar rehabilitasi yang ditentukan agar terjaga keberlangsungannya;

/ d. bahwa...

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Penetapan Lembaga Rehabilitasi Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Milik Pemerintah dan Masyarakat Dalam Rangka Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan Tahun Anggaran 2023.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Lapori;
4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial;
5. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 618 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Nasional Indonesia 8807:2019 Penyelenggara Layanan Rehabilitasi Bagi Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (Napza);
6. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 03 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 288);
7. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 06 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan;
8. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: KEP/57/II/KA/RH/2019/BNN tentang Pendelegasian Penandatanganan Berkas Perjanjian Kerjasama dan Keputusan Kepala Terkait Peningkatan Kemampuan Kepada Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika;

/9.Program

9. Program Kerja Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG PENETAPAN LEMBAGA REHABILITASI MILIK PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN REHABILITASI BERKELANJUTAN TAHUN ANGGARAN 2023.**

- KESATU : Menetapkan lembaga yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai lembaga bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika milik pemerintah dan masyarakat untuk memperoleh peningkatan kemampuan dalam bentuk antara lain pembinaan dan bimbingan teknis, peningkatan keterampilan atau kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan peningkatan mutu layanan, terhitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2023.
- KEDUA : Lembaga rehabilitasi milik pemerintah dan masyarakat yang memperoleh peningkatan kemampuan mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BNN dan Lembaga Rehabilitasi.
- KETIGA : Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan peningkatan kemampuan kepada lembaga rehabilitasi milik pemerintah dan masyarakat mengacu pada Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 06 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan.
- KEEMPAT : Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Keputusan ini dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Provinsi, dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

/KELIMA...

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dengan catatan:

Bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala BNN
2. Sekretaris Utama BNN
3. Inspektur Utama BNN
4. Kepala BNNP/ BNNK/ Kota terkait
5. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 20 Januari 2023

a.n. ~~KEPALA~~ **BADAN NARKOTIKA NASIONAL**
DEPUTI REHABILITASI



Dra. Riza Sarasvita, M.Si, MHS, Ph.D

**DAFTAR LEMBAGA REHABILITASI BAGI PECANDU DAN KORBAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MILIK PEMERINTAH DAN MASYARAKAT
DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN REHABILITASI BERKELANJUTAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	PROVINSI	BNNP/KAB/KOTA	NAMA INSTANSI/ LEMBAGA
1	Aceh	BNN Kabupaten Aceh Selatan	Puskesmas Blang Kejeren
2	Aceh	BNN Kabupaten Aceh Selatan	Puskesmas Lhok Bengkuang
3	Aceh	BNN Kabupaten Aceh Tamiang	Klinik Dr. Zuhaini
4	Aceh	BNN Kabupaten Aceh Tamiang	Klinik Bina Assyifa
5	Aceh	BNN Kabupaten Gayo Lues	Puskesmas Kecamatan Blang Jeurangoe
6	Aceh	BNN Kabupaten Pidie	Puskesmas Kembang Tanjung
7	Aceh	BNN Kabupaten Pidie Jaya	Puskesmas Trienggadeng
8	Aceh	BNN Kota Banda Aceh	Yayasan Al-Fatha
9	Aceh	BNN Kota Banda Aceh	Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh
10	Aceh	BNN Kota Banda Aceh	Yayasan Seuramoe Mulya Aceh
11	Aceh	BNN Kota Banda Aceh	Yayasan Pintu Hijrah (SIRAH)
12	Aceh	BNN Kota Langsa	RS Cut Nyak Dhien Langsa
13	Aceh	BNN Kota Langsa	Klinik Azkia
14	Aceh	BNN Kota Langsa	Klinik Sahabat
15	Aceh	BNN Kota Langsa	Klinik Rajawali Medika
16	Aceh	BNN Kota Lhokseumawe	Yayasan Permata Aceh Peduli (YPAP)
17	Aceh	BNN Kota Lhokseumawe	Puskesmas Banda Sakti
18	Aceh	BNN Kota Lhokseumawe	Puskesmas Mon Geudong
19	Aceh	BNN Kota Lhokseumawe	Darul Mukminin
20	Aceh	BNN Kabupaten Bireuen	UPTD PKM Gandapura
21	Aceh	BNN Kabupaten Bireuen	Klinik Ka Tiga Kuta Blang
22	Aceh	BNN Kabupaten Bireuen	Klinik Dokkes Polres Bireuen
23	Aceh	BNNP Aceh	Rumah Sakit Jiwa
24	Aceh	BNNP Aceh	Puskesmas Darul Imarah
25	Aceh	BNNP Aceh	Puskesmas Baitussalam
26	Aceh	BNNP Aceh	Puskesmas Krueng Barona Jaya
27	Aceh	BNNP Aceh	Yayasan Kayyis Ahsana Aceh
28	Aceh	BNNP Aceh	Yayasan Generasi Emas Aceh
29	Sumatera Utara	BNN Kabupaten Deli Serdang	Rehabilitasi Amelia Sumatera Utara
30	Sumatera Utara	BNN Kabupaten Deli Serdang	Yayasan Bukit Doa Rumahku
31	Sumatera Utara	BNN Kabupaten Deli Serdang	IPWL Pondok Trenkely
32	Sumatera Utara	BNN Kabupaten Deli Serdang	Yayasan Rahmani Kasih
33	Sumatera Utara	BNN Kabupaten Deli Serdang	Yayasan Getsemane
34	Sumatera Utara	BNN Kabupaten Langkat	RSUD Tanjung Pura

NO	PROVINSI	BNNP/KAB/KOTA	NAMA INSTANSI/ LEMBAGA
35	Sumatera Utara	BNN Kabupaten Mandailing Natal	RSUD Panyabungan
36	Sumatera Utara	BNN Kabupaten Serdang Bedagai	Puskesmas Tanjung Beringin
37	Sumatera Utara	BNN Kabupaten Serdang Bedagai	Yayasan Rehabilitasi Narkotika Jopan
38	Sumatera Utara	BNN Kabupaten Serdang Bedagai	Yayasan Cahaya Hati Kemanusiaan
39	Sumatera Utara	BNN Kabupaten Simalungun	Yayasan Keris Sakti
40	Sumatera Utara	BNN Kota Binjai	Yayasan Mutiara Abadi Binjai
41	Sumatera Utara	BNN Kota Binjai	Yayasan Rumah Sehat Harapan
42	Sumatera Utara	BNN Kota Gunung Sitoli	Yayasan Haga Christ
43	Sumatera Utara	BNN Kota Pematang Siantar	Yayasan Rehabilitasi Mercusuar Doa
44	Sumatera Utara	BNN Kota Tanjungbalai	Asia Treatment Centre (ATC)
45	Sumatera Utara	BNN Kota Tanjungbalai	Puskesmas Kampung Persatuan
46	Sumatera Utara	BNN Kabupaten Asahan	Yayasan Amanah Nusantara Bersinar
47	Sumatera Utara	BNN Kabupaten Labuhan Batu Utara	Yayasan Cahaya Putra Selatan - Rumah Mahira Kota Pinang
48	Sumatera Utara	BNN Kabupaten Simalungun	Yayasan Sungai Jordan Kasih
49	Sumatera Utara	BNN Kabupaten Simalungun	Yayasan Pemulihan Kasih Bangsa
50	Sumatera Utara	BNNP Sumatera Utara	Yayasan Sibolangit Centre
51	Sumatera Utara	BNNP Sumatera Utara	Peka Medan
52	Sumatera Utara	BNNP Sumatera Utara	Pusat Rehabilitasi Korban Narkotika Mari Indonesia Bersinar
53	Sumatera Utara	BNNP Sumatera Utara	Yayasan Mitra Masyarakat Sehat
54	Sumatera Utara	BNNP Sumatera Utara	Lembaga Rehabilitasi Pencegahan Penyalahguna Narkotika Bhayangkara Indonesia (LRPPN BI)
55	Sumatera Utara	BNNP Sumatera Utara	Fokus Rehabilitasi Narkotika Indonesia
56	Sumatera Utara	BNNP Sumatera Utara	Pusat Rehabsos Bahri Nusantara (BANTARA)
57	Sumatera Utara	BNNP Sumatera Utara	Rumah Sakit Jiwa Prof Dr Muhammad Ildrem
58	Sumatera Utara	BNNP Sumatera Utara	Yayasan Nazar
59	Sumatera Utara	BNNP Sumatera Utara	Yayasan RSJ Mahoni
60	Sumatera Utara	BNNP Sumatera Utara	Yayasan Kasih Hati Dan Pikiran
61	Sumatera Utara	BNNP Sumatera Utara	Yayasan Eka Darma Bakti (74gana Center)
62	Sumatera Utara	BNNP Sumatera Utara	Yayasan Medan Plus
63	Sumatera Utara	BNNP Sumatera Utara	Yayasan RSU Bandung
64	Sumatera Utara	BNNP Sumatera Utara	Yayasan Caritas PSE
65	Sumatera Utara	BNNP Sumatera Utara	Puskesmas Bromo
66	Sumatera Utara	BNNP Sumatera Utara	Rs TNI Al Dr. Komang Makes Belawan
67	Sumatera Utara	BNNP Sumatera Utara	Puskesmas Glugur Darat
68	Sumatera Utara	BNNP Sumatera Utara	Puskesmas Teladan
69	Sumatera Utara	BNNP Sumatera Utara	Puskesmas Padangbulan
70	Sumatera Utara	BNNP Sumatera Utara	Yayasan Santu Yosef "Rumah Kita"

NO	PROVINSI	BNNP/KAB/KOTA	NAMA INSTANSI/ LEMBAGA
71	Sumatera Barat	BNN Kabupaten Pasaman Barat	Klinik Arisha
72	Sumatera Barat	BNN Kabupaten Solok	Puskesmas Singkarak
73	Sumatera Barat	BNN Kabupaten Solok	Puskesmas Alahan Panjang
74	Sumatera Barat	BNN Kota Payakumbuh	Puskesmas Tanjung Pati
75	Sumatera Barat	BNN Kota Payakumbuh	Yayasan Generasi Muda Payakumbuh
76	Sumatera Barat	BNN Kota Payakumbuh	Puskesmas Payolansek
77	Sumatera Barat	BNN Kota Sawahlunto	RSUD Sawahlunto
78	Sumatera Barat	BNN Kota Sawahlunto	RSI Silungkang
79	Sumatera Barat	BNNP Sumatera Barat	Puskesmas Tigo Baleh
80	Sumatera Barat	BNNP Sumatera Barat	Puskesmas Pasar Usang
81	Sumatera Barat	BNNP Sumatera Barat	Puskesmas Gunung
82	Sumatera Barat	BNNP Sumatera Barat	Yayasan Karunia Insani
83	Sumatera Barat	BNNP Sumatera Barat	Klinik Intan Sari
84	Sumatera Barat	BNNP Sumatera Barat	Klinik Aisyah
85	Bangka Belitung	BNN Kabupaten Bangka	IPWL Puskesmas Pemali Babel
86	Bangka Belitung	BNN Kabupaten Bangka	Puskesmas Sinar Baru
87	Bangka Belitung	BNN Kabupaten Bangka	IPWL Dharma Wahyu Insani Bangka Belitung
88	Bangka Belitung	BNN Kabupaten Bangka	Yayasan Pendaki Sehati Bangka Belitung
89	Bangka Belitung	BNN Kabupaten Bangka	Puskesmas Sungailiat
90	Bangka Belitung	BNN Kabupaten Bangka Selatan	Puskesmas Tiram
91	Bangka Belitung	BNN Kabupaten Bangka Selatan	UPT Puskesmas Toboali
92	Bangka Belitung	BNN Kabupaten Bangka Selatan	UPT Puskesmas Air Gegas
93	Bangka Belitung	BNN Kabupaten Bangka Selatan	Klinik Suci Medika
94	Bangka Belitung	BNN Kabupaten Belitung	UPT Puskesmas Air Saga
95	Bangka Belitung	BNN Kabupaten Belitung	UPT Puskesmas Tanjung Binga
96	Bangka Belitung	BNN Kabupaten Belitung	UPT Puskesmas Badau
97	Bangka Belitung	BNN Kabupaten Belitung	Klinik Bakti Timah Tanjung Pandan
98	Bangka Belitung	BNN Kota Pangkal Pinang	UPTD Puskesmas Tamansari
99	Bangka Belitung	BNN Kota Pangkal Pinang	UPTD Puskesmas Pangkalbalam
100	Bangka Belitung	BNN Kota Pangkal Pinang	UPT Puskesmas Rias
101	Bangka Belitung	BNN Kota Pangkal Pinang	UPTD Puskesmas Gerunggang
102	Bangka Belitung	BNN Kota Pangkal Pinang	Puskesmas Melintang
103	Bangka Belitung	BNNP Bangka Belitung	Puskesmas Namang
104	Bangka Belitung	BNNP Bangka Belitung	Puskesmas Kelapa Kampit
105	Bangka Belitung	BNNP Bangka Belitung	Puskesmas Muntok
106	Bangka Belitung	BNNP Bangka Belitung	Puskesmas Tempilang
107	Bangka Belitung	BNNP Bangka Belitung	UPTD Rumah Sakit Jiwa Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
108	Bangka Belitung	BNNP Bangka Belitung	UPTD Puskesmas Perlang
109	Bangka Belitung	BNNP Bangka Belitung	Puskesmas Petaling

NO	PROVINSI	BNNP/KAB/KOTA	NAMA INSTANSI/ LEMBAGA
110	Bangka Belitung	BNNP Bangka Belitung	Puskesmas Kacang Pedang
111	Bangka Belitung	BNNP Bangka Belitung	Biddokkes Polda Kep. Bangka Belitung
112	Bangka Belitung	BNNP Bangka Belitung	IPWL Wado Health Care Babel Foundation
113	Bangka Belitung	BNNP Bangka Belitung	Puskesmas Pasir Putih
114	Bangka Belitung	BNNP Bangka Belitung	Puskesmas Baturusa
115	Bangka Belitung	BNNP Bangka Belitung	UPTD Puskesmas Sungai Selan
116	Bangka Belitung	BNNP Bangka Belitung	Puskesmas Kelapa
117	Bangka Belitung	BNNP Bangka Belitung	UPT Puskesmas Perawas
118	Bangka Belitung	BNNP Bangka Belitung	UPTD Puskesmas Lubuk Besar
119	Bangka Belitung	BNNP Bangka Belitung	UPTD Puskesmas Koba
120	Bangka Belitung	BNNP Bangka Belitung	UPTD RSUD Depati Hamzah Pangkalpinang
121	Bangka Belitung	BNNP Bangka Belitung	UPTD Puskesmas Air Itam
122	Bangka Belitung	BNNP Bangka Belitung	Puskesmas Benteng
123	Bangka Belitung	BNNP Bangka Belitung	Lapas Narkotika Kelas II A Pangkalpinang
124	Kepulauan Riau	BNN Kabupaten Karimun	RSUD Muhammad Sani
125	Kepulauan Riau	BNN Kota Batam	Klinik Global Medical Centre
126	Kepulauan Riau	BNN Kota Tanjung Pinang	Kimia Farma 109
127	Kepulauan Riau	BNN Kota Tanjung Pinang	Yayasan Karsa Tanjung Pinang
128	Kepulauan Riau	BNNP Kepulauan Riau	Yayasan Eka Kapti Abhipraya
129	Kepulauan Riau	BNNP Kepulauan Riau	Lapas Kelas IIA Tanjung Pinang
130	Kepulauan Riau	BNNP Kepulauan Riau	Lapas Narkotika Kelas IIA Tanjung Pinang
131	Riau	BNN Kota Pekanbaru	Yayasan Siklus
132	Riau	BNN Kota Pekanbaru	IPWL Yayasan Rumah Solid
133	Riau	BNN Kota Pekanbaru	Yayasan Sarasehan
134	Riau	BNN Kota Pekanbaru	Yayasan Satu Bumi
135	Riau	BNN Kota Pekanbaru	Rumah Rehab Geliat Pelangi Nusantara
136	Riau	BNN Kota Dumai	Yayasan Gemuni Cabang Dumai
137	Riau	BNNP Riau	Rehabilitasi Narkotika Quranic Healing Indonesia
138	Riau	BNNP Riau	IPWL Perawang
139	Riau	BNNP Riau	RSJ Tampian Provinsi Riau
140	Riau	BNNP Riau	RSUD Rokan Hulu
141	Riau	BNNP Riau	Rumah Aman Napza TB Satu Riau
142	Riau	BNNP Riau	IPWL Mercusuar Riau
143	Riau	BNNP Riau	Yayasan Gemuni
144	Riau	BNNP Riau	Bapas Kelas II Pekanbaru
145	Bengkulu	BNN Kabupaten Bengkulu Selatan	RSUD Hasanuddin Damrah Manna
146	Bengkulu	BNN Kota Bengkulu	PKM Padang Serai
147	Bengkulu	BNNP Bengkulu	IPWL Dharma Wahyu Insani Bengkulu
148	Bengkulu	BNNP Bengkulu	Yayasan Kantong Informasi Pemberdayaan Kesehatan Adiksi Kota Bengkulu
149	Bengkulu	BNNP Bengkulu	Yayasan Karunia Insani Female

NO	PROVINSI	BNNP/KAB/KOTA	NAMA INSTANSI/ LEMBAGA
150	Bengkulu	BNNP Bengkulu	Yayasan Peduli Sosial Nasional (Pesona)
151	Bengkulu	BNNP Bengkulu	RSUD Bhayangkara
152	Bengkulu	BNNP Bengkulu	RSUD Kepahiang
153	Bengkulu	BNNP Bengkulu	RSKJ Soeprpto
154	Bengkulu	BNNP Bengkulu	PKM Anggut
155	Bengkulu	BNNP Bengkulu	PKM Pasar Kepahiang
156	Bengkulu	BNNP Bengkulu	PKM Basuki Rahmat
157	Bengkulu	BNNP Bengkulu	PKM Pasar Ikan
158	Jambi	BNN Kabupaten Batang Hari	RS Mitra Medika Batang Hari
159	Jambi	BNN Kabupaten Batang Hari	Yayasan Lembaga Para Sahabat
160	Jambi	BNN Kabupaten Batang Hari	UPT Puskesmas Durian Luncuk
161	Jambi	BNN Kabupaten Batang Hari	UPT Puskesmas Jembatan Mas
162	Jambi	BNN Kabupaten Batang Hari	UPT Puskesmas Mersam
163	Jambi	BNN Kabupaten Batang Hari	UPT Puskesmas Sungai Rengas
164	Jambi	BNN Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Puskesmas Rawat Inap Simpang Pandan
165	Jambi	BNN Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Puskesmas Rawat Inap Kampung Laut
166	Jambi	BNN Kota Jambi	Kanti Sehati Sejati Jambi
167	Jambi	BNN Kota Jambi	UPTD Puskesmas Tanjung Pinang
168	Jambi	BNNP Jambi	Yayasan Sahabat Jambi
169	Jambi	BNNP Jambi	RS Jiwa Daerah Jambi
170	Jambi	BNNP Jambi	Instalasi Rehabilitasi Ketergantungan Napza RSUD Prof. Dr. H.M. Chatib Quzwain Sarolangun
171	Jambi	BNNP Jambi	IPWL Al Jannah
172	Jambi	BNNP Jambi	Yayasan Karunia Insani
173	Sumatera Selatan	BNN Kabupaten Muara Enim	Yayasan Cahaya Kusuma Bangsa Rumah Antara
174	Sumatera Selatan	BNN Kabupaten Musi Rawas	Yayasan Karunia Insani Musi Rawas
175	Sumatera Selatan	BNN Kabupaten Musi Rawas	Lapas Narkotika Kelas II A Muara Beliti
176	Sumatera Selatan	BNN Kabupaten Musi Rawas	Puskesmas L. Sidoharjo
177	Sumatera Selatan	BNN Kabupaten Ogan Ilir	Klinik Pondok Pesantren Al Ittifaqiyah
178	Sumatera Selatan	BNN Kabupaten Ogan Ilir	Yayasan Cahaya Putra Tunggal
179	Sumatera Selatan	BNN Kabupaten Ogan Komering Ilir	Yayasan Cahaya Putra Selatan - Ogan Komering Ilir
180	Sumatera Selatan	BNN Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	Yayasan Bina Sriwijaya Persada
181	Sumatera Selatan	BNN Kota Lubuk Linggau	Yayasan Karunia Insani Lubuk Linggau
182	Sumatera Selatan	BNN Kota Lubuk Linggau	PKM Simpang Periuk
183	Sumatera Selatan	BNN Kota Lubuk Linggau	Puskesmas Citra Medika
184	Sumatera Selatan	BNN Kota Pagar Alam	Yayasan Bersama Kita Bisa
185	Sumatera Selatan	BNN Kota Prabumulih	Yayasan Bina Sriwijaya Persada Rumah Pemulihan Prabumulih
186	Sumatera Selatan	BNNP Sumatera Selatan	Yayasan Mitra Mulia "Musi Bersinar"
187	Sumatera Selatan	BNNP Sumatera Selatan	Yayasan Dharma Wahyu Insani

NO	PROVINSI	BNNP/KAB/KOTA	NAMA INSTANSI/ LEMBAGA
188	Sumatera Selatan	BNNP Sumatera Selatan	Yayasan Ar Rahman
189	Sumatera Selatan	BNNP Sumatera Selatan	Yayasan Cahaya Putra Selatan
190	Sumatera Selatan	BNNP Sumatera Selatan	Yayasan Mitra Mulia Banyuasin
191	Sumatera Selatan	BNNP Sumatera Selatan	Rumah Sakit Ernaldi Bahar
192	Sumatera Selatan	BNNP Sumatera Selatan	IPWL Puskesmas Kertapati
193	Sumatera Selatan	BNNP Sumatera Selatan	Puskesmas Boom Baru
194	Sumatera Selatan	BNNP Sumatera Selatan	Yayasan Cahaya Putra Selatan - Rumah Kita Sekayu
195	Sumatera Selatan	BNNP Sumatera Selatan	Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Banyuasin
196	Sumatera Selatan	BNNP Sumatera Selatan	Lapas Perempuan Kelas II A Palembang
197	Sumatera Selatan	BNNP Sumatera Selatan	Lapas Kelas I Palembang
198	Lampung	BNN Kabupaten Way Kanan	Yayasan Rehabilitasi Alza Bersinar Way Kanan
199	Lampung	BNNP Lampung	Waruga Djaya Sampurna (Waras Foundation)
200	Lampung	BNNP Lampung	Rumah Rehabilitasi House Of Serenity
201	Lampung	BNNP Lampung	Panti Rehabilitasi Gangguan Jiwa Dan Narkoba Wisma Ataraxis
202	Lampung	BNNP Lampung	RSJ Daerah Lampung
203	Lampung	BNNP Lampung	RSUD. Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung
204	Lampung	BNNP Lampung	Yayasan Sinar Jati
205	Lampung	BNNP Lampung	RSUD Pringsewu
206	Lampung	BNNP Lampung	RSUD Ahmad Yani
207	Lampung	BNNP Lampung	Puskesmas Simpur
208	Lampung	BNNP Lampung	RSUD. Bandar Negara Husada
209	Lampung	BNNP Lampung	Puskesmas Gedong Air
210	Lampung	BNNP Lampung	RS.Panti Secanti
211	Lampung	BNNP Lampung	Lapas Narkotika Kls IIA
212	Lampung	BNNP Lampung	Lapas Wanita
213	Banten	BNN Kota Cilegon	Klinik Tazkiyah
214	Banten	BNN Kota Cilegon	RSIA Mutiara Bunda
215	Banten	BNN Kota Tangerang	Puskesmas Jalan Emas
216	Banten	BNN Kota Tangerang	Puskesmas Cipondoh
217	Banten	BNN Kota Tangerang	Yasibara
218	Banten	BNN Kota Tangerang	Bersama Kita Berkarya (Berkibar)
219	Banten	BNN Kota Tangerang	Puskesmas Cibodasari
220	Banten	BNN Kota Tangerang	UPT LP Kelas IIA Pemuda
221	Banten	BNN Kota Tangerang	UPT LP Kelas I Tangerang
222	Banten	BNN Kota Tangerang	UPT LPP Kelas IIA Tangerang
223	Banten	BNN Kota Tangerang Selatan	Galigo Institute
224	Banten	BNN Kota Tangerang Selatan	Puskesmas Ciputat
225	Banten	BNN Kota Tangerang Selatan	Yayasan Matahati Adiksi Indonesia
226	Banten	BNNP Banten	Bani Syifa
227	Banten	BNNP Banten	Yayasan Assifa Amalindo Pratama
228	Banten	BNNP Banten	Yayasan Sakinah Harakah Bhakti (Sahabat)
229	Banten	BNNP Banten	Lapas Kelas IIA Serang

NO	PROVINSI	BNNP/KAB/KOTA	NAMA INSTANSI/ LEMBAGA
230	Banten	BNNP Banten	Lapas Kelas IIA Cilegon
231	Banten	BNNP Banten	Rutan Kelas IIB Serang
232	Banten	BNNP Banten	Bapas Serang
233	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Selatan	Yayasan Cakra Sehati
234	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Selatan	Yayasan Mutiara Maharani
235	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta timur	Yayasan Balarenik
236	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta timur	Rumah Karitas Sani Madani
237	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta timur	Yayasan Kelima Mandiri
238	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta timur	Madani Mental Health Care
239	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Utara	Yayasan Emas Pengharapan Indonesia
240	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Utara	Klinik Sisma Medika
241	DKI Jakarta	BNNP DKI Jakarta	Puskesmas Kecamatan Kramat Jati
242	DKI Jakarta	BNNP DKI Jakarta	Puskesmas Kecamatan Tambora
243	DKI Jakarta	BNNP DKI Jakarta	Puskesmas Kecamatan Gambir
244	DKI Jakarta	BNNP DKI Jakarta	Puskesmas Kecamatan Jatinegara
245	DKI Jakarta	BNNP DKI Jakarta	Puskesmas Kelurahan Ancol
246	DKI Jakarta	BNNP DKI Jakarta	Puskesmas Kecamatan Cengkareng
247	DKI Jakarta	BNNP DKI Jakarta	Puskesmas Kecamatan Cilandak
248	DKI Jakarta	BNNP DKI Jakarta	Puskesmas Kecamatan Kelapa Gading
249	DKI Jakarta	BNNP DKI Jakarta	Puskesmas Kepulauan Seribu Selatan
250	DKI Jakarta	BNNP DKI Jakarta	Puskesmas Kecamatan Senen
251	DKI Jakarta	BNNP DKI Jakarta	Puskesmas Kecamatan Duren Sawit
252	DKI Jakarta	BNNP DKI Jakarta	Puskesmas Kecamatan Grogol Petamburan
253	DKI Jakarta	BNNP DKI Jakarta	Puskesmas Kecamatan Johar Baru
254	DKI Jakarta	BNNP DKI Jakarta	RSKD Duren Sawit
255	DKI Jakarta	BNNP DKI Jakarta	RSUD Kemayoran
256	DKI Jakarta	BNNP DKI Jakarta	Puskesmas Kecamatan Tanjung Priok
257	DKI Jakarta	BNNP DKI Jakarta	Yayasan Kasih Mulia
258	DKI Jakarta	BNNP DKI Jakarta	Yayasan Tri Ananta Sagraha Sadu (Tritarasa)
259	DKI Jakarta	BNNP DKI Jakarta	Puskesmas Kecamatan Palmerah
260	DKI Jakarta	BNNP DKI Jakarta	BLUD Puskesmas Kecamatan Penjaringan
261	Jawa Barat	BNN Kabupaten Bogor	Yayasan Bersama Kita Pulih
262	Jawa Barat	BNN Kabupaten Bogor	Yayasan Harapan Permata Hati Kita
263	Jawa Barat	BNN Kabupaten Bogor	Yayasan Rumah Asa Anak Bangsa
264	Jawa Barat	BNN Kabupaten Bogor	Yayasan Pelayanan Agape
265	Jawa Barat	BNN Kabupaten Bogor	Yayasan Breakthrough Missions Indonesia
266	Jawa Barat	BNN Kabupaten Bogor	Yayasan Untuk Segala Bangsa (Fan Campus Bogor)
267	Jawa Barat	BNN Kabupaten Bogor	Yayasan Graha Suar Indonesia
268	Jawa Barat	BNN Kabupaten Bogor	Yayasan Kayva Kasih Rehabilitasi

NO	PROVINSI	BNNP/KAB/KOTA	NAMA INSTANSI/ LEMBAGA
269	Jawa Barat	BNN Kabupaten Bogor	Yayasan Lentera Harapan Nusantara
270	Jawa Barat	BNN Kabupaten Ciamis	Yayasan Inabah II Puteri
271	Jawa Barat	BNN Kabupaten Ciamis	Yayasan Serba Bakti Ponpes Suryalaya Putra XVIII
272	Jawa Barat	BNN Kabupaten Ciamis	Yayasan Ar Rahmaniyyah
273	Jawa Barat	BNN Kabupaten Cianjur	Yayasan Pengasih Insan Karima
274	Jawa Barat	BNN Kabupaten Cianjur	Galigo Institute
275	Jawa Barat	BNN Kabupaten Cianjur	Yayasan Penuai Indonesia
276	Jawa Barat	BNN Kabupaten Cianjur	LKS Societa Indonesia
277	Jawa Barat	BNN Kabupaten Garut	Cahaya Nusantara Yumadani
278	Jawa Barat	BNN Kabupaten Garut	Inabah 14 Garut
279	Jawa Barat	BNN Kabupaten Garut	Puskesmas Cipanas Garut
280	Jawa Barat	BNN Kabupaten Karawang	Puskesmas Karawang
281	Jawa Barat	BNN Kabupaten Karawang	RS Islam Karawang
282	Jawa Barat	BNN Kabupaten Karawang	RS Izza
283	Jawa Barat	BNN Kabupaten Karawang	RSUD Karawang
284	Jawa Barat	BNN Kabupaten Kuningan	Yayasan Rumah Tenjo Laut Rutela
285	Jawa Barat	BNN Kabupaten Kuningan	Cipta Wening
286	Jawa Barat	BNN Kabupaten Sukabumi	Yayasan Lensa Bhineka Nusantara
287	Jawa Barat	BNN Kabupaten Sukabumi	Yayasan Rehab Korban Narkoba
288	Jawa Barat	BNN Kabupaten Sukabumi	Yayasan Cakra Sehati Sukabumi
289	Jawa Barat	BNN Kabupaten Sumedang	Pradita Madani Cempaka Cabang
290	Jawa Barat	BNN Kabupaten Sumedang	Klinik Utama Sehat Mulia
291	Jawa Barat	BNN Kota Bandung	Yayasan Lingkar Nadi Bumi
292	Jawa Barat	BNN Kota Bandung	Sekar Mawar
293	Jawa Barat	BNN Kota Bandung	UPTD Puskesmas Salam
294	Jawa Barat	BNN Kota Bandung	UPTD Puskesmas Margahayu Raya
295	Jawa Barat	BNN Kota Bandung	UPTD Puskesmas Babakan Sari
296	Jawa Barat	BNN Kota Bandung	UPTD Puskesmas Cibiru
297	Jawa Barat	BNN Kota Bandung	UPTD Puskesmas Cibuntu
298	Jawa Barat	BNN Kota Bandung	UPTD Puskesmas Cinambo
299	Jawa Barat	BNN Kota Bandung	UPTD Puskesmas Ibrahim Adjie
300	Jawa Barat	BNN Kota Bandung	UPTD Puskesmas Kopo
301	Jawa Barat	BNN Kota Bandung	UPTD Puskesmas Kujang Sari
302	Jawa Barat	BNN Kota Bandung	UPTD Puskesmas Pasirkaliki
303	Jawa Barat	BNN Kota Bandung	UPTD Puskesmas Sarijadi
304	Jawa Barat	BNN Kota Bandung	UPTD Puskesmas Sukarasa
305	Jawa Barat	BNN Kota Bandung	UPTD Puskesmas Tamansari
306	Jawa Barat	BNN Kota Bandung	UPTD Puskesmas Ujung Berung Indah
307	Jawa Barat	BNN Kota Bandung	UPT Puskesmas Cipamokolan
308	Jawa Barat	BNN Kota Bandung	UPT Puskesmas Babatan
309	Jawa Barat	BNN Kota Bandung	UPT Puskesmas Griya Antapani
310	Jawa Barat	BNN Kota Bandung	Lik Sadulur
311	Jawa Barat	BNNK Bandung Barat	Puskesmas Jayagiri
312	Jawa Barat	BNN Kota Cimahi	RS Mitra Anugerah Lestari
313	Jawa Barat	BNN Kota Cimahi	RSUD Cibabat Cimahi

NO	PROVINSI	BNNP/KAB/KOTA	NAMA INSTANSI/ LEMBAGA
314	Jawa Barat	BNN Kota Cimahi	Yayasan Pambudi Luhur 1976
315	Jawa Barat	BNN Kota Cimahi	Yayasan Rumah Pemulihan Dinamika
316	Jawa Barat	BNN Kota Cirebon	UPT Puskesmas Kejaksan
317	Jawa Barat	BNN Kota Cirebon	UPT Puskesmas Drajat
318	Jawa Barat	BNN Kota Cirebon	UPT Puskesmas Jagasatru
319	Jawa Barat	BNN Kota Cirebon	UPT Puskesmas Cangkol
320	Jawa Barat	BNN Kota Cirebon	UPT Puskesmas Kesunean
321	Jawa Barat	BNN Kota Cirebon	UPT Puskesmas Gunung Sari
322	Jawa Barat	BNN Kota Cirebon	UPT Puskesmas Pulasaren
323	Jawa Barat	BNN Kota Cirebon	Yayasan Bina Insan Mandiri
324	Jawa Barat	BNN Kota Depok	LSM Yafuz Etpaf Indonesia
325	Jawa Barat	BNN Kota Depok	Rutan Kelas I Depok
326	Jawa Barat	BNN Kota Tasikmalaya	UPTD Puskesmas Kahuripan
327	Jawa Barat	BNN Kota Tasikmalaya	UPTD Puskesmas Cilembang
328	Jawa Barat	BNN Kota Tasikmalaya	UPTD Puskesmas Cihideung
329	Jawa Barat	BNN Kota Tasikmalaya	Inabah XXVII
330	Jawa Barat	BNNP Jawa Barat	Yayasan Katarsis Sarasati Edukasi
331	Jawa Barat	BNNP Jawa Barat	Klinik Utama Rawat Inap Jiwa Karya Sehat Nusantara
332	Jawa Barat	BNNP Jawa Barat	Yayasan Ponpes Nurul Jannah At Taubah
333	Jawa Barat	BNNP Jawa Barat	Yayasan l'anatul Barokah Pondok Ilir Ilir
334	Jawa Barat	BNNP Jawa Barat	Yayasan Graha Prima Karya Sejahtera
335	Jawa Barat	BNNP Jawa Barat	Yayasan Peduli Kasih Bekasi
336	Jawa Barat	BNNP Jawa Barat	Lapas Narkotika Klas IIA Kabupaten Bandung
337	Jawa Barat	BNNP Jawa Barat	Yayasan Penta Cipta Sanggraha
338	Jawa Barat	BNNP Jawa Barat	UPT Puskesmas Kasokandel
339	Jawa Barat	BNNP Jawa Barat	UPT Puskesmas Malausma
340	Jawa Barat	BNNP Jawa Barat	Yayasan Rehab Korban Narkoba Bekasi
341	Jawa Barat	BNNP Jawa Barat	Yayasan Pradita Madani Cempaka Cirebon
342	Jawa Barat	BNNP Jawa Barat	RSJ Provinsi Jawa Barat
343	DI Yogyakarta	BNN Kabupaten Bantul	RS Nur Hidayah
344	DI Yogyakarta	BNN Kabupaten Bantul	RSUD Panembahan Senopati
345	DI Yogyakarta	BNN Kabupaten Bantul	Puskesmas Kasihan 2
346	DI Yogyakarta	BNN Kabupaten Bantul	Yayasan Anugerah Tuhan Hafara
347	DI Yogyakarta	BNN Kabupaten Sleman	PABM Nawacita
348	DI Yogyakarta	BNN Kabupaten Sleman	Pondok Pesantren Bidayatussalikin
349	DI Yogyakarta	BNN Kabupaten Sleman	RSUD Sleman
350	DI Yogyakarta	BNN Kabupaten Sleman	RSU Mitra Paramedika
351	DI Yogyakarta	BNN Kabupaten Sleman	Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta
352	DI Yogyakarta	BNN Kabupaten Sleman	RS Condongcatur
353	DI Yogyakarta	BNN Kota Yogyakarta	RS Bethesda
354	DI Yogyakarta	BNN Kota Yogyakarta	Puskesmas Mergangsan

NO	PROVINSI	BNNP/KAB/KOTA	NAMA INSTANSI/ LEMBAGA
355	DI Yogyakarta	BNN Kota Yogyakarta	Puskesmas Gondomanan
356	DI Yogyakarta	BNN Kota Yogyakarta	Puskesmas Tegalrejo
357	DI Yogyakarta	BNN Kota Yogyakarta	RSK Puri Nirmala
358	DI Yogyakarta	BNNP DI Yogyakarta	IPWL Pondok Pemulihan Elkana
359	DI Yogyakarta	BNNP DI Yogyakarta	Pondok Pesantren Al Islamy
360	DI Yogyakarta	BNNP DI Yogyakarta	Yayasan Indocharis
361	DI Yogyakarta	BNNP DI Yogyakarta	IPWL Griya Pemulihan Siloam Yogyakarta
362	DI Yogyakarta	BNNP DI Yogyakarta	Yayasan Rehabilitasi Kunci
363	DI Yogyakarta	BNNP DI Yogyakarta	RSUD Wates
364	DI Yogyakarta	BNNP DI Yogyakarta	RSUD Kota Yogyakarta
365	DI Yogyakarta	BNNP DI Yogyakarta	RSPAU Dr. S. Hardjolukito
366	DI Yogyakarta	BNNP DI Yogyakarta	RSUD Wonosari
367	Jawa Tengah	BNN Kabupaten Banyumas	Panti Rehabilitasi Narkoba Nurul Hikmah
368	Jawa Tengah	BNN Kabupaten Banyumas	Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza "Satria" Batu Raden
369	Jawa Tengah	BNN Kabupaten Banyumas	RSUD Prof. Dr.Margono Soekarjo
370	Jawa Tengah	BNN Kabupaten Banyumas	RSUD Banyumas
371	Jawa Tengah	BNN Kabupaten Banyumas	RSU Siaga Medika Banyumas
372	Jawa Tengah	BNN Kabupaten Batang	Rs. H.A Zaky Djunaid
373	Jawa Tengah	BNN Kabupaten Cilacap	Klinik Karlina
374	Jawa Tengah	BNN Kabupaten Cilacap	Klinik Pratama Rawat Inap PKU Muhammadiyah Sampang
375	Jawa Tengah	BNN Kabupaten Cilacap	Yayasan Assalam Cilacap Panti Rehabilitasi Sosial Gangguan Jiwa Dan Narkotika Tambihul Ghofilin
376	Jawa Tengah	BNN Kabupaten Magelang	RS. Aisyiyah Muntilan
377	Jawa Tengah	BNN Kabupaten Magelang	Panti Rehabilitasi Betesda
378	Jawa Tengah	BNN Kabupaten Purbalingga	Yayasan An-Nur Haji Supono
379	Jawa Tengah	BNN Kota Surakarta	Klinik Pratama Imran Medika
380	Jawa Tengah	BNN Kota Surakarta	IPWL Anargya Sober House
381	Jawa Tengah	BNN Kota Surakarta	IPWL Cahaya Kusuma Bangsa
382	Jawa Tengah	BNN Kota Surakarta	RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta
383	Jawa Tengah	BNN Kota Surakarta	RSUD Moewardi
384	Jawa Tengah	BNN Kota Surakarta	RSJD Jiwa Daerah Surakarta
385	Jawa Tengah	BNN Kota Tegal	Yayasan Al Ma'la Cabang Kota Tegal
386	Jawa Tengah	BNN Kota Tegal	Muhamadiyah Aisyah Kota Tegal (Klinik Pratama Aisyah Siti Hajar)
387	Jawa Tengah	BNNK Temanggung	RS PKU Muhammadiyah Temanggung
388	Jawa Tengah	BNNK Temanggung	RSUD Kab. Temanggung
389	Jawa Tengah	BNNP Jawa Tengah	RS Bhayangkara Semarang
390	Jawa Tengah	BNNP Jawa Tengah	Wisma Baladewa, RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang
391	Jawa Tengah	BNNP Jawa Tengah	RSJD Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah

NO	PROVINSI	BNNP/KAB/KOTA	NAMA INSTANSI/ LEMBAGA
392	Jawa Tengah	BNNP Jawa Tengah	RSJD Dr.RM Soedjarwadi
393	Jawa Tengah	BNNP Jawa Tengah	Yayasan Lentera Bangsa Indonesia
394	Jawa Tengah	BNNP Jawa Tengah	Yayasan Cinta Kasih Bangsa Ungaran
395	Jawa Tengah	BNNP Jawa Tengah	Yayasan Rumah Damai
396	Jawa Tengah	BNNP Jawa Tengah	Yayasan At-Tauhid
397	Jawa Tengah	BNNP Jawa Tengah	Maunatul Mubarak
398	Jawa Tengah	BNNP Jawa Tengah	Jati Kusumo (LKS Darul Hakim)
399	Jawa Tengah	BNNP Jawa Tengah	Yayasan Ayodya Mandiri Jepara
400	Jawa Tengah	BNNP Jawa Tengah	Pondok Pemulihan Elkana Semarang
401	Jawa Tengah	BNNP Jawa Tengah	PRS Napza Al-Ma'Laa Grobogan
402	Jawa Tengah	BNNP Jawa Tengah	Puskesmas Karanganyar
403	Jawa Tengah	BNNP Jawa Tengah	Dinas Kesehatan Tentara Gombong Kebumen
404	Jawa Tengah	BNNP Jawa Tengah	Yayasan Cahaya Kusuma Bangsa Semarang
405	Jawa Timur	BNN Kabupaten Blitar	RSU An-Nisaa'
406	Jawa Timur	BNN Kabupaten Gresik	RS Fathma Medika
407	Jawa Timur	BNN Kabupaten Gresik	RSUD Ibnu Sina Kab Gresik
408	Jawa Timur	BNN Kabupaten Gresik	Yayasan Rumah Rehabilitasi Napza Suprisoli
409	Jawa Timur	BNN Kabupaten Lumajang	UPT Puskesmas Klakah
410	Jawa Timur	BNN Kabupaten Lumajang	UPT Puskesmas Jatiroto
411	Jawa Timur	BNN Kabupaten Malang	RSJ Dr. Radjiman Wedyoningrat, Lawang
412	Jawa Timur	BNN Kabupaten Malang	Hayunanto Medical Center
413	Jawa Timur	BNN Kabupaten Pasuruan	RSUD Bangil
414	Jawa Timur	BNN Kabupaten Sidoarjo	Yayasan Rehabilitasi Korban Narkoba (Kobra)
415	Jawa Timur	BNN Kabupaten Sidoarjo	Yayasan Rehabilitasi Sahwahita Nusantara
416	Jawa Timur	BNN Kabupaten Sidoarjo	Yayasan Rumah Merah Putih
417	Jawa Timur	BNN Kabupaten Sidoarjo	Yayasan Ponpes Al Kholiqi
418	Jawa Timur	BNN Kabupaten Sumenep	Puskesmas Dasuk
419	Jawa Timur	BNN Kabupaten Sumenep	Puskesmas Batang-Batang
420	Jawa Timur	BNN Kabupaten Sumenep	Puskesmas Guluk-Guluk
421	Jawa Timur	BNN Kabupaten Tuban	RSUD Dr.R Koesma Kab Tuban
422	Jawa Timur	BNN Kabupaten Tuban	Puskesmas Tuban
423	Jawa Timur	BNN Kabupaten Tuban	Klinik Ar Rochma
424	Jawa Timur	BNN Kabupaten Tulungagung	Trisna Health Voluntary Center
425	Jawa Timur	BNN Kabupaten Tulungagung	Puskesmas Bangunjaya
426	Jawa Timur	BNN Kabupaten Tulungagung	RSUD DR.Iskak
427	Jawa Timur	BNN Kota Batu	Puskesmas Batu
428	Jawa Timur	BNN Kota Batu	Pondok Pemulihan Doulos
429	Jawa Timur	BNN Kota Batu	RSU Karsa Husada
430	Jawa Timur	BNN Kota Kediri	Eklesia Kediri Foundation
431	Jawa Timur	BNN Kota Malang	Pusat Rehabilitasi Napza RSUD Dr.Saiful Anwar Malang (RSSA)

NO	PROVINSI	BNNP/KAB/KOTA	NAMA INSTANSI/ LEMBAGA
432	Jawa Timur	BNN Kota Malang	Puskesmas Kendalsari
433	Jawa Timur	BNN Kota Mojokerto	Puskesmas Gedongan
434	Jawa Timur	BNN Kota Mojokerto	RS. Kamar Medika
435	Jawa Timur	BNN Kota Surabaya	Plato Foundation
436	Jawa Timur	BNN Kota Surabaya	Yayasan Bambu Nusantara
437	Jawa Timur	BNN Kota Surabaya	Yayasan Orbit
438	Jawa Timur	BNN Kota Surabaya	RSJ Menur
439	Jawa Timur	BNN Kota Surabaya	LRPPN-BI Surabaya
440	Jawa Timur	BNNP Jawa Timur	Klinik Kesehatan dan Ketergantungan Obat Ghana Prima
441	Jawa Timur	BNNP Jawa Timur	Rumah Singgah KP2M
442	Jawa Timur	BNNP Jawa Timur	IPWL LRPPN-BI Banyuwangi
443	Jawa Timur	BNNP Jawa Timur	Rumah Rehabilitasi Narkoba Al Hidayat
444	Jawa Timur	BNNP Jawa Timur	Yayasan Gendhog Nemu Sariro (Gennesa) Banyuwangi
445	Bali	BNN Kabupaten Badung	RSUD Mangusada Badung
446	Bali	BNN Kabupaten Badung	UPTD Puskesmas Kuta 1
447	Bali	BNNK Klungkung	RSUD Klungkung
448	Bali	BNN Kabupaten Buleleng	RSUD Buleleng
449	Bali	BNN Kabupaten Buleleng	Lapas Klas II B Singaraja
450	Bali	BNN Kota Denpasar	RSUD Wangaya
451	Bali	BNN Kota Denpasar	Yayasan Anargya
452	Bali	BNN Kota Denpasar	Yayasan Handaru Kasih Bali
453	Bali	BNN Kabupaten Badung	Yayasan Musim Indonesia
454	Bali	BNN Kabupaten Badung	Yayasan Pesona Sivana Bali
455	Bali	BNN Kabupaten Gianyar	Lapas Narkotika Klas IIA Bangli
456	Bali	BNN Kabupaten Gianyar	Rumah Tahanan Negara Klas IIB
457	Bali	BNN Kabupaten Karangasem	RSUD Karangasem
458	Bali	BNN Kabupaten Karangasem	Klinik Lapas Kelas IIB Karangasem
459	Bali	BNNP Bali	Friends Mental Health Support
460	Bali	BNNP Bali	Yayasan Kasih Karunia Bali
461	Bali	BNNP Bali	RS Jiwa Provinsi Bali
462	Bali	BNNP Bali	RS Bhayangkara Denpasar
463	Bali	BNNP Bali	Yayasan Bali Samsara
464	Bali	BNNP Bali	Calm Rehab Bali
465	Bali	BNNP Bali	Yayasan Ashefa Griya Pusaka
466	Bali	BNNP Bali	Yayasan Satu Nusa
467	Kalimantan Barat	BNN Kabupaten Kubu Raya	Puskesmas Sungai Durian
468	Kalimantan Barat	BNN Kabupaten Kubu Raya	Yayasan Peduli Pemulihan Indonesia
469	Kalimantan Barat	BNN Kota Pontianak	Yayasan Gepsan
470	Kalimantan Barat	BNN Kota Pontianak	West Borneo Action
471	Kalimantan Barat	BNN Kota Pontianak	Yayasan RBM Khatulistiwa
472	Kalimantan Barat	BNN Kota Pontianak	Yayasan Rumah Adiksi Indonesia (RAIN)
473	Kalimantan Barat	BNN Kota Pontianak	Yayasan Rumah Rahayu Kota Pontianak
474	Kalimantan Barat	BNN Kota Pontianak	UPT Puskesmas Purnama

NO	PROVINSI	BNNP/KAB/KOTA	NAMA INSTANSI/ LEMBAGA
475	Kalimantan Barat	BNN Kota Pontianak	UPT Puskesmas Saigon
476	Kalimantan Barat	BNN Kota Pontianak	UPT Puskesmas Siantan Tengah
477	Kalimantan Barat	BNN Kota Pontianak	UPT Puskesmas Perumnas 1
478	Kalimantan Barat	BNN Kota Pontianak	UPT Puskesmas Alianyang
479	Kalimantan Barat	BNN Kota Pontianak	UPT Puskesmas Kampung Bangka
480	Kalimantan Barat	BNN Kota Singkawang	Rehabilitasi Kita
481	Kalimantan Barat	BNN Kota Singkawang	Lsm Kelompok Saling Bantu (Kesatu)
482	Kalimantan Barat	BNN Kota Singkawang	Wisma Koala RSJ Prov Kalimantan Barat
483	Kalimantan Barat	BNN Kabupaten Bengkayang	RSU Bethesda Serukam
484	Kalimantan Barat	BNN Kabupaten Mempawah	Poli Klinik Napza, RSUD dr Rubini Mempawah
485	Kalimantan Barat	BNN Kabupaten Mempawah	Poli Klinik Bestari Puskesmas Rawat Jalan Anjungan
486	Kalimantan Barat	BNN Kabupaten Sintang	RSUD M.DJOEN
487	Kalimantan Barat	BNN Kabupaten Sanggau	RSU Parindu
488	Kalimantan Barat	BNN Kabupaten Sanggau	RSUD M.Th. Djaman
489	Kalimantan Barat	BNNP Kalimantan Barat	Rumah Family Female Kab. Melawi
490	Kalimantan Barat	BNNP Kalimantan Barat	RBM Kota Juang Kabupaten Melawi
491	Kalimantan Barat	BNNP Kalimantan Barat	Yayasan Geratak Kabupaten Sambas
492	Kalimantan Barat	BNNP Kalimantan Barat	RSUD Bumi Sebalong Bengkayang
493	Kalimantan Barat	BNNP Kalimantan Barat	Rumah Sakit Parindu
494	Kalimantan Selatan	BNN Kabupaten Barito Kuala	Tarbiyatul Furqan
495	Kalimantan Selatan	BNN Kabupaten Barito Kuala	RS. Abdul Aziz Marabahan
496	Kalimantan Selatan	BNN Kabupaten Barito Kuala	Puskesmas Berangas
497	Kalimantan Selatan	BNN Kabupaten Barito Kuala	Klinik Pondok Sehat Arrohmah
498	Kalimantan Selatan	BNN Kabupaten Hulu Sungai Selatan	RS Ceria
499	Kalimantan Selatan	BNN Kabupaten Hulu Sungai Utara	RS Mulia Amuntai
500	Kalimantan Selatan	BNN Kabupaten Tabalong	Puskesmas Mabuun
501	Kalimantan Selatan	BNN Kabupaten Tabalong	PKM Muara Harus
502	Kalimantan Selatan	BNN Kabupaten Balangan	PKM Lampihong
503	Kalimantan Selatan	BNN Kota Banjarbaru	Yayasan Griya Pemberdayaan (YGP)
504	Kalimantan Selatan	BNN Kota Banjarbaru	Puskesmas Cempaka
505	Kalimantan Selatan	BNN Kota Banjarmasin	Puskesmas S. Parman
506	Kalimantan Selatan	BNN Kota Banjarmasin	UPTD Puskesmas Teluk Tiram
507	Kalimantan Selatan	BNN Kota Banjarmasin	Puskesmas Kelayan Timur
508	Kalimantan Selatan	BNN Kota Banjarmasin	Puskesmas Alalak Selatan
509	Kalimantan Selatan	BNN Kota Banjarmasin	Puskesmas Sungai Jingah
510	Kalimantan Selatan	BNN Kota Banjarmasin	Psikomedika Kalimantan
511	Kalimantan Selatan	BNN Kota Banjarmasin	Puskesmas Beruntung Jaya
512	Kalimantan Selatan	BNNP Kalimantan Selatan	RSUD Datu Sanggul, Rantau
513	Kalimantan Selatan	BNNP Kalimantan Selatan	Puskesmas Sebamban II
514	Kalimantan Selatan	BNNP Kalimantan Selatan	Puskesmas Bati-Bati, Tanah Laut
515	Kalimantan Selatan	BNNP Kalimantan Selatan	Puskesmas Pantai Hambawang, HST

NO	PROVINSI	BNNP/KAB/KOTA	NAMA INSTANSI/ LEMBAGA
516	Kalimantan Selatan	BNNP Kalimantan Selatan	Puskesmas Barabai, HST
517	Kalimantan Selatan	BNNP Kalimantan Selatan	Klinik Simpang, Tanah Bumbu
518	Kalimantan Selatan	BNNP Kalimantan Selatan	Klinik Utama Mubarak, HST
519	Kalimantan Selatan	BNNP Kalimantan Selatan	RS. Mutiara Bunda
520	Kalimantan Tengah	BNN Kota Palangkaraya	Puskesmas Pahandut
521	Kalimantan Tengah	BNN Kota Palangkaraya	Puskesmas Menteng
522	Kalimantan Tengah	BNN Kota Palangkaraya	Puskesmas Panarung
523	Kalimantan Tengah	BNNP Kalimantan Tengah	RS. Bhayangkara Tk III Palangka
524	Kalimantan Tengah	BNNP Kalimantan Tengah	Biddokkes Polda Kalteng
525	Kalimantan Tengah	BNNP Kalimantan Tengah	RSJD Kalawa Atei
526	Kalimantan Tengah	BNNP Kalimantan Tengah	RSUD Jaraga Sasameh, Kab. Barito
527	Kalimantan Tengah	BNNP Kalimantan Tengah	RSUD Muara Teweh, Kabupaten Barito
528	Kalimantan Tengah	BNNP Kalimantan Tengah	RSUD Kuala Kurun, Kabupaten Gunung
529	Kalimantan Tengah	BNNP Kalimantan Tengah	RSUD Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kapuas
530	Kalimantan Tengah	BNNP Kalimantan Tengah	RSUD Mas Amsyar Kasongan
531	Kalimantan Tengah	BNNP Kalimantan Tengah	RSUD Dr. Murjani Sampit
532	Kalimantan Tengah	BNNP Kalimantan Tengah	RSUD Kuala Pembuang
533	Kalimantan Tengah	BNNP Kalimantan Tengah	RSUD Tamiang Layang
534	Kalimantan Tengah	BNNP Kalimantan Tengah	Yayasan Galilea Palangkaraya
535	Kalimantan Tengah	BNNP Kalimantan Tengah	Lapas Narkotika Kelas IIA Kasongan
536	Kalimantan Timur	BNN Kota Balikpapan	Puskesmas Baru Tengah
537	Kalimantan Timur	BNN Kota Bontang	Puskesmas Bontang Utara 1
538	Kalimantan Timur	BNN Kota Bontang	RSUD Taman Husada Bontang
539	Kalimantan Timur	BNN Kota Samarinda	Yayasan Sekata (Selamatkan Anak Kita) Samarinda
540	Kalimantan Timur	BNNP Kalimantan Timur	Puskesmas Sangatta Selatan
541	Kalimantan Timur	BNNP Kalimantan Timur	Puskesmas Penajam
542	Kalimantan Timur	BNNP Kalimantan Timur	Puskesmas Teluk Lingga
543	Kalimantan Timur	BNNP Kalimantan Timur	RSJD Atma Husada Mahakam
544	Kalimantan Utara	BNN Kota Tarakan	RSUD Dr. H. Jusuf Sk Tarakan
545	Kalimantan Utara	BNN Kota Tarakan	Yayasan Sekata (Selamatkan Anak Kita)
546	Kalimantan Utara	BNNP Kalimantan Utara	BLUD UPT Puskesmas Perawatan Bunyu
547	Kalimantan Utara	BNNP Kalimantan Utara	BLUD UPT Puskesmas Tanjung Palas
548	Kalimantan Utara	BNNP Kalimantan Utara	BLUD UPT Puskesmas Pimping
549	Kalimantan Utara	BNNP Kalimantan Utara	BLUD UPT Puskesmas Bumi Rahayu
550	Kalimantan Utara	BNNP Kalimantan Utara	BLUD UPT Puskesmas Tanjung Selor
551	Kalimantan Utara	BNNP Kalimantan Utara	UPT Puskesmas Sedadap Nunukan
552	Kalimantan Utara	BNNP Kalimantan Utara	UPT Puskesmas Malinau Kota
553	Kalimantan Utara	BNNP Kalimantan Utara	UPT Puskesmas Malinau Seberang
554	Kalimantan Utara	BNNP Kalimantan Utara	UPT Puskesmas Malinau Sapi

NO	PROVINSI	BNNP/KAB/KOTA	NAMA INSTANSI/ LEMBAGA
555	Kalimantan Utara	BNNP Kalimantan Utara	UPT Puskesmas Tana Lia
556	Kalimantan Utara	BNNP Kalimantan Utara	UPT Puskesmas Tideng Pale
557	Kalimantan Utara	BNNP Kalimantan Utara	Klinik Bunyu Medika
558	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	Puskesmas Pekkabata
559	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	Puskesmas Durikumba
560	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	RSUD Majene
561	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	Puskesmas Pangale
562	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	RSUD Mamuju Tengah
563	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	RSUD Pasangkayu
564	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	Pukesmas Pelitakan
565	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	Puskesmas Katumbangan
566	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	Pukesmas Sarjo
567	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	Puskesmas Bambu
568	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	RSUD Mamuju
569	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	Puskesmas Wonomulyo
570	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	RSUD Polewali Mandar
571	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	Pukesmas Sendana 1
572	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	Puskesmas Rangas
573	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	Puskesmas Lariang
574	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	Puskesmas Binanga
575	Sulawesi Selatan	BNN Kabupaten Bone	Forum Pendamping Pemerhati Anak Indonesia
576	Sulawesi Selatan	BNN Kabupaten Bone	RSUD Tenriawaru
577	Sulawesi Selatan	BNN Kabupaten Bone	Puskesmas Watampone
578	Sulawesi Selatan	BNN Kabupaten Tana Toraja	Yayasan Pemulihan Bethesda
579	Sulawesi Selatan	BNN Kabupaten Tana Toraja	Puskesmas Talunglipu
580	Sulawesi Selatan	BNN Kabupaten Tana Toraja	Puskesmas Makale
581	Sulawesi Selatan	BNN Kota Palopo	RS Mujaisyah
582	Sulawesi Selatan	BNN Kota Palopo	Rumah Rehab Hati Kota Palopo
583	Sulawesi Selatan	BNN Kota Palopo	RSUD Sawerigading Kota Palopo
584	Sulawesi Selatan	BNN Kota Palopo	Puskesmas Wara Utara Kota Palopo
585	Sulawesi Selatan	BNNP Sulawesi Selatan	Klinik Transit Maros
586	Sulawesi Selatan	BNNP Sulawesi Selatan	Puskesmas Lawawoi, Kab. Sidrap
587	Sulawesi Selatan	BNNP Sulawesi Selatan	Puskesmas Kanjilo, Kab. Gowa
588	Sulawesi Selatan	BNNP Sulawesi Selatan	Puskesmas Kaluku Bodoa, Kota Makassar
589	Sulawesi Selatan	BNNP Sulawesi Selatan	RSUD Sayang Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan
590	Sulawesi Selatan	BNNP Sulawesi Selatan	RSKD Provinsi Sulawesi Selatan
591	Sulawesi Selatan	BNNP Sulawesi Selatan	Yayasan Pranawaksara Nusantara
592	Sulawesi Selatan	BNNP Sulawesi Selatan	Yayasan Mitra Husada
593	Sulawesi Selatan	BNNP Sulawesi Selatan	Lapas Narkotika Kls IIA Pria, Sungguminasa
594	Sulawesi Selatan	BNNP Sulawesi Selatan	Lapas Narkotika Kls IIA Wanita, Sungguminasa
595	Sulawesi Selatan	BNNP Sulawesi Selatan	Rutan Kls IIA, Makassar
596	Sulawesi Selatan	BNNP Sulawesi Selatan	Rutan Kls IIB, Kab Pinrang
597	Sulawesi Selatan	BNNP Sulawesi Selatan	Rutan Kls IIB, Kab Janeponto
598	Sulawesi Tengah	BNNP Sulawesi Tengah	RSUD Torabelo Sigi

NO	PROVINSI	BNNP/KAB/KOTA	NAMA INSTANSI/ LEMBAGA
599	Sulawesi Tengah	BNNP Sulawesi Tengah	UPT RSUD Mokoyurli Buol
600	Sulawesi Tengah	BNNP Sulawesi Tengah	Lapas Kelas IIA Palu
601	Sulawesi Tengah	BNNP Sulawesi Tengah	Klinik Pratama RMC Medical Centre
602	Sulawesi Tengah	BNN Kota Palu	RSUD Anutapura Palu
603	Sulawesi Tengah	BNN Kota Palu	Klinik Agung
604	Sulawesi Tengah	BNNK Morowali	RSUD Kolonedale
605	Sulawesi Tenggara	BNN Kabupaten Kolaka	Puskesmas Kolakaasi
606	Sulawesi Tenggara	BNN Kota Kendari	Puskesmas Poasia
607	Sulawesi Tenggara	BNN Kota Kendari	Puskesmas Mokoau
608	Sulawesi Tenggara	BNN Kota Kendari	ORC Noid
609	Sulawesi Tenggara	BNN Kabupaten Kolaka	Rutan Klas IIB Kolaka
610	Sulawesi Tenggara	BNNP Sulawesi Tenggara	BLUD RSU Bombana
611	Sulawesi Tenggara	BNNP Sulawesi Tenggara	RSD Konawe Selatan
612	Sulawesi Tenggara	BNNP Sulawesi Tenggara	RSUD Kolaka Timur
613	Sulawesi Tenggara	BNNP Sulawesi Tenggara	Puskesmas Lepo-Lepo
614	Sulawesi Tenggara	BNNP Sulawesi Tenggara	LapasKelas IIA Kendari
615	Sulawesi Tenggara	BNNP Sulawesi Tenggara	Lapas Perempuan Kelas III Kendari
616	Sulawesi Utara	BNN Kabupaten Sangihe	LRM Kadademahe
617	Sulawesi Utara	BNN Kota Bitung	Yayasan Manado Waras "Panti Rehabilitasi Gerasa"
618	Sulawesi Utara	BNN Kota Manado	Yayasan Sahabat Sehati
619	Sulawesi Utara	BNN Kota Manado	Yayasan Batamang Plus
620	Sulawesi Utara	BNNP Sulawesi Utara	IPWL Kalooran
621	Sulawesi Utara	BNNP Sulawesi Utara	Yayasan Bunga Bakung
622	Sulawesi Utara	BNNP Sulawesi Utara	Lapas Klas IIA Manado
623	Gorontalo	BNNP Gorontalo	IPWL Ummu Syahidah
624	Gorontalo	BNNP Gorontalo	Lapas Kelas II A Kota Gorontalo
625	Nusa Tenggara Barat	BNN Kabupaten Bima	RSUD Bima
626	Nusa Tenggara Barat	BNN Kabupaten Bima	Puskesmas Sape Plus
627	Nusa Tenggara Barat	BNN Kabupaten Bima	Puskesmas Woha
628	Nusa Tenggara Barat	BNN Kabupaten Sumbawa	RS. H. L. Manambai Abdul Kadir
629	Nusa Tenggara Barat	BNN Kabupaten Sumbawa Barat	UPTD Puskesmas PotoTano
630	Nusa Tenggara Barat	BNN Kabupaten Sumbawa Barat	UPTD Puskesmas Maluk
631	Nusa Tenggara Barat	BNNP Nusa Tenggara Barat	Balai Rehabilitasi Sosial Anak (BRSAMPK Paramita)
632	Nusa Tenggara Barat	BNNP Nusa Tenggara Barat	RSUD Dr. R Soedjono Selong
633	Nusa Tenggara Barat	BNNP Nusa Tenggara Barat	Aksi NTB
634	Nusa Tenggara Barat	BNNP Nusa Tenggara Barat	Yayasan Lentera Mataram
635	Nusa Tenggara Barat	BNNP Nusa Tenggara Barat	Lapas Kelas II A Mataram
636	Nusa Tenggara Timur	BNN Kabupaten Rote Ndao	Puskesmas Delha
637	Nusa Tenggara Timur	BNN Kabupaten Rote Ndao	Puskesmas Ba'a
638	Nusa Tenggara Timur	BNN Kabupaten Rote Ndao	Puskesmasa Korbafo
639	Nusa Tenggara Timur	BNN Kabupaten Rote Ndao	Puskesmas Eahun
640	Nusa Tenggara Timur	BNN Kabupaten Belu	Puskesmas Umanan
641	Nusa Tenggara Timur	BNN Kabupaten Belu	Puskesmas Kota Atambua
642	Nusa Tenggara Timur	BNN Kota Kupang	Klinik Utama Jiwa Dewanta Mental

NO	PROVINSI	BNNP/KAB/KOTA	NAMA INSTANSI/ LEMBAGA
643	Nusa Tenggara Timur	BNN Kota Kupang	Klinik King Care
644	Nusa Tenggara Timur	BNN Kota Kupang	Puskesmas Oebobo
645	Nusa Tenggara Timur	BNNP Nusa Tenggara Timur	UPT RSJ Naimata Kupang
646	Nusa Tenggara Timur	BNNP Nusa Tenggara Timur	Yayasan Lentera Mitra Harapan
647	Nusa Tenggara Timur	BNNP Nusa Tenggara Timur	Yayasan Warna Kasih
648	Maluku	BNNP Maluku	Puskesmas Hutumuri
649	Maluku	BNNP Maluku	Puskesmas Tawiri
650	Maluku	BNNP Maluku	Puskesmas Waihaong
651	Maluku	BNNP Maluku	Puskesmas Passo
652	Maluku	BNNP Maluku	Puskesmas Perawatan Pelauw
653	Maluku	BNNP Maluku	RSUD Dr.H. Ishak Umarela
654	Maluku	BNNP Maluku	Puskesmas Karang Panjang Ambon
655	Maluku	BNNP Maluku	Rumah Sakit Umum Daerah Masohi
656	Maluku	BNNP Maluku	Puskesmas Poka Rumah Tiga
657	Maluku	BNNP Maluku	Rumah Sakit Bhayangkara Ambon
658	Maluku	BNNP Maluku	Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Maluku
659	Maluku Utara	BNN Kabupaten Pulau Morotai	RSUD Ir. Soekarno
660	Maluku Utara	BNN Kabupaten Tidore Kepulauan	UPT Puskesmas Ranap Ome
661	Maluku Utara	BNN Kabupaten Tidore Kepulauan	RSD Tidore Kepulauan
662	Maluku Utara	BNN Kabupaten Tidore Kepulauan	UPT Puskesmas Soasio
663	Maluku Utara	BNN Kota Ternate	Wasana Bahagia
664	Maluku Utara	BNNP Maluku utara	RSUD H. Chasan Boesorie
665	Maluku Utara	BNNP Maluku utara	RSUD Weda
666	Maluku Utara	BNNP Maluku utara	RSUD Jailolo
667	Maluku Utara	BNNP Maluku utara	RSUD Maba
668	Maluku Utara	BNNP Maluku utara	BLUD Labuha
669	Maluku Utara	BNNP Maluku utara	RSUD Sanana
670	Maluku Utara	BNNP Maluku utara	Puskesmas Kalumata
671	Maluku Utara	BNNP Maluku Utara	Lapas Kls IIA Ternate
672	Papua	BNN Kabupaten Jayapura	Puskesmas Sentani
673	Papua	BNN Kabupaten Jayapura	Puskesmas Harapan
674	Papua	BNN Kabupaten Jayapura	Lapas Narkotika Kls IIA Jayapura
675	Papua	BNN Kabupaten Mimika	RSUD Mimika
676	Papua	BNN Kabupaten Mimika	Puskesmas Timika Jaya
677	Papua	BNN Kabupaten Mimika	Puskesmas Wania
678	Papua	BNN Kabupaten Mimika	Rumah Sakit Mitra Masyarakat
679	Papua	BNN Kabupaten Mimika	Klinik Puri Husada
680	Papua	BNN Kabupaten Mimika	Puskesmas Timika
681	Papua	BNNP Papua	Puskesmas Elly Uyo
682	Papua	BNNP Papua	Puskesmas Hebeybhulu Yoka
683	Papua	BNNP Papua	Puskesmas Arso Timur PIR IV
684	Papua	BNNP Papua	Puskesmas Arso 3 Kabupaten Keerom
685	Papua	BNNP Papua	PKM Arso Kota Kab. Keerom

NO	PROVINSI	BNNP/KAB/KOTA	NAMA INSTANSI/ LEMBAGA
686	Papua	BNNP Papua	RSUD Kwaingga Kab. Keerom
687	Papua	BNNP Papua	PKM Jayapura Utara
688	Papua	BNNP Papua	PKM Tanjung Ria
689	Papua	BNNP Papua	Yayasan Pendampingan & Pemberdayaan Masyarakat Papua & Papua Barat
690	Papua	BNNP Papua	Puskesmas Lmbi
691	Papua	BNNP Papua	Puskesmas Twano
692	Papua	BNNP Papua	Puskesmas Kotaraja
693	Papua	BNNP Papua	Puskesmas Skouw
694	Papua	BNNP Papua	Bapas Jayapura
695	Papua Barat	BNNP Papua Barat	RSUD Kabupaten Raja Ampat
696	Papua Barat	BNNP Papua Barat	Yayasan Kasih Agape Malainsimsa Kota Sorong

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 20 Januari 2023

a.n. KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

DEPUTI REHABILITASI



Dra. Riza Sarasvita, M.Si, MHS, Ph.D



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/1/I/DR/RH.02.03/2024/BNN

Jakarta, 02 Januari 2024

Klasifikasi : Biasa

Lampiran : 4 (empat) berkas

Perihal : Pemberitahuan Hasil Evaluasi
Operasionalisasi Unit IBM TA. 2023

Kepada

- Yth. **1. Kepala BNN Provinsi seluruh Indonesia**
2. Kepala BNN Kabupaten/Kota seluruh Indonesia

di

Tempat

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan;
- e. Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: KEP/214/II/DE/RH.03/2023/BNN tentang Penetapan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat Prioritas Nasional di Lingkungan BNN Provinsi/ Kabupaten/ Kota Tahap Pertama Tahun Anggaran 2023;
- f. Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: KEP/259/II/DE/RH.03/2023/BNN tentang Penetapan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat Prioritas Nasional di Lingkungan BNN Provinsi/ Kabupaten/ Kota Tahap Kedua Tahun Anggaran 2023;
- g. Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: KEP/961/IX/DE/RH.01.00/2023/BNN tentang Penetapan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat Prioritas Nasional di Lingkungan BNN Provinsi/ Kabupaten/ Kota Tahap Ketiga Tahun Anggaran 2023;
- h. Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: B/4380/XI/DR/RH.02.03/2023/BNN tanggal 28 November 2023 perihal Pemberitahuan Evaluasi Operasionalisasi IBM 2023;
- i. Program Kerja Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional TA. 2023.

/2. Sehubungan ...

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Kepala bahwa Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat (Dit. PLRKM) Deputi Bidang Rehabilitasi BNN telah melaksanakan Evaluasi Operasionalisasi Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) terhadap 463 unit IBM pada bulan Desember 2023. Tujuan kegiatan ini adalah memperoleh data & informasi capaian kinerja unit IBM serta inovasi, kendala dan tantangan yang dihadapi dalam rangka menentukan kebijakan program pada tahun anggaran selanjutnya.

3. Hasil monitoring program IBM sebagai berikut (data terlampir):

a. Fase perkembangan unit IBM

Merupakan capaian fase perkembangan unit IBM berdasarkan hasil diskusi dengan petugas BNNP/K/Kota tentang pelaksanaan tata kelola, kegiatan dan layanan IBM. Monitoring dilakukan kepada 463 unit IBM yang tersebar di 34 provinsi dan 173 kabupaten/ kota. Dengan capaian sebagai berikut:

- Sebanyak 70 unit (15,12%) memenuhi fase Prima
- Sebanyak 209 unit (45,14%) memenuhi fase Tangguh
- Sebanyak 105 unit (22,68%) memenuhi fase Berkembang
- Sebanyak 58 unit (12,53%) memenuhi fase Tumbuh
- Sebanyak 16 unit (3,46%) memenuhi fase Rintisan
- Sebanyak 5 unit (1,08%) belum memenuhi indikator fase perkembangan sehingga berada dalam kategori Pra Fase

Berdasarkan capaian fase perkembangan tersebut, unit IBM yang telah operasional adalah 442 unit (95,46%). Unit IBM disebut operasional setelah memenuhi indikator minimal fase Tumbuh dimana seluruh sub komponen Tata Kelola telah terpenuhi serta Agen Pemulihan (AP) telah mampu melakukan seluruh kegiatan IBM (sosialisasi, pemetaan dan penjangkauan), dan telah dapat menjangkau klien untuk dilakukan skrining menggunakan formulir DAST-10 (*Drug Abuse Screening Test*) untuk selanjutnya klien dapat diberikan layanan intervensi hingga bina lanjut.

b. Gambaran kegiatan & profil klien IBM

Merupakan penjabaran hasil kegiatan yang dilakukan oleh Agen Pemulihan dengan pendampingan petugas BNNP & BNNK/Kota juga profil klien yang dilayani pada tahun 2023. Berdasarkan data yang terkumpul pada bulan Desember 2023, diperoleh gambaran berikut:

/- Kegiatan ...

- Kegiatan sosialisasi IBM dilakukan sebanyak 2.491 kali dengan metode formal, informal, serta menggunakan media sosial, dengan jumlah penerima sosialisasi 44.477 audiens. Kegiatan ini bertujuan memberikan informasi tentang program IBM kepada masyarakat dan pemangku kepentingan di desa/ kelurahan.
- Kegiatan pemetaan dilakukan sebanyak 1.447 kali di 2.049 RT/RW, dan perkiraan jumlah penyalah guna narkoba sebanyak 5.429 orang. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh informasi dan gambaran terkait penyalahgunaan narkoba di wilayah desa/ kelurahan.
- Kegiatan penjangkauan telah dilakukan untuk menjangkau 3.027 orang penyalah guna narkoba, dan yang berhasil masuk dalam kegiatan IBM sebanyak 2.825 orang. Kegiatan ini bertujuan untuk mendekati penyalah guna narkoba dan keluarga/ orang terdekatnya agar mengikuti layanan di IBM.
- Jumlah klien IBM yang mengikuti layanan pada tahun 2023 sebanyak 2.825 orang dengan profil berikut:
 - o Mayoritas klien (40,78%) berada dalam kelompok usia 17-25 tahun
 - o Pendidikan terakhir klien mayoritas adalah SMA/ sederajat (54,12%)
 - o Pekerjaan klien pada saat mengikuti layanan IBM mayoritas adalah Buruh/ petani/ nelayan (26,65%)
 - o Jenis zat utama yang disalahgunakan adalah amphetamine/ metamphetamine (37,71%), diikuti dengan kelompok sedatif/ hipnotik (11,43%) dan kanabis (10,13%)

c. Hasil pemantauan program IBM terhadap lingkungan & masyarakat

Merupakan hasil survey menggunakan skala *likert* kepada masyarakat di wilayah desa/ kelurahan lokasi IBM untuk mengetahui dampak kegiatan IBM bagi lingkungan dan masyarakat. Jumlah responden yang mengisi kuesioner sebanyak 1.407 orang, mayoritas berada dalam kelompok usia 26-35 tahun dan merupakan warga di lingkungan desa/ kelurahan lokasi IBM. Berdasarkan data yang terkumpul diketahui bahwa mayoritas responden (96,1%) mengetahui tentang keberadaan IBM. Selain itu, pertanyaan 1-6 dalam survey diperoleh skor rata-rata 4 dari total pemberian skor 1-4, artinya IBM memberikan dampak sangat positif bagi lingkungan dan masyarakat di wilayah desa/ kelurahan dalam hal penanganan penyalah guna narkoba.

/d. Hasil ...

d. Hasil identifikasi masalah & rekomendasi

Merupakan tantangan dalam implementasi program IBM serta hal-hal yang perlu ditindaklanjuti dan diantisipasi untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan & layanan IBM di wilayah pada tahun 2024. Hasil identifikasi dikategorikan menjadi 5, yaitu:

- Sumber Daya Manusia/ SDM, baik AP maupun petugas BNNP/K/Kota
- Anggaran
- Materi/ konten layanan yang diberikan
- Peralatan/ perlengkapan kegiatan & layanan
- Metode pelaksanaan kegiatan

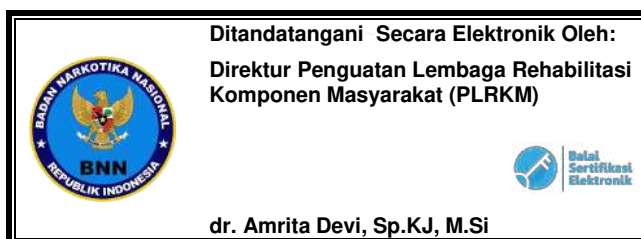
4. Berdasarkan butir tiga di atas, bersama ini kami sampaikan apresiasi kepada bidang Rehabilitasi di BNNP dan BNNK/ Kota atas implementasi program IBM tahun 2023. Diharapkan kinerja pada tahun 2023 dalam melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap tim Agen Pemulihan (AP) dapat ditingkatkan, sehingga tujuan IBM yakni peningkatan akses layanan rehabilitasi hingga ke tingkat desa/ kelurahan dapat diwujudkan.

5. Demikian untuk menjadi maklum.

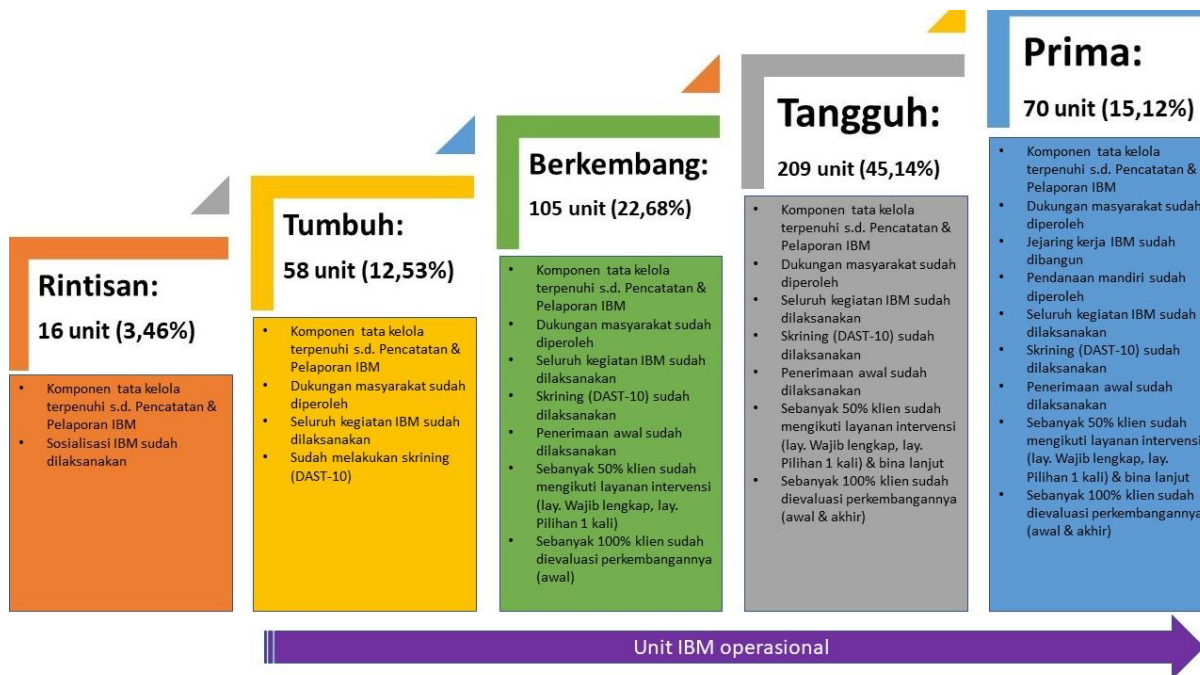


Tembusan :

1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. Inspektur Utama BNN;
4. Deputi Rehabilitasi BNN



**FASE PERKEMBANGAN UNIT IBM BINAAN BNNP & BNNK/ KOTA
TAHUN ANGGARAN 2023**



No.	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
Prima (70 unit)					
1	Sumatera Utara	BNN Kab. Deli Serdang	Desa Dalu 10 A	Tanjung Morawa	Kabupaten Deli Serdang
2	Sumatera Utara	BNN Kab. Langkat	Desa Perkebunan Tanjung Beringin	Hinai	Kabupaten Langkat
3	Sumatera Utara	BNN Kab. Asahan	Desa Urung Pane	Setia Janji	Kabupaten Asahan
4	Sumatera Barat	BNN Kab. Payakumbuh	Kelurahan Koto Panjang Dalam	Lamposi Tigo Nagori	Kota Payakumbuh
5	Sumatera Selatan	BNN Kab. Ogan Ilir	Desa Pulau Semambu	Indralaya Utara	Kabupaten Ogan Ilir
6	Sumatera Selatan	BNN Kab. Ogan Ilir	Desa Talang Balai Lama	Tanjung Raja	Kabupaten Ogan Ilir
7	Lampung	BNN Kab. Lampung Timur	Desa Labuhan Ratu 1	Way Jepara	Kabupaten Lampung Timur
8	Kep. Bangka Belitung	BNNP Kep. Bangka Belitung	Desa Namang	Namang	Kabupaten Bangka Tengah
9	Kep. Bangka Belitung	BNNP Kepulauan Bangka Belitung	Desa Tempilang	Tempilang	Kabupaten Bangka Barat
10	Kep. Bangka Belitung	BNN Kota Pangkal Pinang	Kelurahan Gabek II	Gabek	Kota Pangkalpinang
11	Kep. Bangka Belitung	BNN Kota Pangkal Pinang	Kelurahan Pintu Air	Rangkui	Kota Pangkalpinang
12	Kep. Bangka Belitung	BNN Kota Pangkal Pinang	Desa Air Mesu Timur	Pangkalan Baru	Kabupaten Bangka Tengah
13	Jawa Barat	BNNP Jawa Barat	Desa Bojongloa	Rancaekek	Kabupaten Bandung
14	Jawa Barat	BNN Kab. Bogor	Desa Hambalang	Kecamatan Citeureup	Kabupaten Bogor
15	Jawa Barat	BNN Kab. Bogor	Desa Cileungsi Kidul	Cileungsi	Kabupaten Bogor
16	Jawa Barat	BNN Kab. Bogor	Desa Gunung Putri	Gunung Putri	Kabupaten Bogor
17	Jawa Barat	BNN Kab. Garut	Desa Talagasari	Kadungora	Kabupaten Garut
18	Jawa Barat	BNN Kab. Garut	Desa Situsari	Karangpawitan	Kabupaten Garut

No.	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
19	Jawa Barat	BNN Kab. Garut	Desa Jayaraga	Tarogong Kidul	Kabupaten Garut
20	Jawa Barat	BNN Kab. Karawang	Desa Dawuan Tengah	Cikampek	Kabupaten Karawang
21	Jawa Barat	BNN Kab. Karawang	Desa Sukaharja	Telukjambe Timur	Kabupaten Karawang
22	Jawa Tengah	BNNP Jawa Tengah	Kelurahan Purwosari	Semarang Utara	Kota Semarang
23	Jawa Tengah	BNN Kab. Temanggung	Desa Candirototo	Kecamatan Candirototo	Kabupaten Temanggung
24	Jawa Tengah	BNN Kota Surakarta	Kelurahan Sudiroprajan	Jebres	Kota Surakarta
25	Jawa Tengah	BNN Kota Surakarta	Kelurahan Joyotakan	Serengan	Kota Surakarta
26	Jawa Tengah	BNN Kab. Magelang	Desa Borobudur	Borobudur	Kabupaten Magelang
27	Jawa Tengah	BNN Kab. Batang	Kelurahan Sambong	Batang	Kabupaten Batang
28	Jawa Tengah	BNN Kab. Banyumas	Desa Singasari	Karanglewas	Kabupaten Banyumas
29	Jawa Tengah	BNN Kab. Banyumas	Desa Sokaraja Tengah	Sokaraja	Kabupaten Banyumas
30	DI Yogyakarta	BNNP DI Yogyakarta	Kelurahan Kepek	Wonosari	Kabupaten Gunung Kidul
31	DI Yogyakarta	BNN Kota Yogyakarta	Kelurahan Terban	Gondokusuman	Kota Yogyakarta
32	DI Yogyakarta	BNN Kota Yogyakarta	Kelurahan Pandeyan	Umbulharjo	Kota Yogyakarta
33	DI Yogyakarta	BNN Kab. Sleman	Kelurahan Sariharjo	Ngaglik	Kabupaten Sleman
34	DI Yogyakarta	BNN Kab. Bantul	Desa Trirenggo	Bantul	Kabupaten Bantul
35	DI Yogyakarta	BNN Kab. Bantul	Desa Pendowoharjo	Sewon	Kabupaten Bantul
36	Jawa Timur	BNNP Jawa Timur	Desa Krampon	Torjun	Kabupaten Sampang
37	Jawa Timur	BNN Kota Mojokerto	Kelurahan Pulorejo	Prajurit Kulon	Kota Mojokerto
38	Jawa Timur	BNN Kota Mojokerto	Kelurahan Gunung Gedangan	Magersari	Kota Mojokerto
39	Jawa Timur	BNN Kota Mojokerto	Kelurahan Kranggan	Kranggan	Kota Mojokerto
40	Jawa Timur	BNN Kab. Blitar	Desa Tingal	Garum	Kabupaten Blitar
41	Jawa Timur	BNN Kab. Blitar	Desa Kedawung	Nglegok	Kabupaten Blitar
42	Jawa Timur	BNN Kota Batu	Desa Puntan	Bumiaji	Kota Batu
43	Jawa Timur	BNN Kota Batu	Desa Tulungrejo	Bumiaji	Kota Batu
44	Jawa Timur	BNN Kab. Tuban	Desa Klotok	Plumpang	Kabupaten Tuban
45	Jawa Timur	BNN Kab. Tuban	Desa Kedungsoko	Plumpang	Kabupaten Tuban
46	Jawa Timur	BNN Kab. Sidoarjo	Desa Prasung	Buduran	Kabupaten Sidoarjo
47	Jawa Timur	BNN Kab. Sidoarjo	Desa Rangkah Klidul	Sidoarjo	Kabupaten Sidoarjo
48	Jawa Timur	BNN Kab. Lumajang	Kelurahan Kepuharjo	Lumajang	Kabupaten Lumajang
49	Jawa Timur	BNN Kota Kediri	Kelurahan Banaran	Pesantren	Kota Kediri
50	Jawa Timur	BNN Kab. Kediri	Desa Kayen Kidul	Kayen Kidul	Kabupaten Kediri
51	Jawa Timur	BNN Kab. Kediri	Desa Darungan	Pare	Kabupaten Kediri
52	Jawa Timur	BNN Kota Surabaya	Kelurahan Tegalsari	Tegalsari	Kota Surabaya
53	Jawa Timur	BNN Kota Surabaya	Kelurahan Kedunggoro	Tegalsari	Kota Surabaya
54	Jawa Timur	BNN Kab. Malang	Desa Jatiguwi	Sumberpucung	Kabupaten Malang

No.	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
55	Jawa Timur	BNN Kab. Malang	Desa Ngadilangkung	Kepanjen	Kabupaten Malang
56	Jawa Timur	BNN Kab. Sumenep	Desa Dasuk Laok	Dasuk	Kabupaten Sumenep
57	Kalimantan Barat	BNN Kab. Kubu Raya	Desa Kapur	Sungai Raya	Kabupaten Kubu Raya
58	Kalimantan Barat	BNN Kab. Kubu Raya	Desa Sungai Raya	Sungai Raya	Kabupaten Kubu Raya
59	Kalimantan Barat	BNN Kab. Mempawah	Desa Toho Hilir	Toho	Kabupaten Mempawah
60	Kalimantan Barat	BNN Kab. Mempawah	Desa Pak Laheng	Toho	Kabupaten Mempawah
61	Kalimantan Tengah	BNN Kab. Kotawaringin Barat	Kelurahan Baru	Arut Selatan	Kabupaten Kotawaringin Barat
62	Kalimantan Utara	BNN Kota Tarakan	Kelurahan Sebangkok	Tarakan Tengah	Kota Tarakan
63	Sulawesi Tengah	BNN Kab. Donggala	Desa Loli Oge	Banawa	Kabupaten Donggala
64	Bali	BNNP Bali	Desa Marga Dauh Puri	Marga	Kabupaten Tabanan
65	Bali	BNN Kab. Buleleng	Desa Bondalem	Tejakula	Kabupaten Buleleng
66	Bali	BNN Kab. Buleleng	Desa Tejakula	Tejakula	Kabupaten Buleleng
67	NTB	BNNP NTB	Desa Kuta	Pujut	Kabupaten Lombok Tengah
68	NTB	BNNP NTB	Desa Pemenang Barat	Pemenang	Kabupaten Lombok Utara
69	NTB	BNNP NTB	Desa Bengkel	Labuapi	Kabupaten Lombok Barat
70	NTB	BNN Kab. Bima	Desa Pesa	Wawo	Kabupaten Bima
Tangguh (209 unit)					
1	Aceh	BNN Kab. Bireuen	Gampong Cot Gapu	Kota Juang	Kabupaten Bireuen
2	Aceh	BNN Kab. Pidie	Gampong Jurong Bale	Kembang Tanjong	Kabupaten Pidie
3	Aceh	BNN Kab. Pidie	Gampong Tanjong	Kembang Tanjong	Kabupaten Pidie
4	Sumatera Utara	BNNP Sumatera Utara	Kelurahan Kota Matsum I	Medan Area	Kota Medan
5	Sumatera Utara	BNNP Sumatera Utara	Kelurahan Kota Matsum IV	Medan Area	Kota Medan
6	Sumatera Utara	BNN Kab. Karo	Desa Sempajaya	Berastagi	Kabupaten Karo
7	Sumatera Utara	BNN Kab. Karo	Kelurahan Tambak Lau Mulgap I	Berastagi	Kabupaten Karo
8	Sumatera Utara	BNN Kota Binjai	Kelurahan Cengkeh Turi	Binjai Utara	Kota Binjai
9	Sumatera Utara	BNN Kota Binjai	Kelurahan Sumber Karya	Binjai Timur	Kota Binjai
10	Sumatera Utara	BNN Kota Tanjungbalai	Kelurahan Pasar Baru	Sei Tualang Raso	Kota Tanjungbalai
11	Sumatera Utara	BNN Kota Tanjungbalai	Kelurahan Sei Merbau	Teluk Nibung	Kota Tanjungbalai
12	Sumatera Utara	BNN Kota Gunung Sitoli	Desa Olor	Gunungsitoli Utara	Kota Gunungsitoli
13	Sumatera Utara	BNN Kota Gunung Sitoli	Desa Iraonogeba	Gunungsitoli	Kota Gunungsitoli
14	Sumatera Utara	BNN Kab. Deli Serdang	Desa Tanjung Morawa B	Tanjung Morawa	Kabupaten Deli Serdang
15	Sumatera Utara	BNN Kota Pematang Siantar	Kelurahan Tanjung Pinggir	Siantar Martoba	Kota Pematangsiantar
16	Sumatera Utara	BNN Kota Pematang Siantar	Kelurahan Kahean	Siantar Utara	Kota Pematangsiantar

No.	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
17	Sumatera Utara	BNN Kab. Langkat	Kelurahan Kwala Bingai	Stabat	Kabupaten Langkat
18	Sumatera Utara	BNN Kab. Asahan	Desa Bunut Seberang	Pulo Bandring	Kabupaten Asahan
19	Sumatera Utara	BNN Kab. Mandailing Natal	Desa Sipogu	Batang Natal	Kabupaten Mandailing Natal
20	Sumatera Utara	BNN Kab. Mandailing Natal	Desa Rao Rao Dolok	Tambangan	Kabupaten Mandailing Natal
21	Sumatera Utara	BNN Kab. Serdang Bedagai	Kelurahan Simpang Tiga Pekan	Perbaungan	Kabupaten Serdang Bedagai
22	Sumatera Utara	BNN Kab. Serdang Bedagai	Desa Pantai Cermin Kiri	Pantai Cermin	Kabupaten Serdang Bedagai
23	Sumatera Utara	BNN Kota Tebing Tinggi	Kelurahan Mekar Sentosa	Rambutan	Kota Tebing Tinggi
24	Sumatera Utara	BNN Kota Tebing Tinggi	Kelurahan Karya Jaya	Rambutan	Kota Tebing Tinggi
25	Sumatera Utara	BNN Kab. Simalungun	Nagori Pematang Simalungun	Siantar	Kabupaten Simalungun
26	Sumatera Utara	BNN Kab. Simalungun	Nagori Sakhuda Bayu	Gunung Malela	Kabupaten Simalungun
27	Sumatera Utara	BNN Kab. Labuhanbatu Utara	Desa Tanjung Harapan	Pangkatan	Kabupaten Labuhanbatu
28	Sumatera Utara	BNN Kab. Labuhanbatu Utara	Desa Padang Maninjau	Aek Kuo	Kabupaten Labuhanbatu Utara
29	Sumatera Barat	BNNP Sumatera Barat	Kelurahan Indarung	Lubuk Kilangan	Kota Padang
30	Sumatera Barat	BNNP Sumatera Barat	Nagari Buayan	Batang Anai	Kabupaten Padang Pariaman
31	Sumatera Barat	BNN Kab. Solok	Nagari Gaung	Kubung	Kabupaten Solok
32	Sumatera Barat	BNN Kab. Solok	Nagari Saok Laweh	Kubung	Kabupaten Solok
33	Sumatera Barat	BNN Kab. Payakumbuh	Kelurahan Balai Tongah Koto	Payakumbuh Utara	Kota Payakumbuh
34	Sumatera Barat	BNN Kab. Pasaman Barat	Nagari Muaro Kiawai	Gunung Tuleh	Kabupaten Pasaman Barat
35	Sumatera Barat	BNN Kab. Pasaman Barat	Nagari Rabi Jonggor	Gunung Tuleh	Kabupaten Pasaman Barat
36	Jambi	BNNP Jambi	Kelurahan Tanjung Gedang	Pasar Muara Bungo	Kabupaten Bungo
37	Jambi	BNNP Jambi	Kelurahan Sukasari	Sarolangun	Kabupaten Sarolangun
38	Jambi	BNN Kab. Tanjung Jabung Timur	Kelurahan Rano	Muara Sabak Barat	Kabupaten Tanjung Jabung Timur
39	Jambi	BNN Kab. Tanjung Jabung Timur	Kelurahan Teluk Dawan	Muara Sabak Barat	Kabupaten Tanjung Jabung Timur
40	Jambi	BNN Kota Jambi	Kelurahan Sungai Putri	Danau Sipin	Kota Jambi
41	Jambi	BNN Kota Jambi	Kelurahan Eka Jaya	Paal Merah	Kota Jambi
42	Jambi	BNN Kab Batang Hari	Desa Rantau Kapas Tuo	Muara Tembesi	Kabupaten Batang Hari
43	Sumatera Selatan	BNN Kota Pagar Alam	Kelurahan Besemah Serasan	Pagar Alam Selatan	Kota Pagar Alam
44	Sumatera Selatan	BNN Kota Pagar Alam	Kelurahan Nendangung	Pagar Alam Selatan	Kota Pagar Alam
45	Sumatera Selatan	BNN Kota Lubuklinggau	Kelurahan Majapahit	Lubuklinggau Timur I	Kota Lubuklinggau
46	Sumatera Selatan	BNN Kota Lubuklinggau	Kelurahan Dempo	Lubuklinggau Timur II	Kota Lubuklinggau
47	Sumatera Selatan	BNN Kota Prabumulih	Kelurahan Wonosari	Prabumulih Utara	Kota Prabumulih
48	Sumatera Selatan	BNN Kota Prabumulih	Desa Karang	Rambang Kapak Tengah	Kota Prabumulih

No.	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
49	Sumatera Selatan	BNN Kab. Ogan Komering Ilir	Kelurahan Kutaraya	Kayuagung	Kabupaten Ogan Komering Ilir
50	Sumatera Selatan	BNN Kab. Ogan Komering Ilir	Desa Mulyaguna	Teluk Gelam	Kabupaten Ogan Komering Ilir
51	Lampung	BNNP Lampung	Kampung Kota Gajah	Kota Gajah	Kabupaten Lampung Tengah
52	Lampung	BNNP Lampung	Kampung Terbanggi Besar	Terbanggi Besar	Kabupaten Lampung Tengah
53	Lampung	BNN Kab. Tanggamus	Kelurahan Pasar Madang	Kota Agung	Kabupaten Tanggamus
54	Lampung	BNN Kab. Tanggamus	Pekon Gisting Bawah	Gisting	Kabupaten Tanggamus
55	Lampung	BNN Kab. Lampung Selatan	Desa Kedaton	Kalianda	Kabupaten Lampung Selatan
56	Lampung	BNN Kab. Lampung Selatan	Desa Sidoharjo	Way Panji	Kabupaten Lampung Selatan
57	Lampung	BNN Kota Metro	Kelurahan Banjarsari	Metro Utara	Kota Metro
58	Lampung	BNN Kota Metro	Kelurahan Rejomulyo	Metro Selatan	Kota Metro
59	Lampung	BNN Kab. Lampung Timur	Desa Tanjung Intan	Purbolinggo	Kabupaten Lampung Timur
60	Lampung	BNN Kab. Lampung Timur	Desa Banjar Rejo	Batanghari	Kabupaten Lampung Timur
61	Lampung	BNN Kab. Way Kanan	Kampung Lembasung	Blambangan Umpu	Kabupaten Way Kanan
62	Lampung	BNN Kab. Way Kanan	Kampung Setia Negara	Baradatu	Kabupaten Way Kanan
63	Kep. Bangka Belitung	BNNP Kep. Bangka Belitung	Desa Tanjung Gunung	Pangkalan Baru	Kabupaten Bangka Tengah
64	Kep. Bangka Belitung	BNN Kab. Bangka	Kelurahan Kenanga	Sungai Liat	Kabupaten Bangka
65	Kep. Bangka Belitung	BNN Kab. Bangka	Kelurahan Parit Padang	Sungai Liat	Kabupaten Bangka
66	Kep. Bangka Belitung	BNN Kab. Bangka Selatan	Desa Rias	Toboali	Kabupaten Bangka Selatan
67	Kep. Bangka Belitung	BNN Kab. Bangka Selatan	Desa Gadung	Toboali	Kabupaten Bangka Selatan
68	Kepulauan Riau	BNN Kab. Tanjung Balai Karimun	Desa Kundur	Kundur Barat	Kabupaten Karimun
69	Kepulauan Riau	BNN Kab. Tanjung Balai Karimun	Desa Perayun	Kundur Utara	Kabupaten Karimun
70	Bengkulu	BNN Kota Bengkulu	Kelurahan Kebun Tebeng	Ratu Agung	Kota Bengkulu
71	Bengkulu	BNN Kota Bengkulu	Kelurahan Dusun Besar	Singaran Pati	Kota Bengkulu
72	Bengkulu	BNN Kota Bengkulu	Kelurahan Pasar Baru	Teluk Segara	Kota Bengkulu
73	DKI Jakarta	BNNP DKI Jakarta	Kelurahan Kebon Kacang	Tanah Abang	Kota Jakarta Pusat
74	DKI Jakarta	BNNP DKI Jakarta	Kelurahan Kebon Melati	Tanah Abang	Kota Administrasi Jakarta Pusat
75	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Selatan	Kelurahan Pela Mampang	Mampang Prapatan	Kota Jakarta Selatan
76	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Selatan	Kelurahan Kebayoran Lama Utara	Kebayoran Lama	Kota Jakarta Selatan
77	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Selatan	Kelurahan Pondok Labu	Cilandak	Kota Jakarta Selatan
78	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Utara	Kelurahan Papanggo	Tanjung Priok	Kota Jakarta Utara
79	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Utara	Kelurahan Kalibaru	Cilincing	Kota Jakarta Utara
80	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Utara	Kelurahan Pademangan Timur	Pademangan	Kota Jakarta Utara

No.	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
81	Banten	BNNP Banten	Kelurahan Serang	Serang	Kota Serang
82	Banten	BNNP Banten	Kelurahan Cibeber	Cibeber	Kota Cilegon
83	Banten	BNN Kota Tangerang Selatan	Kelurahan Pondok Cabe Ilir	Pamulang	Kota Tangerang Selatan
84	Banten	BNN Kota Cilegon	Kelurahan Cikera	Cibeber	Kota Cilegon
85	Banten	BNN Kota Cilegon	Kelurahan Tamansari	Pulomerak	Kota Cilegon
86	Banten	BNN Kota Tangerang	Kelurahan Poris Plawad Utara	Cipondoh	Kota Tangerang
87	Jawa Barat	BNNP Jawa Barat	Desa Rancamanyar	Baleendah	Kabupaten Bandung
88	Jawa Barat	BNNP Jawa Barat	Desa Cingcin	Soreang	Kabupaten Bandung
89	Jawa Barat	BNN Kota Bandung	Kelurahan Sukaluyu	Cibeunying Kaler	Kota Bandung
90	Jawa Barat	BNN Kota Bandung	Kelurahan Binong	Batununggal	Kota Bandung
91	Jawa Barat	BNN Kota Cimahi	Kelurahan Citeureup	Cimahi Utara	Kota Cimahi
92	Jawa Barat	BNN Kota Cimahi	Kelurahan Karangmekar	Cimahi Tengah	Kota Cimahi
93	Jawa Barat	BNN Kab. Bandung Barat	Desa Mandalamukti	Cikalongwetan	Kabupaten Bandung Barat
94	Jawa Barat	BNN Kab. Bandung Barat	Desa Kayuambon	Lembang	Kabupaten Bandung Barat
95	Jawa Barat	BNN Kab. Cianjur	Desa Palasari	Cipanas	Kabupaten Cianjur
96	Jawa Barat	BNN Kab. Cianjur	Desa Sukasirna	Sukaluyu	Kabupaten Cianjur
97	Jawa Barat	BNN Kab. Cianjur	Desa Songgom	Gekbrong	Kabupaten Cianjur
98	Jawa Barat	BNN Kab. Sukabumi	Desa Tenjolaya	Cicurug	Kabupaten Sukabumi
99	Jawa Barat	BNN Kab. Sukabumi	Desa Cibat	Cisaat	Kabupaten Sukabumi
100	Jawa Barat	BNN Kota Tasikmalaya	Kelurahan Lengkongsari	Tawang	Kota Tasikmalaya
101	Jawa Barat	BNN Kota Tasikmalaya	Kelurahan Empangsari	Tawang	Kota Tasikmalaya
102	Jawa Barat	BNN Kab. Ciamis	Desa Cisdap	Ciamis	Kabupaten Ciamis
103	Jawa Barat	BNN Kab. Ciamis	Desa Bendasari	Sadananya	Kabupaten Ciamis
104	Jawa Barat	BNN Kab. Kuningan	Desa Puncak	Cigugur	Kabupaten Kuningan
105	Jawa Barat	BNN Kab. Kuningan	Desa Pajambon	Kramatmulya	Kabupaten Kuningan
106	Jawa Barat	BNN Kota Cirebon	Kelurahan Kalijaga	Harjamukti	Kota Cirebon
107	Jawa Tengah	BNNP Jawa Tengah	Kelurahan Kembangarum	Semarang Barat	Kota Semarang
108	Jawa Tengah	BNN Kab. Temanggung	Desa Wanutengah	Parakan	Kabupaten Temanggung
109	Jawa Tengah	BNN Kota Surakarta	Kelurahan Setabelan	Banjarsari	Kota Surakarta
110	Jawa Tengah	BNN Kab. Magelang	Desa Ngadirojo	Secang	Kabupaten Magelang
111	Jawa Tengah	BNN Kab. Kendal	Desa Tosari	Brangsong	Kabupaten Kendal
112	Jawa Tengah	BNN Kab. Kendal	Desa Penyangkringan	Weleri	Kabupaten Kendal
113	Jawa Tengah	BNN Kab. Purbalingga	Desa Binangun	Mrebet	Kabupaten Purbalingga
114	Jawa Tengah	BNN Kab. Purbalingga	Desa Dagan	Bobotsari	Kabupaten Purbalingga
115	Jawa Tengah	BNN Kab. Batang	Kelurahan Proyonanggan Tengah	Batang	Kabupaten Batang

No.	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
116	DI Yogyakarta	BNNP DI Yogyakarta	Kalurahan Karangduwet	Paliyan	Kabupaten Gunung Kidul
117	DI Yogyakarta	BNN Kab. Sleman	Kalurahan Maguwoharjo	Depok	Kabupaten Sleman
118	Jawa Timur	BNNP Jawa Timur	Desa Sambong Dukuh	Jombang	Kabupaten Jombang
119	Jawa Timur	BNN Kab. Gresik	Desa Suci	Manyar	Kabupaten Gresik
120	Jawa Timur	BNN Kab. Gresik	Desa Leran	Manyar	Kabupaten Gresik
121	Jawa Timur	BNN Kab. Sidoarjo	Desa Gemurung	Gedangan	Kabupaten Sidoarjo
122	Jawa Timur	BNN Kab. Trenggalek	Desa Karanggandu	Watulimo	Kabupaten Trenggalek
123	Jawa Timur	BNN Kab. Trenggalek	Desa Ngepeh	Tugu	Kabupaten Trenggalek
124	Jawa Timur	BNN Kab. Lumajang	Kelurahan Rogotrunan	Lumajang	Kabupaten Lumajang
125	Jawa Timur	BNN Kab. Nganjuk	Kelurahan Payaman	Nganjuk	Kabupaten Nganjuk
126	Jawa Timur	BNN Kab. Nganjuk	Desa Bareng	Sawahan	Kabupaten Nganjuk
127	Jawa Timur	BNN Kab. Tulungagung	Desa Plosokandang	Kedungwaru	Kabupaten Tulungagung
128	Jawa Timur	BNN Kab. Tulungagung	Desa Pulerejo	Ngantru	Kabupaten Tulungagung
129	Jawa Timur	BNN Kab. Pasuruan	Desa Bulusari	Gempol	Kabupaten Pasuruan
130	Jawa Timur	BNN Kab. Pasuruan	Desa Winong	Gempol	Kabupaten Pasuruan
131	Jawa Timur	BNN Kota Kediri	Kelurahan Tamanan	Mojoaroto	Kota Kediri
132	Jawa Timur	BNN Kota Malang	Kelurahan Mergosono	Kedungkandang	Kota Malang
133	Jawa Timur	BNN Kota Malang	Kelurahan Kasin	Klojen	Kota Malang
134	Jawa Timur	BNN Kab. Kediri	Desa Doko	Ngasem	Kabupaten Kediri
135	Jawa Timur	BNN Kab. Malang	Desa Ngijo	Karangploso	Kabupaten Malang
136	Jawa Timur	BNN Kab. Sumenep	Desa Torbang	Batuan	Kabupaten Sumenep
137	Jawa Timur	BNN Kab. Sumenep	Desa Slopeng	Dasuk	Kabupaten Sumenep
138	Kalimantan Barat	BNNP Kalimantan Barat	Desa Pemangkat Kota	Pemangkat	Kabupaten Sambas
139	Kalimantan Barat	BNNP Kalimantan Barat	Desa Dalam Kaum	Sambas	Kabupaten Sambas
140	Kalimantan Barat	BNN Kota Pontianak	Kelurahan Akcaya	Pontianak Selatan	Kota Pontianak
141	Kalimantan Barat	BNN Kota Pontianak	Kelurahan Siantan Hulu	Pontianak Utara	Kota Pontianak
142	Kalimantan Barat	BNN Kab. Kubu Raya	Desa Mekar Sari	Sungai Raya	Kabupaten Kubu Raya
143	Kalimantan Barat	BNN Kab. Mempawah	Desa Anjungan Dalam	Anjungan	Kabupaten Mempawah
144	Kalimantan Barat	BNN Kota Singkawang	Kelurahan Condong	Singkawang Tengah	Kota Singkawang
145	Kalimantan Barat	BNN Kota Singkawang	Kelurahan Melayu	Singkawang Barat	Kota Singkawang
146	Kalimantan Barat	BNN Kab. Sanggau	Desa Binjai	Tayan Hulu	Kabupaten Sanggau
147	Kalimantan Barat	BNN Kab. Sanggau	Desa Sosok	Tayan Hulu	Kabupaten Sanggau
148	Kalimantan Barat	BNN Kab. Bengkayang	Desa Belimbing	Lumar	Kabupaten Bengkayang
149	Kalimantan Barat	BNN Kab. Bengkayang	Desa Bani Amas	Bengkayang	Kabupaten Bengkayang

No.	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
150	Kalimantan Tengah	BNNP Kalimantan Tengah	Desa Tanjung Karitak	Sepang	Kabupaten Gunung Mas
151	Kalimantan Tengah	BNNP Kalimantan Tengah	Kelurahan Palangka	Jekan Raya	Kota Palangka Raya
152	Kalimantan Tengah	BNN Kota Palangkaraya	Kelurahan Tumbang Rungan	Pahandut	Kota Palangka Raya
153	Kalimantan Tengah	BNN Kota Palangkaraya	Kelurahan Menteng	Jekan Raya	Kota Palangka Raya
154	Kalimantan Tengah	BNN Kota Palangkaraya	Kelurahan Petuk Katimpun	Jekan Raya	Palangka Raya
155	Kalimantan Tengah	BNN Kab. Kotawaringin Barat	Kelurahan Kumai Hilir	Kumai	Kabupaten Kotawaringin Barat
156	Kalimantan Selatan	BNN Kota Banjarbaru	Kelurahan Syamsudin Noor	Landasan Ulin	Kota Banjarbaru
157	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Balangan	Desa Balida	Paringin	Kabupaten Balangan
158	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Balangan	Desa Batu Mandi	Batu Mandi	Kabupaten Balangan
159	Kalimantan Timur	BNN Kota Samarinda	Kelurahan Sido Damai	Samarinda Ilir	Kota Samarinda
160	Kalimantan Timur	BNN Kota Samarinda	Kelurahan Sungai Kapih	Sambutan	Kota Samarinda
161	Kalimantan Utara	BNNP Kalimantan Utara	Kelurahan Pantai Amal	Tarakan Timur	Kota Tarakan
162	Kalimantan Utara	BNNP Kalimantan Utara	Kelurahan Kampung 1 Skip	Tarakan Tengah	Kota Tarakan
163	Kalimantan Utara	BNN Kota Tarakan	Kelurahan Pamusian	Tarakan Tengah	Kota Tarakan
164	Kalimantan Utara	BNN Kab. Nunukan	Desa Liang Bunyu	Sebatik Barat	Kabupaten Nunukan
165	Sulawesi Utara	BNNP Sulawesi Utara	Kelurahan Paniki Bawah	Mapanget	Kota Manado
166	Sulawesi Utara	BNNP Sulawesi Utara	Desa Kalasey Satu	Mandolang	Kabupaten Minahasa
167	Sulawesi Utara	BNN Kab. Bolaang Mongondow	Desa Poigar I	Poigar	Kabupaten Bolaang Mongondow
168	Sulawesi Utara	BNN Kab. Bolaang Mongondow	Desa Bakan	Lolayan	Kabupaten Bolaang Mongondow
169	Sulawesi Utara	BNN Kota Bitung	Kelurahan Bitung Timur	Maesa	Kota Bitung
170	Sulawesi Utara	BNN Kota Bitung	Kelurahan Bitung Barat Satu	Maesa	Kota Bitung
171	Sulawesi Utara	BNN Kota Manado	Kelurahan Bahu	Malalayang	Kota Manado
172	Sulawesi Utara	BNN Kota Manado	Kelurahan Ketang Baru	Singkil	Kota Manado
173	Sulawesi Utara	BNN Kab. Kepulauan Sangihe	Desa Bira	Tabukan Tengah	Kabupaten Kepulauan Sangihe
174	Sulawesi Utara	BNN Kab. Kepulauan Sangihe	Desa Utaurano	Tabukan Utara	Kabupaten Kepulauan Sangihe
175	Sulawesi Tengah	BNNP Sulawesi Tengah	Desa Tinggede Selatan	Marawola	Kabupaten Sigi
176	Sulawesi Tengah	BNN Kota Palu	Kelurahan Lere	Palu Barat	Kota Palu
177	Sulawesi Tengah	BNN Kota Palu	Kelurahan Baru	Palu Barat	Kota Palu
178	Sulawesi Tengah	BNN Kab. Donggala	Kelurahan Kabonga Besar	Banawa	Kabupaten Donggala
179	Sulawesi Tengah	BNN Kab. Tojo Una Una	Desa Saluaba	Ampana Kota	Kabupaten Tojo Una-Una
180	Sulawesi Tengah	BNN Kab. Tojo Una Una	Kelurahan Bailo	Ampana Kota	Kabupaten Tojo Una-Una
181	Sulawesi Selatan	BNNP Sulawesi Selatan	Desa Kanjilo	Barombong	Kabupaten Gowa

No.	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
182	Sulawesi Selatan	BNN Kab. Tana Toraja	Lembang Banga	Rembon	Kabupaten Tana Toraja
183	Sulawesi Selatan	BNN Kab. Bone	Kelurahan Padaelo	Mare	Kabupaten Bone
184	Sulawesi Tenggara	BNNP Sulawesi Tenggara	Kelurahan Lalosabila	Wawotobi	Kabupaten Konawe
185	Sulawesi Tenggara	BNN Kab. Kolaka	Desa Tikonu	Wundulako	Kabupaten Kolaka
186	Sulawesi Tenggara	BNN Kota Kendari	Kelurahan Anduonohu	Poasia	Kota Kendari
187	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	Kelurahan Binanga	Mamuju	Kabupaten Mamuju
188	Maluku	BNNP Maluku	Kelurahan Benteng	Nusaniwe	Kota Ambon
189	Maluku	BNN Kab. Buru Selatan	Desa Kamlanglale	Namrole	Kabupaten Buru Selatan
190	Maluku	BNN Kota Tual	Kelurahan Fiditan	Pulau Dullah Utara	Kota Tual
191	Maluku	BNN Kota Tual	Kelurahan Ketsoblak	Pulau Dullah Selatan	Kota Tual
192	Bali	BNNP Bali	Kelurahan Kawan	Bangli	Kabupaten Bangli
193	Bali	BNN Kab. Karangasem	Desa Selat	Selat	Kabupaten Karangasem
194	Bali	BNN Kab. Karangasem	Kelurahan Subagan	Karangasem	Kabupaten Karangasem
195	Bali	BNN Kota Denpasar	Desa Dauh Puri Kelod	Denpasar Barat	Kota Denpasar
196	Bali	BNN Kota Denpasar	Desa Sidakarya	Denpasar Selatan	Kota Denpasar
197	NTB	BNNP NTB	Kelurahan Leneng	Praya	Kabupaten Lombok Tengah
198	NTB	BNN Kab. Bima	Kelurahan Melayu	Asakota	Kota Bima
199	NTB	BNN Kota Mataram	Kelurahan Dayan Peken	Ampenan	Kota Mataram
200	NTB	BNN Kota Mataram	Kelurahan Cakranegara Timur	Cakranegara	Kota Mataram
201	NTB	BNN Kab. Sumbawa Barat	Desa Telaga Bertong	Taliwang	Kabupaten Sumbawa Barat
202	NTB	BNN Kab. Sumbawa Barat	Desa Tepas Sepakat	Brang Rea	Kabupaten Sumbawa Barat
203	NTB	BNN Kab. Sumbawa	Desa Kerato	Unter Iwes	Kabupaten Sumbawa
204	NTB	BNN Kab. Sumbawa	Desa Pungkit	Lopok	Kabupaten Sumbawa
205	Gorontalo	BNNP Gorontalo	Desa Buntulia Selatan	Duhiadaa	Kabupaten Pohuwato
206	Gorontalo	BNNP Gorontalo	Desa Buntulia Tengah	Buntulia	Kabupaten Pohuwato
207	Papua	BNN Kab. Jayapura	Kampung Sentani Kota	Distrik Sentani	Kabupaten Jayapura
208	Papua Barat	BNNP Papua Barat	Kelurahan Wosi	Distrik Manokwari Barat	Kabupaten Manokwari
209	Papua Barat	BNNP Papua Barat	Kampung Arowi	Distrik Manokwari Timur	Kabupaten Manokwari
Berkembang (105 unit)					
1	Aceh	BNNP Aceh	Desa Lamgapang	Krueng Barona Jaya	Kabupaten Aceh Besar
2	Aceh	BNN Kota Banda Aceh	Gampong Deah Glumpang	Meuraxa	Kota Banda Aceh
3	Aceh	BNN Kab. Bireuen	Gampong Cot Trieng	Kuala	Kabupaten Bireuen
4	Aceh	BNN Kota Lhokseumawe	Gampong Sawang	Sawang	Kabupaten Aceh Utara

No.	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
5	Aceh	BNN Kota Lhokseumawe	Gampong Blang Banyak	Sawang	Kabupaten Aceh Utara
6	Aceh	BNN Kab. Aceh Tamiang	Kelurahan Alur Cucur	Rantau	Kabupaten Aceh Tamiang
7	Aceh	BNN Kab. Aceh Tamiang	Gampong Alur Manis	Rantau	Kabupaten Aceh Tamiang
8	Aceh	BNN Kota Langsa	Gampong Blang	Langsa Kota	Kota Langsa
9	Aceh	BNN Kota Langsa	Gampong Lhok Banie	Langsa Barat	Kota Langsa
10	Aceh	BNN Kab. Aceh Selatan	Gampong Paya Ateuk	Pasie Raja	Kabupaten Aceh Selatan
11	Aceh	BNN Kab. Aceh Selatan	Gampong Silolo	Pasie Raja	Kabupaten Aceh Selatan
12	Aceh	BNN Kab. Gayo Lues	Gampong Ume Lah	Blang Pegayon	Kabupaten Gayo Lues
13	Aceh	BNN Kab. Gayo Lues	Gampong Rak Lunung	Blangkejeren	Kabupaten Gayo Lues
14	Sumatera Utara	BNN Kab. Tapanuli Selatan	Desa Garoga	Batang Toru	Kabupaten Tapanuli Selatan
15	Sumatera Utara	BNN Kab. Tapanuli Selatan	Desa Huta Godang	Batang Toru	Kabupaten Tapanuli Selatan
16	Sumatera Utara	BNN Kab. Batu Bara	Desa Sumber Tani	Datuk Tanah Datar	Kabupaten Batu Bara
17	Sumatera Utara	BNN Kab. Batu Bara	Desa Binjai Baru	Datuk Tanah Datar	Kabupaten Batu Bara
18	Riau	BNNP Riau	Desa Semunai	Pinggir	Kabupaten Bengkalis
19	Riau	BNNP Riau	Kelurahan Perawang	Tualang	Kabupaten Siak
20	Riau	BNN Kab. Kuantan Singingi	Desa Beringin Taluk	Kuantan Tengah	Kabupaten Kuantan Singingi
21	Riau	BNN Kab. Kuantan Singingi	Desa Gunung Kesiangan	Benai	Kabupaten Kuantan Singingi
22	Riau	BNN Kab. Pelalawan	Desa Lubuk Ogung	Bandar Seikijang	Kabupaten Pelalawan
23	Riau	BNN Kota Pekanbaru	Kelurahan Simpang Tiga	Bukit Raya	Kota Pekanbaru
24	Riau	BNN Kota Dumai	Kelurahan Teluk Binjai	Dumai Timur	Kota Dumai
25	Riau	BNN Kota Dumai	Kelurahan Bagan Besar	Bukit Kapur	Kota Dumai
26	Jambi	BNN Kab Batang Hari	Desa Senaning	Pemayung	Kabupaten Batang Hari
27	Sumatera Selatan	BNNP Sumatera Selatan	Desa Sungai Gerong	Banyuasin I	Kabupaten Banyuasin
28	Sumatera Selatan	BNNP Sumatera Selatan	Desa Sungai Rebo	Banyuasin I	Kabupaten Banyuasin
29	Sumatera Selatan	BNN Kab. Empat Lawang	Desa Talang Baru	Muara Pinang	Kabupaten Empat Lawang
30	Sumatera Selatan	BNN Kab. Empat Lawang	Desa Gedung Agung	Muara Pinang	Kabupaten Empat Lawang
31	Kep. Bangka Belitung	BNN Kab. Bangka	Desa Pemali	Pemali	Kabupaten Bangka
32	Kep. Bangka Belitung	BNN Kab. Bangka Selatan	Kelurahan Tanjung Ketapang	Toboali	Kabupaten Bangka Selatan
33	Kepulauan Riau	BNNP Kep. Riau	Kelurahan Tanjung Riau	Sekupang	Kota Batam
34	Kepulauan Riau	BNNP Kep. Riau	Kelurahan Batu Besar	Nongsa	Kota Batam
35	Kepulauan Riau	BNN Kota Batam	Kelurahan Patam Lestari	Kecamatan Sekupang	Kota Batam
36	Kepulauan Riau	BNN Kota Batam	Kelurahan Sei Harapan	Kecamatan Sekupang	Kota Batam
37	Kepulauan Riau	BNN Kota Tanjung Pinang	Kelurahan Batu IX	Tanjung Pinang Timur	Kota Tanjung Pinang

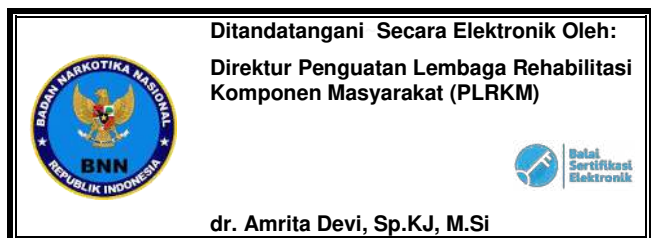
No.	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
38	Bengkulu	BNNP Bengkulu	Kelurahan Kandang Mas	Kampung Melayu	Kota Bengkulu
39	Bengkulu	BNNP Bengkulu	Kelurahan Panorama	Singaran Pati	Kota Bengkulu
40	Bengkulu	BNN Kab. Bengkulu Selatan	Desa Padang Niur	Kota Manna	Kabupaten Bengkulu Selatan
41	Bengkulu	BNN Kab. Bengkulu Selatan	Desa Batu Lambang	Pasar Manna	Kabupaten Bengkulu Selatan
42	Bengkulu	BNN Kab. Bengkulu Selatan	Desa Simpang Pino	Ulu Manna	Kabupaten Bengkulu Selatan
43	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Timur	Kelurahan Cakung Timur	Cakung	Kota Administrasi Jakarta Timur
44	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Timur	Kelurahan Jati	Pulogadung	Kota Administrasi Jakarta Timur
45	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Timur	Kelurahan Penggilingan	Cakung	Kota Administrasi Jakarta Timur
46	Banten	BNN Kota Tangerang Selatan	Kelurahan Sawah Baru	Ciputat	Kota Tangerang Selatan
47	Banten	BNN Kota Tangerang	Kelurahan Karawaci Baru	Karawaci	Kota Tangerang
48	Jawa Barat	BNN Kota Depok	Kelurahan Ratu Jaya	Cipayung	Kota Depok
49	Jawa Barat	BNN Kota Depok	Kelurahan Pondok Jaya	Cipayung	Kota Depok
50	Jawa Barat	BNN Kab. Sumedang	Desa Cikeruh	Jatinangor	Kabupaten Sumedang
51	Jawa Barat	BNN Kota Cirebon	Kelurahan Lemahwungkuk	Lemahwungkuk	Kota Cirebon
52	Jawa Tengah	BNN Kota Tegal	Kelurahan Pekauman	Tegal Barat	Kota Tegal
53	Jawa Tengah	BNN Kota Tegal	Kelurahan Keturen	Tegal Selatan	Kota Tegal
54	Jawa Tengah	BNN Kab. Cilacap	Kelurahan Gumilir	Cilacap Utara	Kabupaten Cilacap
55	Jawa Tengah	BNN Kab. Cilacap	Kelurahan Mertasinga	Cilacap Utara	Kabupaten Cilacap
56	Kalimantan Barat	BNN Kab. Sintang	Desa Sungai Uko	Sungai Tebelian	Kabupaten Sintang
57	Kalimantan Barat	BNN Kab. Sintang	Desa Nanga Sepauk	Sepauk	Kabupaten Sintang
58	Kalimantan Selatan	BNNP Kalimantan Selatan	Kelurahan Sungai Besar	Banjarbaru Selatan	Kota Banjarbaru
59	Kalimantan Selatan	BNN Kota Banjarmasin	Kelurahan Pelambuan	Banjarmasin Barat	Kota Banjarmasin
60	Kalimantan Selatan	BNN Kota Banjarmasin	Kelurahan Teluk Dalam	Banjarmasin Tengah	Kota Banjarmasin
61	Kalimantan Selatan	BNN Kota Banjarbaru	Kelurahan Landasan Ulin Tengah	Liang Anggang	Kota Banjarbaru
62	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Barito Kuala	Desa Tabukan Raya	Tabukan	Kabupaten Barito Kuala
63	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Barito Kuala	Desa Pantang Raya	Tabukan	Kabupaten Barito Kuala
64	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Hulu Sungai Selatan	Desa Sungai Mandala	Daha Utara	Kabupaten Hulu Sungai Selatan
65	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Hulu Sungai Selatan	Desa Samuda	Daha Selatan	Kabupaten Hulu Sungai Selatan
66	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Tanah Laut	Kelurahan Sarang Halang	Pelaihari	Kabupaten Tanah Laut
67	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Tanah Laut	Desa Panggung Baru	Pelaihari	Kabupaten Tanah Laut
68	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Tabalong	Desa Maburai	Murung Pudak	Kabupaten Tabalong
69	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Tabalong	Desa Karang Putih	Kelua	Kabupaten Tabalong
70	Kalimantan Timur	BNN Kota Bontang	Kelurahan Bontang Kuala	Bontang Utara	Kota Bontang

No.	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
71	Sulawesi Tengah	BNNP Sulawesi Tengah	Desa Lolu	Sigi Biromaru	Kabupaten Sigi
72	Sulawesi Tengah	BNN Kab. Banggai Kepulauan	Desa Kautu	Tinangkung	Kabupaten Banggai Kepulauan
73	Sulawesi Tengah	BNN Kab. Banggai Kepulauan	Desa Saiyong	Tinangkung	Kabupaten Banggai Kepulauan
74	Sulawesi Selatan	BNNP Sulawesi Selatan	Kelurahan Bontorannu	Mariso	Kota Makassar
75	Sulawesi Selatan	BNNP Sulawesi Selatan	Kelurahan Kampung Buyang	Mariso	Kota Makassar
76	Sulawesi Selatan	BNNP Sulawesi Selatan	Desa Ma'rumpa	Marusu	Kabupaten Maros
77	Sulawesi Selatan	BNN Kab. Bone	Desa Kadai	Mare	Kabupaten Bone
78	Sulawesi Selatan	BNN Kab. Palopo	Kelurahan Boting	Wara	Kota Palopo
79	Sulawesi Selatan	BNN Kab. Palopo	Kelurahan Batupasi	Wara Utara	Kota Palopo
80	Sulawesi Tenggara	BNNP Sulawesi Tenggara	Kelurahan Wawotobi	Wawotobi	Kabupaten Konawe
81	Sulawesi Tenggara	BNNP Sulawesi Tenggara	Kelurahan Kadia	Kadia	Kota Kendari
82	Sulawesi Tenggara	BNN Kab. Muna	Desa Masalili	Kontunaga	Kabupaten Muna
83	Sulawesi Tenggara	BNN Kab. Kolaka	Kelurahan Watuliandu	Kolaka	Kabupaten Kolaka
84	Sulawesi Tenggara	BNN Kota Kendari	Kel. Puwatu	Puwatu	Kota Kendari
85	Sulawesi Tenggara	BNN Kota Baubau	Kelurahan Wale	Wolio	Kota Baubau
86	Sulawesi Tenggara	BNN Kota Baubau	Kelurahan Lanto	Batupoaro	Kota Baubau
87	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	Desa Karossa	Desa Karossa	Kabupaten Mamuju Tengah
88	Sulawesi Barat	BNN Kab. Polewali Mandar	Kelurahan Sidodadi	Wonomulyo	Kabupaten Polewali Mandar
89	Sulawesi Barat	BNN Kab. Polewali Mandar	Desa Mapilli Barat	Luyo	Kabupaten Polewali Mandar
90	Maluku	BNNP Maluku	Kelurahan Waihaong	Nusaniwe	Kota Ambon
91	Maluku Utara	BNNP Maluku Utara	Kelurahan Salahudin	Ternate Tengah	Kota Ternate
92	Maluku Utara	BNN Kab. Morotai	Desa Muhajirin	Morotai Selatan	Kabupaten Pulau Morotai
93	Maluku Utara	BNN Kab. Morotai	Desa Pandanga	Morotai Selatan	Kabupaten Pulau Morotai
94	Maluku Utara	BNN Kab. Tidore Kepulauan	Kelurahan Goto	Tidore	Kota Tidore Kepulauan
95	NTT	BNNP NTT	Kelurahan Sikumana	Maulafa	Kota Kupang
96	NTT	BNNP NTT	Desa Noelbaki	Kupang Tengah	Kabupaten Kupang
97	NTT	BNN Kota Kupang	Kelurahan Oebufu	Kecamatan Oebobo	Kota Kupang
98	NTT	BNN Kota Kupang	Kelurahan Pasir Panjang	Kecamatan Kota Lama	Kota Kupang
99	Gorontalo	BNN Kab. Boalemo	Desa Dulangeya	Botumoito	Kabupaten Boalemo
100	Gorontalo	BNN Kab. Boalemo	Desa Polohungo	Dulupi	Kabupaten Boalemo
101	Gorontalo	BNN Kota Gorontalo	Kelurahan Tapa	Sipatana	Kota Gorontalo
102	Gorontalo	BNN Kab. Bone Bolango	Desa Kramat	Tapa	Kabupaten Bone Bolango
103	Gorontalo	BNN Kab. Bone Bolango	Desa Luwohu	Botupingge	Kabupaten Bone Bolango

No.	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
104	Gorontalo	BNN Kab. Gorontalo Utara	Desa Moluo	Kwandang	Kabupaten Gorontalo Utara
105	Papua	BNN Kab. Mimika	Kampung Kamoro Jaya	Wania	Kabupaten Mimika
Tumbuh (58 unit)					
1	Aceh	BNNP Aceh	Gampong Lampanah Ineu	Sukamakmur	Kabupaten Aceh Besar
2	Aceh	BNN Kota Banda Aceh	Gampong Peunyeurat	Banda Raya	Kota Banda Aceh
3	Aceh	BNN Kota Banda Aceh	Gampong Lampulo	Kuta Alam	Kota Banda Aceh
4	Aceh	BNN Kab. Pidie Jaya	Gampong Meunasah Balek	Meureudu	Kabupaten Pidie Jaya
5	Aceh	BNN Kab. Pidie Jaya	Gampong Manyang Cut	Meureudu	Kabupaten Pidie Jaya
6	Aceh	BNN Kota Sabang	Gampong Cot Ba'u	Sukajaya	Kota Sabang
7	Sumatera Barat	BNN Kota Sawahlunto	Desa Kolok Nan Tuo	Barangin	Kota Sawahlunto
8	Sumatera Barat	BNN Kota Sawahlunto	Desa Talawi Hilir	Talawi	Kota Sawahlunto
9	Sumatera Barat	BNN Kab. Payakumbuh	Kelurahan Koto Tengah	Payakumbuh Barat	Kota Payakumbuh
10	Riau	BNN Kab. Pelalawan	Desa Mulya Subur	Pangkalan Lesung	Kabupaten Pelalawan
11	Sumatera Selatan	BNN Kab. Muara Enim	Desa Karang Raja	Muara Enim	Kabupaten Muara Enim
12	Sumatera Selatan	BNN Kab. Muara Enim	Desa Tegal Rejo	Lawang Kidul	Kabupaten Muara Enim
13	Sumatera Selatan	BNN Kab. Musi Rawas	Desa Tanah Periuk	Muara Beliti	Kabupaten Musi Rawas
14	Sumatera Selatan	BNN Kab. Musi Rawas	Desa Karang Panggung	Selangit	Kabupaten Musi Rawas
15	Sumatera Selatan	BNN Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Desa Gumawang	Belitang	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
16	Sumatera Selatan	BNN Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Desa Kotabaru Selatan	Martapura	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
17	Kep. Bangka Belitung	BNNP Kep. Bangka Belitung	Kelurahan Tanjung	Muntok	Kabupaten Bangka Barat
18	Kep. Bangka Belitung	BNN Kab. Belitung	Desa Dukong	Tanjung Pandan	Kabupaten Belitung
19	Kep. Bangka Belitung	BNN Kab. Belitung	Desa Tanjung Binga	Sujuk	Kabupaten Belitung
20	Kep. Bangka Belitung	BNN Kab. Belitung	Desa Air Merbau	Tanjungpandan	Kabupaten Belitung
21	Kepulauan Riau	BNNP Kep. Riau	Desa Sebong Lagoi	Teluk Sebong	Kabupaten Bintan
22	Kepulauan Riau	BNN Kota Tanjung Pinang	Kelurahan Bukit Cermin	Tanjung Pinang Barat	Kota Tanjung Pinang
23	Jawa Barat	BNN Kab. Sumedang	Desa Sayang	Jatinangor	Kabupaten Sumedang
24	Jawa Timur	BNN Kab. Blitar	Desa Penataran	Nglegok	Kabupaten Blitar
25	Kalimantan Tengah	BNNP Kalimantan Tengah	Desa Petak Bahandang	Kurun	Kabupaten Gunung Mas
26	Kalimantan Selatan	BNNP Kalimantan Selatan	Kelurahan Loktabat Utara	Banjarbaru Utara	Kota Banjarbaru
27	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Hulu Sungai Utara	Desa Sungai Karias	Amuntai Tengah	Kabupaten Hulu Sungai Utara
28	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Hulu Sungai Utara	Desa Lok Bangkai	Banjang	Kabupaten Hulu Sungai Utara
29	Kalimantan Timur	BNNP Kalimantan Timur	Desa Tanjung Limau	Muara Badak	Kabupaten Kutai Kartanegara
30	Kalimantan Timur	BNN Kota Balikpapan	Kelurahan Karang Jati	Balikpapan Tengah	Kota Balikpapan

No.	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
31	Kalimantan Timur	BNN Kota Balikpapan	Kelurahan Sumber Rejo	Balikipapan Tengah	Kota Balikpapan
32	Kalimantan Timur	BNN Kota Bontang	Kelurahan Guntung	Bontang Utara	Kota Bontang
33	Kalimantan Utara	BNN Kab. Nunukan	Desa Binalawan	Sebatik Barat	Kabupaten Nunukan
34	Sulawesi Tengah	BNN Kab. Poso	Kelurahan Gebangrejo	Poso Kota	Kabupaten Poso
35	Sulawesi Tengah	BNN Kab. Poso	Kelurahan Mapane	Poso Pesisir	Kabupaten Poso
36	Sulawesi Tengah	BNN Kab. Morowali	Desa Bahonsuai	Bumi Raya	Kabupaten Morowali
37	Sulawesi Selatan	BNN Kab. Tana Toraja	Lembang Sa'tandung	Saluputti	Kabupaten Tana Toraja
38	Sulawesi Tenggara	BNN Kab. Muna	Desa Lasalepa	Lasalepa	Kabupaten Muna
39	Sulawesi Tenggara	BNN Kab. Kolaka	Desa Pelambua	Pomalaa	Kabupaten Kolaka
40	Maluku Utara	BNNP Maluku Utara	Kelurahan Bastiong Talangame	Ternate Selatan	Kota Ternate
41	Maluku Utara	BNN Kab. Tidore Kepulauan	Kelurahan Cobodoe	Tidore Timur	Kota Tidore Kepulauan
42	Maluku Utara	BNN Kab. Halmahera Utara	Desa Gosoma	Tobelo	Kabupaten Halmahera Utara
43	Bali	BNNP Bali	Kelurahan Bebalang	Bangli	Kabupaten Bangli
44	Bali	BNN Kab. Gianyar	Desa Serongga	Gianyar	Kabupaten Gianyar
45	Bali	BNN Kab. Gianyar	Desa Bedulu	Blahbatuh	Kabupaten Gianyar
46	Bali	BNN Kab. Klungkung	Desa Banjarangkan	Banjarangkan	Kabupaten Klungkung
47	Bali	BNN Kab. Klungkung	Desa Kusamba	Dawan	Kabupaten Klungkung
48	Bali	BNN Kab. Badung	Desa Ungasan	Kuta Selatan	Kabupaten Badung
49	Bali	BNN Kab. Badung	Desa Darmasaba	Abiansemal	Kabupaten Badung
50	Bali	BNN Kab. Badung	Desa Dalung	Kuta Utara	Kab. Badung
51	Bali	BNN Kab. Badung	Kel. Legian	Kuta	Kab. Badung
52	NTB	BNN Kab. Sumbawa	Desa Batu Tering	Moyo Hulu	Kabupaten Sumbawa
53	NTT	BNN Kab. Belu	Kelurahan Beirafu	Atambua Barat	Kabupaten Belu
54	NTT	BNN Kab. Belu	Desa Napan	Bikomi Utara	Kabupaten Timor Tengah Utara
55	NTT	BNN Kab. Rote Ndao	Desa Boa	Rote Barat	Kabupaten Rote Ndao
56	Gorontalo	BNN Kota Gorontalo	Kelurahan Moodu	Kota Timur	Kota Gorontalo
57	Gorontalo	BNN Kab. Gorontalo	Desa Luhu	Telaga	Kabupaten Gorontalo
58	Gorontalo	BNN Kab. Gorontalo	Kelurahan Dutulanaa	Limboto	Kabupaten Gorontalo
Rintisan (16 unit)					
1	Aceh	BNN Kota Sabang	Gampong le Meulee	Sukajaya	Kota Sabang
2	Kep. Bangka Belitung	BNNP Kep. Bangka Belitung	Kelurahan Kelapa	Kelapa	Kabupaten Bangka Barat
3	Kep. Bangka Belitung	BNN Kab. Bangka	Kelurahan Sungailiat	Sungai Liat	Kabupaten Bangka
4	Banten	BNN Kota Tangerang	Kel. Sangiang Jaya	Periuk	Kota Tangerang
5	Banten	BNN Kota Tangerang	Kel. Benda	Benda	Kota Tangerang
6	Banten	BNN Kota Tangerang	Kel. Sukasari	Tangerang	Kota Tangerang

No.	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
7	Kalimantan Timur	BNNP Kalimantan Timur	Desa Batu Kajang	Batu Sopang	Kabupaten Paser
8	Kalimantan Timur	BNN Kota Balikpapan	Kelurahan Batu Ampar	Balikpapan Utara	Kota Balikpapan
9	Maluku	BNN Kab. Buru Selatan	Desa Grandeng	Lolong Guba	Kabupaten Buru
10	Maluku Utara	BNN Kab. Halmahera Utara	Desa Pune	Galela	Kabupaten Halmahera Utara
11	NTT	BNN Kab. Rote Ndao	Desa Sedeoen	Rote Barat	Kabupaten Rote Ndao
12	Gorontalo	BNN Kab. Gorontalo Utara	Desa Katialada	Kwandang	Kabupaten Gorontalo Utara
13	Papua	BNNP PAPUA	Kampung Skouw Yambe	Muara Tami	Kota Jayapura
14	Papua	BNNP PAPUA	Kampung Skouw Sae	Muara Tami	Kota Jayapura
15	Papua	BNN Kab. Mimika	Kelurahan Koperapoka	Mimika Baru	Kabupaten Mimika
16	Papua	BNN Kab. Jayapura	Kampung Hinekombe	Distrik Sentani	Kabupaten Jayapura
Pra Fase (5 unit)					
1	Riau	BNN Kota Pekanbaru	Kelurahan Simpang Baru	Binawidya	Kota Pekanbaru
2	Jawa Barat	BNN Kab. Kuningan	Desa Langseb	Lebakwangi	Kabupaten Kuningan
3	Kalimantan Timur	BNNP Kalimantan Timur	Kelurahan Teluk Lingga	Sangatta Utara	Kabupaten Kutai Timur
4	Sulawesi Tengah	BNN Kab. Morowali	Desa Emea	Wita Ponda	Kabupaten Morowali
5	Sulawesi Tenggara	BNN Kab. Muna	Kelurahan Watonea	Katobu	Kabupaten Muna

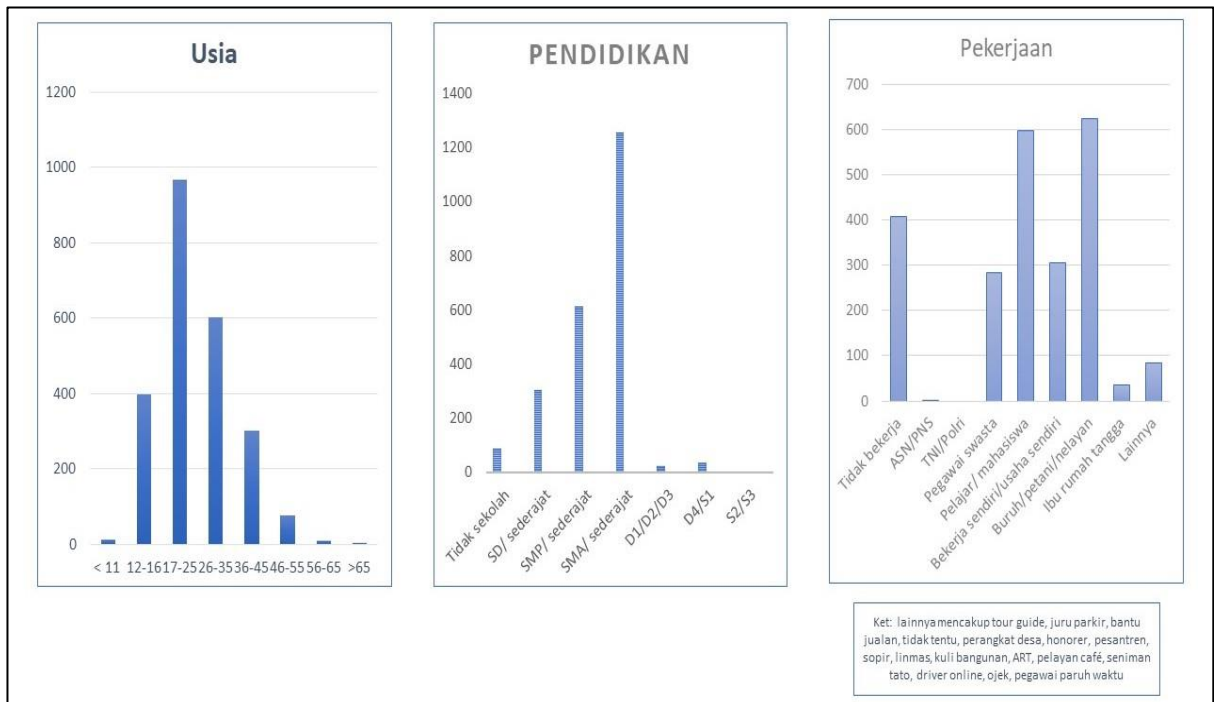


**GAMBARAN KEGIATAN & PROFIL KLIEN IBM BINAAN BNNP & BNNK/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2023**

A. Gambaran kegiatan IBM

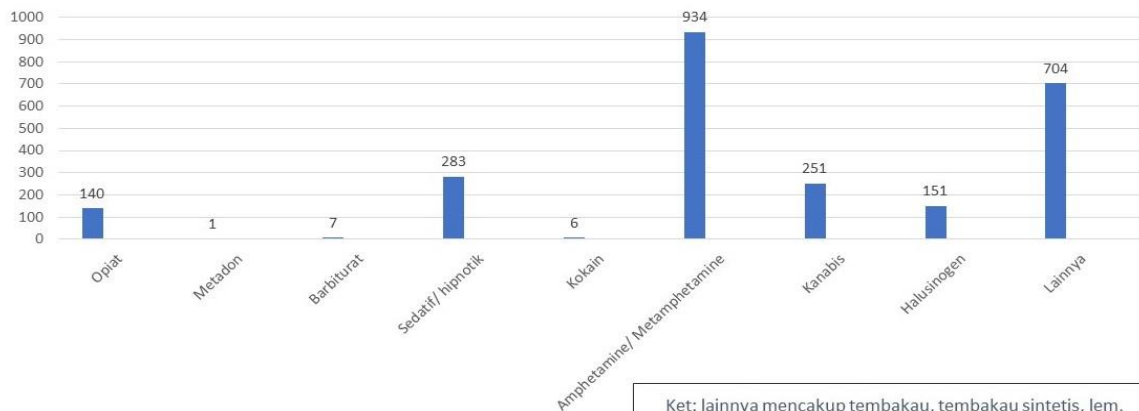


B. Profil klien IBM



Total klien IBM pada tahun 2023 adalah 2.825 orang, mayoritas berasal dari kelompok usia 17-25 tahun, jenjang pendidikan terakhir yang ditamatkan adalah SMA dan sederajat, dan saat mengikuti layanan IBM bekerja sebagai buruh/ petani/ nelayan.

Jenis zat yang digunakan





Ket: lainnya mencakup tembakau, tembakau sintetis, lem, alcohol, cap tikus, mextril, kratom, gorilla, bensin, samcodin, tramadol, dextro, CTM, benzo, zenit, heximer, kecubung, antimo, trihex, LL, neo, riklona, pil sapi, paramex, ISO, komix, carisoprodol, grantusif, kamlet, carnophen, mentine, mixadin, kopi campur betadine, lem kambing, power F, infarsil, esepuluh

Jenis zat utama yang disalahgunakan adalah amphetamine/ metamphetamine, diikuti dengan kelompok sedatif/ hipnotik dan kanabis.



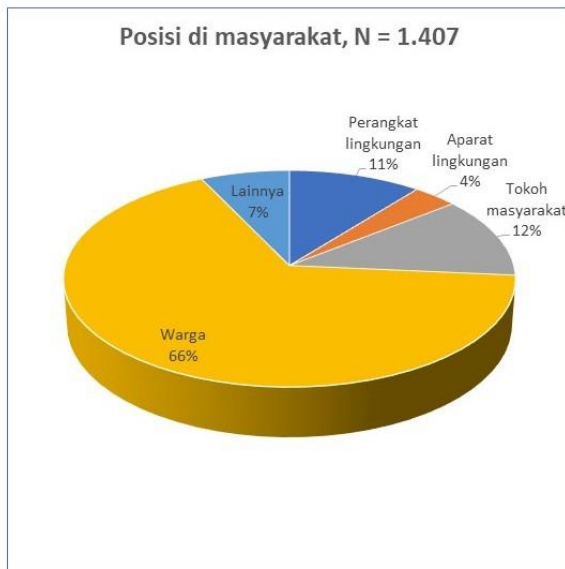
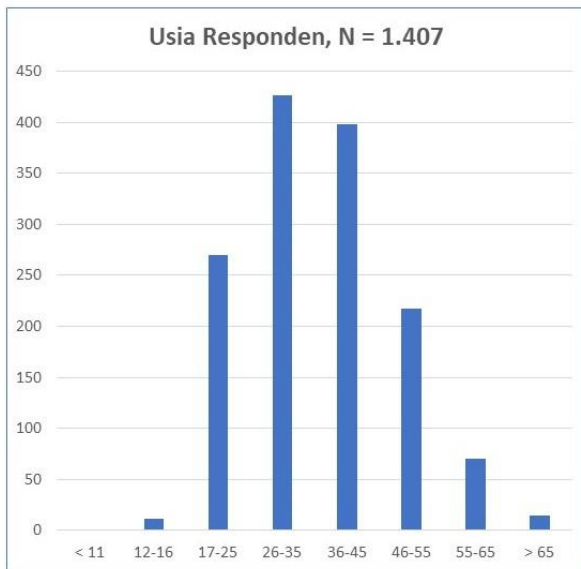
Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
Direktur Penguatan Lembaga Rehabilitasi
Komponen Masyarakat (PLRKM)



dr. Amrita Devi, Sp.KJ, M.Si

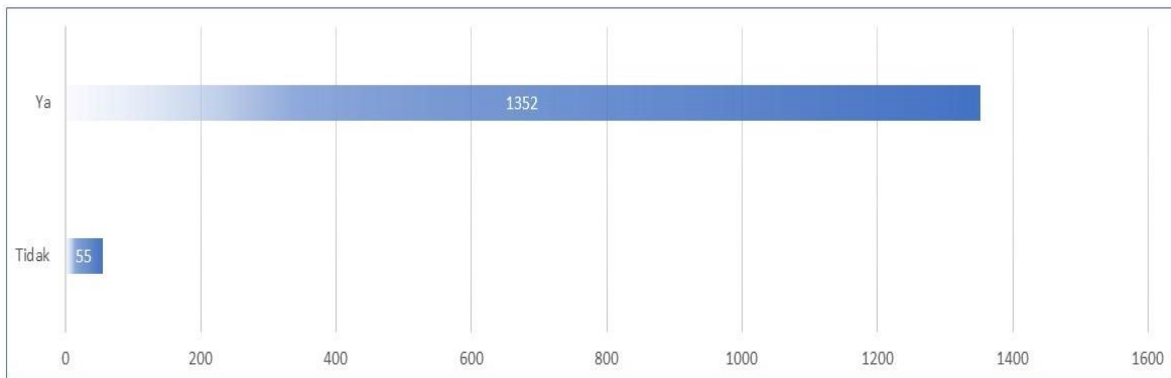
HASIL PEMANTAUAN PROGRAM IBM TERHADAP LINGKUNGAN & MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2023

A. Data demografi responden



Berdasarkan grafik tersebut, diketahui bahwa mayoritas responden survey berada dalam kelompok usia 26-35 tahun, serta merupakan warga setempat di desa/ kelurahan lokasi IBM.

B. Pengetahuan tentang IBM



Berdasarkan grafik tersebut, diketahui bahwa mayoritas responden survey (96,1%) mengetahui tentang keberadaan IBM di desa/ kelurahan tempat mereka berdomisili.



C. Hasil survey

No.	Pernyataan	Definisi Operasional	Skor Rata-rata	Interpretasi
1	Penjelasan dari AP tentang program IBM kepada masyarakat sekitar	Mengenalkan dan melakukan sosialisasi tentang IBM dan menggerakkan partisipasi masyarakat untuk ikut mendukung kegiatan	4	Ada, cukup jelas maksud serta tujuan, dan cukup banyak warga yang tergerak untuk berpartisipasi
2	Perubahan perilaku penyalah guna narkoba setelah pelaksanaan program IBM di lingkungan Bapak/ Ibu	Menilai peran IBM dalam perubahan perilaku kelompok penyalah guna narkoba menurut pengamatan masyarakat	4	Sudah mulai tidak menimbulkan kegaduhan/ keributan yang negatif, kegiatan perkumpulan para penyalah guna sudah tidak terlihat dan sudah jelas mereka sudah berubah
3	Keterlibatan masyarakat dalam membantu pemulihan penyalah guna narkoba di wilayah Bapak/ Ibu	Menilai keterlibatan masyarakat dalam membantu pemulihan penyalah guna narkoba	4	Ada keterlibatan warga yang diwakili pengurus Tingkat desa/ kelurahan, keluarga yang anggotanya mengalami permasalahan narkoba dan banyak komponen masyarakat lain dalam jumlah yang banyak (lebih dari 5 orang)
4	Pendampingan yang dilakukan AP dalam mengubah perilaku penyalah guna narkoba di lingkungan Bapak/ Ibu	Menilai peran AP dalam mendampingi dan memantau para penyalah guna narkoba	4	AP melakukan pendampingan, pemantauan dan pembimbingan secara bersungguh-sungguh pada penyalah guna narkoba

No.	Pernyataan	Definisi Operasional	Skor Rata-rata	Interpretasi
5	Peran AP untuk melibatkan keluarga dalam program IBM	Dampak yang optimal dapat terlihat dari pelibatan keluarga, karena keluarga berperan dalam proses pemulihan penyalah guna narkotika. Dengan melibatkan keluarga, keluarga paham masalah kecanduan dapat terjadi berulang, sehingga pandangan negatif tentang penyalah guna narkotika dari keluarga dapat diminimalkan/ dihilangkan	4	AP melibatkan keluarga, ada upaya pemberian informasi dan pengetahuan, keluarga tidak lagi memandang negatif penyalah guna, dan keluarga berpartisipasi dengan mengajak keluarga lain atau masyarakat untuk mendukung IBM
6	Peran serta para penyalah guna narkotika yang mengikuti program IBM dalam kegiatan sosial di lingkungan tempat tinggal	Menilai, apakah setelah didampingi oleh IBM, mantan penyalah guna narkotika mulai peduli & terlibat dalam kegiatan sosial yang ada di masyarakat	4	Sangat berperan dalam kegiatan



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
**Direktur Penguatan Lembaga Rehabilitasi
Komponen Masyarakat (PLRKM)**

dr. Amrita Devi, Sp.KJ, M.Si

**DAFTAR HASIL IDENTIFIKASI MASALAH DAN REKOMENDASI PROGRAM IBM
TAHUN ANGGARAN 2023**

Kategori	No.	Hasil Identifikasi Masalah	Rekomendasi
Sumber Daya Manusia (SDM)	1	Petugas pendamping IBM di BNNP/K/Kota masih ada yang belum memahami program IBM dari tata kelola, kegiatan & layanan sehingga menjadi hambatan dalam melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap AP dalam menjalankan program IBM. Hal ini mempengaruhi capaian kinerja unit IBM.	Pembina fungsi melakukan pembinaan program IBM secara berkala dengan melibatkan seluruh petugas pendamping IBM.
	2	Kepala Desa/ Lurah tidak menunjukkan kepedulian terhadap program IBM mulai dari proses koordinasi sampai pembentukan unit IBM. Selain itu, pergantian pejabat Kepala Desa/ Lurah pada Tengah tahun turut menghambat berjalannya program.	<ul style="list-style-type: none">- Petugas pendamping IBM melakukan koordinasi dan advokasi lebih intensif dengan Kepala Desa/ Lurah tentang kebermanfaatannya program IBM dan kinerja AP.- Petugas pendamping IBM melakukan koordinasi dengan bidang P2M untuk penentuan lokasi IBM di tempat yang lebih kondusif serta tidak dipaksakan di lokasi yang pejabat Kepala Desa/ Lurahnya tidak responsif.
	3	Latar belakang AP variatif, yang menyebabkan AP sibuk dan kurang berkomitmen menjalankan program.	Petugas pendamping IBM berkoordinasi dengan Kepala Desa/ Lurah untuk membentuk dan melakukan kaderisasi tim AP.
	4	AP kesulitan memperoleh klien karena adanya stigma terhadap penyalah guna narkoba. Selain itu, citra IBM sebagai produk BNN juga menghambat proses	<ul style="list-style-type: none">- Petugas pendamping IBM melakukan sosialisasi baik formal maupun informal dengan melibatkan tokoh-tokoh kunci di lingkungan, dan



Kategori	No.	Hasil Identifikasi Masalah	Rekomendasi
		penjangkauan karena ada kekhawatiran dari penyalah guna bahwa ia akan diproses hukum jika mengikuti program IBM.	<p>diharapkan dapat bersinergi dengan PKK atau Posyandu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Petugas pendamping IBM tidak menggunakan atribut BNN dalam pembinaan dan pendampingan kepada tim AP. - Petugas pendamping IBM mengarahkan tim AP untuk memulai pendekatan kepada masyarakat dengan mengedepankan informasi terkait layanan kesehatan, selanjutnya dapat ditambahkan informasi terkait masalah terkait penyalahgunaan narkotika. - Petugas pendamping IBM dan tim AP berkolaborasi dengan petugas SIL untuk melakukan penjangkauan di lokasi IBM, dimana nantinya klien dengan hasil skrining risiko rendah ditangani di IBM, dan klien dengan hasil skrining risiko sedang s.d. tinggi ditangani di klinik BNNP/K/Kota.
Proses pelaksanaan program IBM	1	Pemantauan, pembinaan dan pendampingan unit IBM yang dibentuk tahun 2022 tidak optimal, salah satu kendalanya termasuk keberadaan tim AP yang sudah tidak aktif.	Petugas pendamping IBM melakukan pemantauan, pembinaan dan pendampingan dengan mengoptimalkan berbagai metode termasuk virtual.
	2	Pencatatan dan pelaporan belum dilakukan sesuai dengan pedoman dan belum semuanya dilaporkan kepada Kepala Desa/ Lurah.	Petugas pendamping IBM melakukan pembinaan dan pendampingan untuk pencatatan & pelaporan IBM dengan mengoptimalkan berbagai metode termasuk virtual, juga mengingatkan

Kategori	No.	Hasil Identifikasi Masalah	Rekomendasi
			untuk melaporkan kegiatan & layanan IBM secara berkala ke Kepala Desa/ Lurah.
	3	Waktu pelaksanaan layanan IBM tidak maksimal sesuai alur layanan dan pedoman disebabkan AP kesulitan mencari klien.	<ul style="list-style-type: none"> - Petugas pendamping IBM melakukan sosialisasi baik formal maupun informal dengan melibatkan tokoh-tokoh kunci di lingkungan, dan diharapkan dapat bersinergi dengan PKK atau Posyandu - Petugas pendamping IBM berkolaborasi dengan petugas SIL di klinik BNNP/K/Kota dalam melakukan penjangkauan di lokasi IBM.
	4	Jangka waktu pelaksanaan pengukuran kualitas hidup (WHO-QoL) dalam evaluasi tahap awal dan akhir tidak sesuai dengan pedoman sehingga tidak maksimal hasilnya.	Melakukan evaluasi perkembangan klien tahap awal saat rangkaian penerimaan awal, dan evaluasi tahap akhir setelah seluruh rangkaian layanan hingga bina lanjut telah selesai dilaksanakan.
Sarana & prasarana	1	Pemilihan dan penetapan lokasi IBM di daerah kategori waspada & bahaya, serta jaraknya cukup jauh dari BNNP/K/Kota terdekat sehingga mempengaruhi pembinaan IBM & menghambat program.	<ul style="list-style-type: none"> - Bidang/ seksi Rehabilitasi dan P2M saling berkoordinasi secara intensif mengenai kriteria pemilihan lokasi Desa Bersinar yang dapat mengakomodir kebutuhan masing-masing program. - Jika lokasi IBM dalam kategori Bahaya, perlu melibatkan bidang/ seksi pemberantasan. Selain itu, AP juga perlu didampingi petugas keamanan desa/ kelurahan (Babinsa/ Babinkamtibmas/ tokoh kunci setempat).

Kategori	No.	Hasil Identifikasi Masalah	Rekomendasi
Pendanaan Mandiri	1	Pendekatan BNNP/K/Kota dan tim AP terhadap pemerintah desa/ kelurahan belum optimal mengenai informasi kebutuhan anggaran IBM secara rinci sehingga dapat dialokasikan dari anggaran perubahan atau tahun selanjutnya.	<ul style="list-style-type: none"> - Petugas pendamping IBM & tim AP melakukan advokasi kepada Kepala Desa/ Lurah untuk menekankan pentingnya pendanaan program IBM atau mensinergikan alokasi anggaran program sejenis untuk mendukung keberlanjutan dan pengembangan program IBM. - Kegiatan IBM dapat disinergikan/ dikolaborasikan dengan program/ kegiatan yang sudah ada di desa/ kelurahan.



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
**Direktur Penguatan Lembaga Rehabilitasi
Komponen Masyarakat (PLRKM)**

dr. Amrita Devi, Sp.KJ, M.Si

IKM Admin Panel

Klinik Pratama BNN Kota Surabaya

Nama PJ : Ika Nur Widayati SST

- Beranda
- Dashboard**
- Statistik Partisipan
- Rawat Jalan
- Rawat Jalan Anak

Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Rehabilitasi Narkotika

Dashboard / Indeks Kepuasan Masyarakat

Gabungan | 2023 | Semua Periode | Filter Periode: Dari | Sampai | Filter

Capaian IKM Layanan Rehabilitasi Provinsi Jawa Timur pada Klinik/UPT Klinik Pratama BNN Kota Surabaya Periode Tahun 2023



Kesimpulan

Kepuasan layanan rehabilitasi Provinsi Provinsi Jawa Timur pada Klinik Pratama BNN Kota Surabaya memenuhi kategori Baik (B).
Berdasarkan unsur kepuasan layanan yang dinilai semua unsur layanan agar dipertahankan kualitasnya.

Kategori IKM

3,533 - 4,000 = Sangat Baik (A)
3,065 - 3,532 = Baik (B)
2,599 - 3,064 = Kurang Baik (C)
1,000 - 2,598 = Tidak Baik(D)



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR
KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA
JL. Raya Sukomanunggal Jaya No.1 Kota Surabaya 60188
Telp. (031) 7382298 Fax. (031) 7382298 <https://www.kejari-surabaya.go.id>

"Demi Keadilan dan Kebenaran
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

P-21

Nomor : B-1870/M.5.10/Enz.1/04/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana atas nama Tersangka **RICHE SETIAWAN Als RICHIE Bin (Alm) SURYANTO** melanggar Pasal 114 ayat (1) Atau Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah lengkap.

SURABAYA, 12 April 2023

KEPADA Yth,
KEPALA BNN KOTA SURABAYA
Di -
SURABAYA

Sehubungan dengan penyerahan berkas perkara pidana atas nama Tersangka **RICHE SETIAWAN Als RICHIE Bin (Alm) SURYANTO** Nomor BP-01-BRTS-IV-2023-BNN KOTA SURABAYA tanggal 04 April 2023 yang kami terima tanggal 05 April 2023 setelah dilakukan penelitian ternyata hasil penyidikannya sudah lengkap.

Sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (3) huruf b, pasal 138 ayat (1) dan pasal 139 KUHAP supaya Saudara(i) menyerahkan tanggung jawab Tersangka dan barang bukti kepada kami, guna menentukan apakah perkara tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan.

Demikian untuk dimaklumi.

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA
SELAKU PENUNTUT UMUM



JOKO BUDI DARMAWAN, S.H., M.H.
JAKSA UTAMA PRATAMA NIP. 197702232000121002

Tembusan :

1. Yth. KAJATI JATIM;
2. Yth. KEPALA BNN PROV. JATIM;
3. ARSIP



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan SERTIFIKAT ELEKTRONIK yang diterbitkan oleh BSN





**KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR
KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA**
JL. Raya Sukomanunggal Jaya No.1 Kota Surabaya 60188
Telp. (031) 7382298 Fax. (031) 7382298 <https://www.kejari-surabaya.go.id>

**"Demi Keadilan dan Kebenaran
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"**

P-21

Nomor : B-1869/M.5.10/Enz.1/04/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana atas nama Tersangka **SOENTORO Bin (Alm) MOCH. ATIM** melanggar Pasal 114 ayat (2) Atau Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah lengkap.

SURABAYA, 12 April 2023

**KEPADA Yth,
KEPALA BNN KOTA SURABAYA
Di -
SURABAYA**

Sehubungan dengan penyerahan berkas perkara pidana atas nama Tersangka **SOENTORO Bin (Alm) MOCH. ATIM** Nomor BP-02-BTRS-IV-2023-BNN KOTA SURABAYA tanggal 04 April 2023 yang kami terima tanggal 05 April 2023 setelah dilakukan penelitian ternyata hasil penyidikannya sudah lengkap.

Sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (3) huruf b, pasal 138 ayat (1) dan pasal 139 KUHAP supaya Saudara(i) menyerahkan tanggung jawab Tersangka dan barang bukti kepada kami, guna menentukan apakah perkara tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan.

Demikian untuk dimaklumi.

**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA
SELAKU PENUNTUT UMUM**



JOKO BUDI DARMAWAN, S.H., M.H.
JAKSA UTAMA PRATAMA NIP. 197702232000121002

Tembusan :

1. Yth. KAJATI JATIM;
2. Yth. KEPALA BNN PROV. JATIM;
3. ARSIP



Dokumen ini telah disandatangan secara elektronik menggunakan SERTIFIKAT ELEKTRONIK yang diterbitkan oleh BSE





Nomor : B-3950/M.5.10/Enz.1/09/2023.
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana atas nama Tersangka **ROBBI KURNIAWAN Als ROBEK Bin AGUS SETIONO** melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Atau Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah lengkap.

SURABAYA, 08 September 2023

KEPADA Yth,
KEPALA BNN KOTA SURABAYA
Di-
SURABAYA

Sehubungan dengan penyerahan berkas perkara pidana atas nama Tersangka **ROBBI KURNIAWAN Als ROBEK Bin AGUS SETIONO** Nomor BP/03-BRTS/VIII/2023/BNN KOTA SURABAYA tanggal 08 Agustus 2023 yang kami terima tanggal 08 Agustus 2023 setelah dilakukan penelitian ternyata hasil penyidikannya sudah lengkap.

Sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (3) huruf b, pasal 138 ayat (1) dan pasal 139 KUHAP supaya Saudara(i) menyerahkan tanggung jawab Tersangka dan barang bukti kepada kami, guna menentukan apakah perkara tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan.

Demikian untuk dimaklumi.

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA
SELAKU PENUNTUT UMUM



JOKO BUDI DARMAWAN, S.H., M.H.
JAKSA UTAMA PRATAMA NIP. 197702232000121002

Tembusan :

1. Yth. KAJATI JATIM;
2. Yth. KEPALA BNN PROV. JATIM;
3. ARSIP





Nomor : B-3951/M.5.10/Enz.1/09/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pemberitahuan hasil penyidikan
perkara pidana atas nama Tersangka
**RAFI MAHARDHIKA
KURNIAWAN Als EPRET Bin
FREDDY** melanggar Pasal 114 ayat
(1) Jo Pasal 132 ayat (1) Atau Pasal
111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU
RI No.35 Tahun 2009 tentang
Narkotika sudah lengkap.

SURABAYA, 08 September 2023

KEPADA Yth,
KEPALA BNN KOTA SURABAYA
Di-
SURABAYA

Sehubungan dengan penyerahan berkas perkara pidana atas nama Tersangka **RAFI MAHARDHIKA KURNIAWAN Als EPRET Bin FREDDY** Nomor BP/04-BRTS/VIII/2023/BNN KOTA SURABAYA tanggal 08 Agustus 2023 yang kami terima tanggal 08 Agustus 2023 setelah dilakukan penelitian ternyata hasil penyidikannya sudah lengkap.

Sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (3) huruf b, pasal 138 ayat (1) dan pasal 139 KUHAP supaya Saudara(i) menyerahkan tanggung jawab Tersangka dan barang bukti kepada kami, guna menentukan apakah perkara tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan.

Demikian untuk dimaklumi.

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA
SELAKU PENUNTUT UMUM



JOKO BUDI DARMAWAN, S.H., M.H.
JAKSA UTAMA PRATAMA NIP. 197702232000121002

Tembusan :

1. Yth. KAJATI JATIM;
2. Yth. KEPALA BNN PROV. JATIM;
3. ARSIP





KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR
KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA

Jl. Raya Sukomanunggal Jaya No.1 Kota Surabaya 60188
Telp. (031) 7382298 Fax. (031) 7382298 <https://www.kejari-surabaya.go.id>

"Demi Keadilan dan Kebenaran
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

P-21

Nomor : B-3952/M.5.10/Enz.1/09/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana atas nama Tersangka **RENDY APRIADI Als RENDY Bin SULAIMI BUANG (Alm)** melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Atau Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah lengkap.

SURABAYA, 08 September 2023

KEPADA Yth,
KEPALA BNN KOTA SURABAYA
Di-
SURABAYA

Sehubungan dengan penyerahan berkas perkara pidana atas nama Tersangka **RENDY APRIADI Als RENDY Bin SULAIMI BUANG (Alm)** Nomor BP/05-BRTS/VIII/2023/BNN KOTA SURABAYA tanggal 08 Agustus 2023 yang kami terima tanggal 08 Agustus 2023 setelah dilakukan penelitian ternyata hasil penyidikannya sudah lengkap.

Sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (3) huruf b, pasal 138 ayat (1) dan pasal 139 KUHAP supaya Saudara(i) menyerahkan tanggung jawab Tersangka dan barang bukti kepada kami, guna menentukan apakah perkara tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan.

Demikian untuk dimaklumi.

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA
SELAKU PENUNTUT UMUM



JOKO BUDI DARMAWAN, S.H., M.H.
JAKSA UTAMA PRATAMA NIP. 197702232000121002

Tembusan :

1. Yth. KAJATI JATIM;
2. Yth. KEPALA BNN PROV. JATIM;
3. ARSIP





KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR
KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA

JL. Raya Sukomanunggal Jaya No.1 Kota Surabaya 60188
Telp. (031) 7382298 Fax. (031) 7382298 <https://www.kejari-surabaya.go.id>

"Demi Keadilan dan Kebenaran
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

P-21

Nomor : B-4573/M.5.10/Enz.1/10/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana atas nama Tersangka SYAIFUL ANAM Als IPUL Bin HASAN (Alm) melanggar Pasal 114 ayat (1) Atau Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah lengkap.

SURABAYA, 11 Oktober 2023

KEPADA Yth,
KEPALA BNN KOTA SURABAYA
Di-
SURABAYA

Sehubungan dengan penyerahan berkas perkara pidana atas nama Tersangka SYAIFUL ANAM Als IPUL Bin HASAN (Alm) Nomor BP/06-BRTS/IX/2023/BNN Kota Surabaya tanggal 26 September 2023 yang kami terima tanggal 27 September 2023 setelah dilakukan penelitian ternyata hasil penyidikannya sudah lengkap.

Sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (3) huruf b, pasal 138 ayat (1) dan pasal 139 KUHAP supaya Saudara(i) menyerahkan tanggung jawab Tersangka dan barang bukti kepada kami, guna menentukan apakah perkara tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan.

Demikian untuk dimaklumi.

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA
SELAKU PENUNTUT UMUM



JOKO BUDI DARMAWAN, S.H., M.H.
JAKSA UTAMA PRATAMA NIP. 197702232000121002

Tembusan :

1. Yth. KAJATI JATIM;
2. Yth. KEPALA BNN PROV. JATIM;
3. ARSIP



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
dengan menggunakan SERTIFIKAT ELEKTRONIK
yang diterbitkan oleh BSN



CNS

